



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 31 Maret 2026

Inspektur Kabupaten Badung



✚ I Gusti Ayu Agung Trisna Dewi, SE, AK, MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 1977130200003 2 001



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung serta pelaksanaan program prioritas yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Badung Tahun 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Sepanjang Tahun 2025, berbagai upaya telah dilaksanakan secara optimal melalui sinergi seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan. Capaian kinerja yang diraih merupakan hasil kerja bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan dan tantangan yang perlu terus diperbaiki secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, menjadi sarana evaluasi yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 25 Maret 2026
BUPATI BADUNG,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/694e4a67c3d418ae60c4e5133d4e8a10>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 dengan visi “**Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana**” terdiri dari 9 (sembilan) misi, 11 (sebelas) Tujuan, 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama (IKU).

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2025 dari 22 indikator kinerja utama yaitu sebesar 2.841 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 142. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :



- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 18 indikator kinerja utama
- b. Dibawah target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama
- c. Capaian Kinerja belum rilis sebanyak 1 indikator kinerja utama
- d. Tidak diukur sebanyak 1 indikator kinerja utama

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83,50 (Sangat Tinggi)	98,1	117
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,75 (BB)	76,82 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Belum rilis
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,40 (Baik)	4,44 (Sangat Baik)	131
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	67,55 (Rendah)	83,10 (Tinggi)	123
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50 (Baik)	90,09 (Sangat Baik)	103
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	-	Tidak dilaksanakan bukti terlampir



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	80,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,65 (Sangat Tinggi)	84,27 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	9,00%	54,38%	604
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	30,00%	43,63%	145
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,39%	26,19%	230
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	77,14	77,60	101
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,78%	1,90%	107
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	10,25%	10,27%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,98%	53,33%	167



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	101,00 (Surplus)	118,15	117
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,60	133,72	134
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	27,50%	26,63%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,81 (Sedang)	70,98	115
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7764 (Sangat Tinggi)	4,2100 (Sangat Tinggi)	111
Total Kinerja							2.841
Rata-rata Kinerja							142

Alokasi anggaran untuk program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025 sebesar Rp. 10.329.844.858.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.469.327.277.710,- sehingga persentase penyerapan sebesar 62,63%.



Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mendorong pencapaian target yang lebih optimal pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan beberapa upaya perbaikan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan Kinerja
2. Optimalisasi Implementasi SAKIP
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
6. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi

Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam tata kelola pemerintahan, sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang unggul, transparan, dan berorientasi hasil, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.3. Gambaran Perekonomian	7
1.4. Gambaran IPM	14
1.5. Gambaran Pemerintahan	15
1.6. Sumber Daya Manusia	21
1.7. Sumber Daya Keuangan	23
1.8. Isu Strategis	24
1.9. Arah Kebijakan	25
1.10. Manajemen Risiko Pencapaian Kinerja	38
1.11. Sistematika Laporan	39
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	40
2.1. RPJMD Semesta Berencana 2021 – 2026	40
2.2. RKPD dan RKT Tahun 2025	46
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	55
3.2. Analisis Capaian Kinerja	58
3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan	222
3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	229
3.5. Prestasi/Penghargaan	233
BAB IV PENUTUP	240
4.1. Kesimpulan	240
4.2. Upaya Perbaikan Kinerja	241



LAMPIRAN :

- Lampiran I : Program Prioritas Sesuai Tabel 6.3 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 beserta anggaran tahun 2025
- Lampiran II : Formulasi Penghitungan Indikator Sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025	4
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	4
Tabel 1.3 Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2025	5
Tabel 1.4 Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2025	6
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2025	7
Tabel 1.6 Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025	9
Tabel 1.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016-2025	10
Tabel 1.8 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022- 2025	11
Tabel 1.9 Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural Di Kabupaten Badung Tahun 2025	17
Tabel 1.10 Distribusi Aparatur Sipil Negara	21
Tabel 1.11 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	21
Tabel 1.12 Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	22
Tabel 1.13 Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2025	23
Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026	43
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	49



Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	53
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025	56
Tabel 3.2	Nilai IKM Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik di Kabupaten Badung Tahun 2025	93
Tabel 3.3	Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2025	103
Tabel 3.4	Jumlah Desa Adat, Cagar Budaya, dan Subak di Kabupaten Badung Tahun 2025	112
Tabel 3.5	Jumlah Sekaa Tari, Tabuh dan Kidung di Kabupaten Badung Tahun 2025	113
Tabel 3.6	Rincian Pendukung Capaian Kinerja IPM Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	122
Tabel 3.7	Distribusi Sekolah dan Siswa Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	126
Tabel 3.8	Koperasi Sehat Per Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025	135
Tabel 3.9	Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	143
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2020-2025	164
Tabel 3.11	Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2021-2025	165
Tabel 3.12	Distribusi Daya Tarik Wisata Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025	172
Tabel 3.13	Distribusi Luas Sawah, Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	187
Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2025	196
Tabel 3.15	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Badung Tahun 2025	204
Tabel 3.16	Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2025	223
Tabel 3.17	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program di Kabupaten Badung Tahun 2025	230
Tabel 3.18	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2025	233



DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>	
Grafik 1.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	8
Grafik 1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung tahun 2023-2025	12
Grafik 1.3	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung tahun 2023-2025	13
Grafik 1.4	Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025	13
Grafik 1.5	Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2025	14
Grafik 1.6	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2023-2025	15
Grafik 3.1	Nilai IKUB Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	60
Grafik 3.2	Target dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	66
Grafik 3.3	Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2025	68
Grafik 3.4	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	73
Grafik 3.5	Target dan Capaian Indeks SPBE Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	78
Grafik 3.6	Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2025	80
Grafik 3.7	Target dan Capaian IP ASN di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	87
Grafik 3.8	Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	95
Grafik 3.9	Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	101



Grafik 3.10	Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024	108
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2025	115
Grafik 3.12	Target dan Capaian IPM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	123
Grafik 3.13	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2025	125
Grafik 3.14	Target dan Capaian Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	133
Grafik 3.15	Target dan Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	141
Grafik 3.16	Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022-2026	148
Grafik 3.17	Target dan Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	154
Grafik 3.18	Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	162
Grafik 3.19	Target dan Capaian Indikator Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	171
Grafik 3.20	Target dan Capaian Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	179
Grafik 3.21	Target dan Capaian NTUP di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	185
Grafik 3.22	Target dan Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	195
Grafik 3.23	Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	202
Grafik 3.24	Target dan Capaian IKLH Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	209



Grafik 3.25	Perbandingan capaian IKLH dengan daerah lainnya Tahun 2025	211
Grafik 3.26	Target dan Capaian IDSD Kabupaten Badung Tahun 2022-2025	217



DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	16
Gambar 3.2	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 kepada Presiden sesuai peraturan yang terbaru.

Dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2025, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;

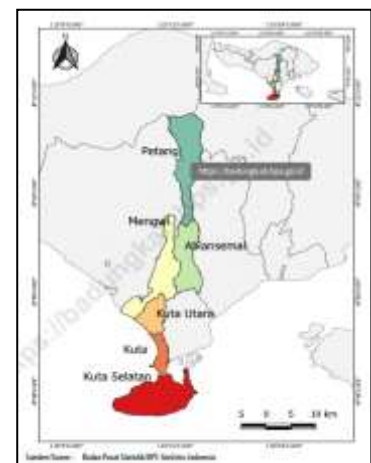


10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Gambaran Geografis

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian tengah dan selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara $8^{\circ}14'20''$ - $8^{\circ}50'52''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}05'03''$ dan $115^{\circ}26'51''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.



Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 Desa dan 16 Kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Kuta Selatan merupakan kecamatan terluas dengan luas 101,45 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah



22,19 km². Disamping memiliki desa/kelurahan, terdapat 124 desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas, dan Lingkungan Menurut
Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2025

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Jml Desa	Jml Kelurahan	Jml Banjar Dinas	Jml Lingkungan
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	3	3	27	36
2.	Kuta	Kuta	0	5	0	28
3.	Kuta Utara	Kerobokan	3	3	43	46
4.	Mengwi	Mengwi	15	5	134	57
5.	Abiansemal	Blakihuh	18	0	125	0
6.	Petang	Petang	7	0	53	0
TOTAL			46	16	382	167

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 398,75 km², dengan wilayah terluas Kecamatan Kuta Selatan sebesar 101,45 km² atau 25,44% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 22,19 km² atau 5,57 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	101,45	25,44
2.	Kuta	Kuta	22,19	5,57
3.	Kuta Utara	Kerobokan	34,72	8,71



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
4.	Mengwi	Mengwi	81,82	20,52
5.	Abiansemal	Blahkiuh	66,36	16,64
6.	Petang	Petang	92,20	23,12
TOTAL			398,75	100

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Januari sebesar 527,50 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 7,70 mm dikarenakan pada bulan tersebut hujan hanya berlangsung beberapa hari. Sedangkan untuk hari hujan paling tinggi pada bulan Januari sebanyak 26 hari, Februari sebanyak 22 hari dan Desember sebanyak 24 hari dan terendah bulan Agustus sebanyak 5 hari. Sedangkan untuk rata-rata penyinaran matahari yang paling banyak pada bulan Agustus, sedangkan terendah pada bulan Januari sebesar 4,0 jam. Kondisi iklim di Kabupaten Badung berdasarkan data curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran seperti tabel berikut :

Tabel 1.3

Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Matahari di Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
1	Januari	527,50	26	4,0
2	Februari	480,00	22	5,7
3	Maret	262,40	18	6,5
4	April	173,10	15	8,9
5	Mei	128,50	15	6,8
6	Juni	147,30	12	7,1
7	Juli	99,00	8	7,4
8	Agustus	7,70	5	9,0



No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Penyinaran Matahari (Jam)
9	September	248,70	8	8,1
10	Oktober	171,50	7	8,7
11	November	181,30	18	6,4
12	Desember	405,30	24	5,6

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.2.2 Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2025 sebanyak 539.700 jiwa, yang terdiri dari 287.600 jiwa penduduk laki-laki dan 286.100 jiwa penduduk perempuan. Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 134.198 jiwa atau 24,87% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 33.240 jiwa (6,16%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSEN TASE (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	PETANG	16,764	16,471	33,235	6.16
2	ABIANSEMAL	49,751	50,656	100,407	18.60
3	MENGWI	66,846	67,352	134,198	24.86
4	KUTA UTARA	44,645	45,625	90,270	16.73
5	KUTA	29,129	28,927	58,056	10.76
6	KUTA SELATAN	61,321	62,214	123,535	22.89
BADUNG		268,456	271,245	539,701	100

Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur



50-54 tahun. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Badung tahun 2025

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah PDDK
1	00-04	13,196	12,222	25,418
2	05-09	18,768	17,406	36,174
3	10-14	20,241	18,738	38,979
4	15-19	21,276	19,821	41,097
5	20-24	23,151	21,909	45,060
6	25-29	22,917	22,236	45,153
7	30-34	18,587	18,818	37,405
8	35-39	14,999	15,844	30,843
9	40-44	16,685	18,968	35,653
10	45-49	19,100	21,826	40,926
11	50-54	22,475	23,928	46,403
12	55-59	20,047	19,310	39,357
13	60-64	13,712	13,226	26,938
14	65-69	9,289	9,984	19,273
15	70-74	6,189	6,476	12,665
16	75+	7,824	10,533	18,357
TOTAL		268,456	271,245	539,701

Sumber data : Data Agregat Semester I Tahun 2025 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

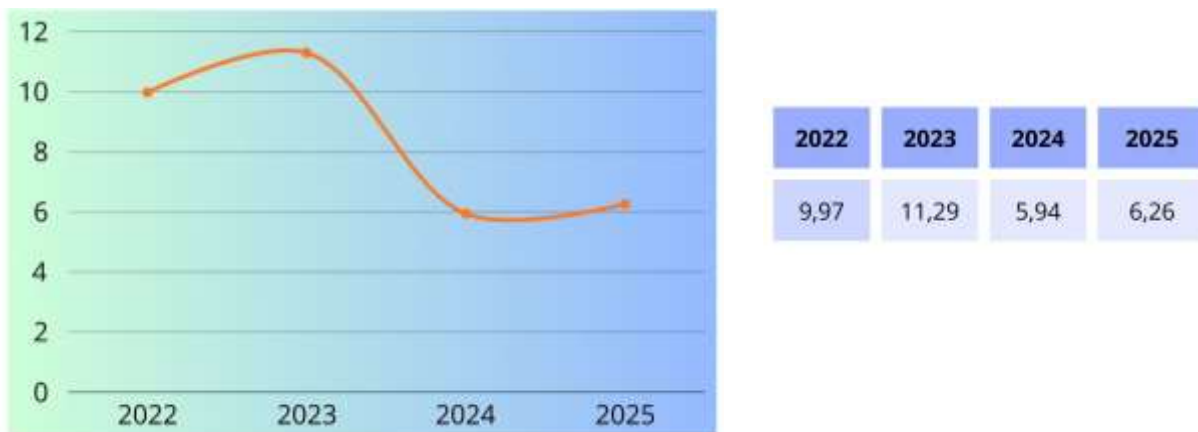
1.3 Gambaran Perekonomian

1.3.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2025 tercatat sebesar 6,26%. Sektor dengan sumbangan terbesar terhadap laju pertumbuhan ini adalah Jasa Keuangan dan Asuransi. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025 gambar berikut :



Grafik 1.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Distribusi penduduk miskin di Kabupaten Badung cenderung mengalami penurunan dan terendah di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali. Pada tahun 2024 terdapat 16,87 ribu jiwa penduduk miskin atau 2,23% dan mengalami penurunan pada Tahun 2025 terdapat 14,66 ribu jiwa penduduk miskin atau 1,9%. Secara lengkap Distribusi penduduk miskin di Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025 seperti Tabel berikut:



Tabel 1.6

Distribusi dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2024	2025	2024	2025
1	Kab. Badung	16,87	14,66	2,23	1,90
2	Kab. Tabanan	20,16	19,45	4,4	4,23
3	Kab. Jembrana	12,9	12,45	4,51	4,33
4	Kab. Gianyar	21,45	20,00	4	3,71
5	Kab. Klungkung	9,68	9,48	5,3	5,18
6	Kab. Bangli	11,79	11,28	5,06	4,83
7	Kab. Karangasem	27,76	27,32	6,52	6,40
8	Kab. Buleleng	36,55	35,39	5,39	5,20
9	Kota Denpasar	27,27	23,20	2,59	2,16
Provinsi Bali		184,43	173,24	4,25	3,72

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Badung Tahun 2025

Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/*poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada Tabel berikut :



Tabel 1.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Badung Tahun 2016-2025

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1	2016	0,19	0,05
2	2017	0,21	0,05
3	2018	0,28	0,07
4	2019	0,16	0,03
5	2020	0,31	0,07
6	2021	0,43	0,10
7	2022	0,29	0,05
8	2023	0,11	0,01
9	2024	0,32	0,07
10	2025	0,26	0,07

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Koefisien Gini (Gini Ratio)* menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: $0 < 0,35$ menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran $0,35-0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio $> 0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 menunjukkan ketimpangan pendapatan tingkat rendah. Akan tetapi kondisi ini perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perkembangan gini ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022 – 2025 seperti pada Tabel berikut :



Tabel 1.8

Perbandingan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2022- 2025

No	Kabupaten	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	0,33	0,33	0,29	0,30
2	Kab. Tabanan	0,30	0,35	0,30	0,25
3	Kab. Badung	0,32	0,28	0,28	0,31
4	Kab. Gianyar	0,31	0,32	0,29	0,28
5	Kab. Klungkung	0,35	0,34	0,31	0,29
6	Kab. Bangli	0,29	0,28	0,30	0,26
7	Kab. Karangasem	0,30	0,34	0,28	0,28
8	Kab. Buleleng	0,28	0,31	0,28	0,29
9	Kota Denpasar	0,37	0,34	0,34	0,32
Provinsi Bali		0,36	0,36	0,36	0,35

Sumber data: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2025

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. Selain itu pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas Kabupaten Badung dalam implementasi RB Tematik. Berikut rencana aksi yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung diantaranya : Mengurangi Beban Masyarakat, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, dan Meminimalkan Kantong Kemiskinan.

1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun



berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2023-2025 menunjukkan peningkatan secara linier. Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023-2025 seperti gambar berikut :

Grafik 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung
tahun 2023-2025



Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 menurun. Berikut gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 seperti gambar:



Grafik 1.3

Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung tahun 2023-2025



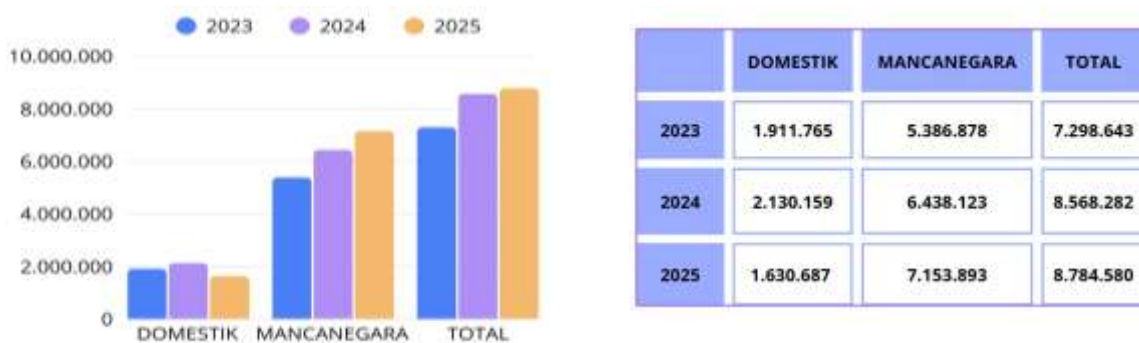
Sumber Data : Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2026

1.3.5. Gambaran Kepariwisata

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di manca negara. Adapun total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung sepanjang Tahun 2025 sebanyak 8,784,580 terdiri atas 7,153,893 kunjungan wisata mancanegara dan 1,630,687 kunjungan wisata domestik, dimana mengalami kenaikan dari Tahun 2024 yakni sebesar 216,298 wisatawan. Berikut perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025 seperti pada gambar berikut :

Grafik 1.4

Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Badung Tahun 2023-2025



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2025



Kunjungan wisatawan ke Badung pada tahun 2025 didominasi wisatawan mancanegara. Adapun wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung Tahun 2025 berasal dari Negara Australia sebanyak 1,670,880 orang. Lima Negara teratas berkenaan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung pada tahun 2025 secara rinci seperti pada gambar berikut :

Grafik 1.5
Lima Negara dengan Jumlah Wisata Terbanyak yang Berkunjung ke Kabupaten Badung Tahun 2025



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2025

1.4 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2023-2025 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2025 sebesar 84,27 termasuk kategori sangat tinggi melebihi pencapaian provinsi Bali yakni sebesar 79,37 serta nasional sebesar 75,9. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks



Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2023-2025 seperti gambar berikut :

Grafik 1.6
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung
Tahun 2023-2025



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung Tahun 2025

Capaian indikator makro daerah Tahun 2025 menunjukkan tren positif, antara lain penurunan tingkat kemiskinan menjadi 1,90% serta peningkatan IPM menjadi 84,27. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Namun demikian, penguatan manajemen kinerja tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan capaian tersebut. Setiap indikator makro memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis RPJMD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, sehingga pencapaiannya harus dianalisis secara komprehensif dalam kerangka efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya.

1.5 Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah



Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Berdasarkan peraturan ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 37 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas dan 6 Kecamatan. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Sumber data : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Badung



Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 sebanyak 471 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan structural/eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.9
Jumlah, Tipe dan Jumlah Struktural
Di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	1 2		36		55
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3		9		13
3	Inspektorat;	A		1	5		3		9
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4	15		21
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4	15		21
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4	15		21
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	27		37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	18		25
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	15		21
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	21		29



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	18		25
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	15		21
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	17		24
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	11		16
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	11		16
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	11		16
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	11		16
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	11		16



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	11		16
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	15		21
26	Badan Pendapatan Daerah	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	11		16
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	6		10
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	B		1	1	3	8		13
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	9		14
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;	A		1	1	3	11		16
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	B		1	3	12	21		37
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						26	27	53
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	37	56	8	522	103	845

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung Tahun 2025



1.6 Gambaran Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 6.167 orang dan PPPK berdasarkan Badung Dalam Angka 2026 berjumlah 10.306 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

Tabel 1.10
Distribusi Aparatur Sipil Negara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2024		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	SD	78	49	127
2	SMP	242	145	387
3	SMA	2777	1298	4075
4	DIPLOMA I/II	7	7	14
5	DIPLOMA III/IV	279	1147	1426
6	S1	3854	5779	9633
7	S2	454	459	913
8	S3	8	7	15
	JUMLAH	7699	8891	16590

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025

1.6.1. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/d sebanyak 1.462 orang sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti berikut :

Tabel 1.11
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	GOLONGAN	2025		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
1	I/a	0	0	0
2	I/b	0	1	1
3	I/c	1	0	1
4	I/d	4	1	5
5	II/a	22	1	23
6	II/b	74	35	109



NO	GOLONGAN	2025		
		LAKI	WANITA	JUMLAH
7	II/c	145	246	391
8	II/d	191	94	285
9	III/a	472	391	863
10	III/b	600	814	1414
11	III/c	187	291	478
12	III/d	547	915	1462
13	IV/a	231	295	526
14	IV/b	176	233	409
15	IV/c	88	108	196
16	IV/d	4	0	4
Jumlah		2742	3425	6167

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025

1.6.2 Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional tertentu sebanyak 3282 orang sedangkan untuk jabatan struktural yakni eselon IV.a yakni sebanyak 235 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan seperti tabel berikut:

Tabel 1.12

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2025

Jabatan	2025		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional	1019	2263	3282
Pelaksana	1464	1023	2487
Struktural			
Eselon II	24	4	28
Eselon III	91	44	135
Eselon IV	144	91	235
Eselon V	0	0	0
Jumlah/Total	2742	3425	6167

Sumber data : BKPSDM Kab. Badung Tahun 2025



1.7 Gambaran Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 11.226.163.584.719,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.107.706.479.362,33 atau sebesar 81,12%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 12.857.310.297.602,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.301.169.423.848,37 atau sebesar 64,56%. Distribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 1.13
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	11.226.163.584.719,00	9.107.706.479.362,33	81,12
	Pendapatan Asli Daerah	10.181.633.208.283,00	8.064.073.794.706,33	79,20
	Pendapatan Transfer	1.044.530.376.436,00	1.043.631.069.656,00	99,91
	Lain-lain Pendapatan yang sah	0	1.615.000,00	0
2	Belanja	12.857.310.297.602,00	8.301.169.423.848,37	64,56
	Belanja Operasi	6.512.645.861.079,00	4.866.312.031.284,37	74,72
	Belanja Modal	4.426.434.416.659,00	2.082.827.481.305,00	47,05
	Belanja Tak Terduga	231.095.646.962,00	10.732.382.752,00	4,64
	Transfer	1.687.134.372.902,00	1.341.297.528.507,00	79,50
3	Pembiayaan Daerah	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.831.146.712.883,00	586.353.241.329,03	32,02
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	Pembiayaan Netto	1.631.146.712.883,00	386.353.241.329,03	23,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	1.192.890.296.842,99	0,00

Sumber Data : BPKAD Kab. Badung Tahun 2025 (data *unaudited*)

1.8 Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan utama yang secara langsung mempengaruhi pencapaian kinerja daerah, yaitu:

1. Ketergantungan struktur ekonomi terhadap sektor pariwisata yang berimplikasi pada fluktuasi PAD.
2. Realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal, yang belum optimal pada semester awal tahun anggaran.
3. Kebutuhan peningkatan kualitas belanja agar lebih berorientasi outcome.
4. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara wilayah selatan dan wilayah utara Kabupaten Badung.
5. Tantangan penguatan integrasi Reformasi Birokrasi dengan pencapaian indikator pembangunan.

Permasalahan tersebut menjadi fokus penguatan manajemen kinerja dan perbaikan tata kelola agar capaian indikator strategis tetap terjaga sesuai target RPJMD. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, maka tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor



penyebab akar permasalahannya. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, antara lain :

1. Kapasitas Pembangunan Daerah Pendukung Indeks Kebahagiaan Daerah Kabupaten Badung
2. Potensi Ekonomi Dan Daya Saing Daerah Kabupaten Badung
3. Tantangan infrastruktur dalam arti luas

1.9 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan harmonisasi, kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat
- b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan
- c) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan



- d) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan
- e) Melaksanakan pembinaan umat beragama dalam menciptakan toleransi hidup beragama
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- g) Melaksanakan monev. kepada umat beragama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

2. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Arah Kebijakan :

- a) Penguatan penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah
- b) Penguatan Manajemen Kinerja Perangkat daerah
- c) Penguatan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)
- d) Penguatan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja
- e) Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi Program Kegiatan
- f) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah
- g) Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- h) Melakukan pembinaan dan penilaian internal Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- i) Meningkatkan Maturitas SPIP
- j) Melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat
- k) Melaksanakan pemeriksaan investigatif



- l) Melakukan pembinaan, monitoring dan verifikasi atas LHKPN dan LHKASN
- m) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)
- n) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- o) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur
- p) Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah
- q) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah
- r) Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
- s) Pemantauan program pelaksanaan pembangunan pembangunan
- t) Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD
- u) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- v) Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan diklat teknis pengawasan maupun ilmu pendukung
- w) Mengoptimalkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
- x) Penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara mandiri (self assesment)
- y) Penjaminan kualitas (Quality Assurance) oleh BPK terhadap proses pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- z) Pengembangan secara mandiri (Self Improvement) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- aa) Memanfaatkan teknologi untuk memperlancar penatausahaan dan pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- bb) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Teknologi Informasi
- cc) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM pengelola Teknologi Informasi



- dd) Meningkatkan Tata Kelola Persandian serta Operasional Pengamanan Informasi dan Komunikasi
- ee) Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral yang Akurat, Transparan dan Terintegrasi
- ff) Memberikan bimbingan teknis di bidang Pengadaan Barang dan Jasa kepada aparatur dan pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- gg) Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa
- hh) Melakukan pengawasan internal
- ii) Mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kearsipan
- jj) Mendorong dan Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Melanjutkan Pendidikan Formal
- kk) Memfasilitasi ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural
- ll) Memberikan Reward sesuai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
- mm) Memberikan Punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan
- nn) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
- oo) Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- pp) Peningkatan kapabilitas dan kapasitas penyelenggara, pelaksana pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- qq) Penyedehanaan prosedur perizinan terkait kemudahan berusaha
- rr) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- ss) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta



- tt) Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan
- uu) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi
- vv) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- ww) Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal
- xx) Memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan penyederhanaan persyaratan investasi
- yy) Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) penanaman modal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi
- zz) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan
- aaa) Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan
- bbb) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- ccc) Meningkatkan kualitas SDM Set.DPRD
- ddd) Meningkatkan kualitas koordinasi antara DPRD dan Set.DPRD serta koordinasi antar staf Set.DPRD dalam menjalankan fungsi pelayanan
- eee) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif
- fff) Meningkatnya pelayanan publik yang mudah cepat dan aman
- ggg) Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui Teknologi Informasi (TI)
- hhh) Interpretasi hasil rata rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah
- iii) Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kearuratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih



- jjj) Mempersiapkan SDM yang handal di bidang kebakaran dan non kebakaran
- kkk) Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi terkait pencegahan kebakaran, gas beracun dan penyelamatan pada seluruh elemen masyarakat
- lll) Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran dan penyelamatan ≤ 15 menit
- mmm) Sarana dan prasarana pendukung layanan pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan serta pengendalian, pencegahan kebakaran
- nnn) Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan publik yang terintegrasi
- ooo) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi untuk menciptakan layanan publik yang handal dan professional
- ppp) Memfasilitasi pelayanan administrasi permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia serta masyarakat sesuai ketentuan berlaku

3. Misi 3 : Mewujudkan Tataan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada
- b) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)



- d) Mengupayakan pembinaan yang intensif kepada masyarakat mengenai peraturan daerah yang berlaku
- e) Mengintensifkan Patroli wilayah untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- f) Melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada
- g) Melaksanakan Pembinaan kepada lembaga masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
- h) Monev. ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan
- i) Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- j) Cakupan continuum of care dengan melibatkan peran serta masyarakat
- k) Meningkatkan jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan
- l) Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- m) Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Arah Kebijakan :

- a) Mengaktifkan dan Membina Lembaga Seni
- b) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba
- d) Meningkatkan informasi kepada masyarakat tentang lomba yang dilaksanakan
- e) Memantapkan pelaksanaan pembinaan terhadap kreatifitas seni dan budaya daerah yang terdapat di masing-masing desa/ kelurahan



- f) Memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan majelis alit, widyasabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat, seni dan budaya
- g) Mendorong sektor-sektor pariwisata untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal
- h) Melaksanakan pembinaan di bidang seni dan budaya
- i) Menyelenggarakan Diklat di bidang seni dan budaya
- j) Menyelenggarakan lomba di bidang seni dan budaya
- k) Mendata warisan seni dan budaya

5. Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan mendorong program wajib belajar 12 tahun
- b) Pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas
- c) Meningkatkan profesionalisme/kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- d) Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran
- e) Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat yang berprestasi
- f) Meningkatkan kesempatan kerja
- g) Peningkatan produksi perindustrian
- h) Peningkatan produksi pertanian
- i) Peningkatan produksi perternakan
- j) Peningkatan produksi perikanan
- k) Penguatan permodalan UMKM
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat
- m) Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi



- n) Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- p) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- q) Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit milik pemerintah dan swasta
- r) Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan
- s) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat
- t) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
- u) 10 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis
- v) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based)
- w) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah

6. Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat

Arah Kebijakan :

- a) Memfasilitasi perijinan usaha
- b) Meningkatkan pemberdayaan usaha koperasi
- c) Meningkatkan kualitas koperasi
- d) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan koperasi
- e) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM
- f) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan monev KUR



- g) Mengadakan promosi baik yang berskala lokal maupun nasional
- h) Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM untuk pelaku usaha
- i) Melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola usaha
- j) Melaksanakan monitoring harga
- k) Melaksanakan Tera/Ulang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan

7. Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan
- b) Menurunkan angka usia pernikahan dini
- c) Meningkatnya jumlah pekerja yang berkualitas pada sektor pariwisata dan sektor lainnya
- d) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial
- e) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya
- f) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial

8. Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Arah Kebijakan :

- a) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) yang berbasis Agrowisata
- b) Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
- c) Meningkatkan kapasitas pelaku SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d) Pembinaan dan pelatihan manajemen pengelola Menetapkan kelembagaan pengelola
- e) Penyusunan data kunjungan wisatawan Melaksanakan Analisa pasar pariwisata Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam



- daerah, luar daerah maupun luar negeri Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media
- f) Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata
 - g) Meningkatkan kapasitas pelaku dan kualitas produk agro industri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
 - h) Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
 - i) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan Penerapan teknologi tepat guna Meningkatkan perlindungan lahan pertanian
 - j) Meningkatkan keanekaragaman produk komoditi pertanian
 - k) Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan
 - l) Peremajaan tanaman, ternak yang sudah tua dan rusak/mati
 - m) Pengembangan, peningkatan dan pemelihara sarana dan prasarana pertanian
 - n) Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
 - o) Meningkatkan perluasan akses pasar produk pertanian yang berbasis agroindustri
 - p) Meningkatkan kualitas dan validitas data base pertanian
 - q) Mengidentifikasi daerah rawan pangan
 - r) Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha perikanan
 - s) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan
 - t) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan
 - u) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Industri Pariwisata
 - v) Penyusunan database industri pariwisata
 - w) Peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
 - x) Verifikasi kesiapan tata kelola pariwisata di Kabupaten Badung pasca pandemi Covid-19
 - y) Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup



9. Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi

Arah Kebijakan :

- a) Mengoptimalkan pendampingan inovasi kepada perangkat daerah dan kelompok masyarakat baik secara komunal maupun personal
- b) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- c) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
- d) Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi
- e) Mengembangkan akses promosi dan kerjasama penanaman modal
- f) Mewujudkan ketaatan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanaman modal
- g) Peningkatan inovasi layanan kesehatan primer dan rujukan
- h) Meningkatkan kualitas dokumen kependudukan dengan menjadikan data kependudukan yang akurat dan transparan
- i) Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk
- j) Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketinggian Desa/Kel dan Banjar
- k) Pembangunan, Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Jalan dan Jembatan untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat
- l) Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air, Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Air, Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air, Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya air dan Irigasi
- m) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum, Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik, Peningkatan cakupan layanan persampahan,
- n) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara
- o) Perwujudan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang, peningkatan kinerja pemanfaatan ruang, peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang



- p) Peningkatan kerjasama pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
- q) Peningkatan pembinaan dan pengembangan rumah/hunian yang layak
- r) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya Pengendalian titik permukiman kumuh
- s) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan
- t) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestic
- u) Pembangunan sarana prasarana persampahan di kawasan
- v) Pembangunan infastruktur drainase lingkungan
- w) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Tepat waktu
- x) Pelaksanaan Verifikasi terhadap permohonan hibah uang, barang/jasa dan verifikasi terhadap PSU perumahan di Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan
- y) Capaian realisasi pekerjaan fisik dan serapan anggaran sesuai target

Kabupaten Badung sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor pariwisata memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Ketergantungan terhadap aktivitas pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menghadirkan kerentanan terhadap dinamika eksternal global.

Secara strategis, Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan pemerataan kesejahteraan. Tahun 2025 merupakan fase akselerasi pencapaian target RPJMD 2021–2026, sehingga fokus kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang



akuntabel, peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks manajemen kinerja, aspek strategis organisasi tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara konsisten.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, Secara keseluruhan, arah kebijakan Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan fase penguatan dan akselerasi pencapaian target RPJMD, dengan fokus pada:

1. Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Penguatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis UMKM dan pariwisata;
4. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan;
5. Peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi dan kreativitas.

1.10 Manajemen Risiko Pencapaian Kinerja

Dalam rangka menjaga konsistensi pencapaian target kinerja Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan identifikasi risiko strategis yang berpotensi mempengaruhi capaian sasaran, antara lain:

- Risiko fluktuasi ekonomi global terhadap sektor pariwisata.
- Risiko deviasi serapan belanja terhadap pelaksanaan program prioritas.
- Risiko ketimpangan akses layanan publik antar wilayah.
- Risiko belum optimalnya integrasi sistem e-performance dan e-budgeting.



Sebagai langkah mitigasi, dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi triwulanan, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, serta integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen kinerja Kabupaten Badung telah mengarah pada sistem yang berbasis risiko dan berorientasi hasil.

1.11 Sistematika Pelaporan

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2025 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2025.

Bab Pendahuluan I Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).



2.1 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki



peran strategis sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun. Dokumen ini disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang terukur dan berorientasi pada hasil (result oriented). Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), RPJMD juga menjadi dasar penetapan indikator kinerja utama daerah yang selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam dokumen perencanaan tahunan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja pembangunan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2021-2026 pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.



Sasaran pokok dari RPJPD periode keempat tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran



Tri Sakti yaitu:

“Berdikari di Bidang Ekonomi, Berdaulat di Bidang Politik dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.”
– Ajaran Tri Sakti

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana serta paras paros sarpanaya sagilik-saguluk sanglunglung sabayantaka. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun ke depan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut:

The infographic is titled "PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 – 2026". It is set against a background of a scenic landscape with mountains, a river, and traditional Balinese architecture. The infographic is divided into two main sections: "VISI" and "MISI".

VISI
MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA.

MISI

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government. Y999 Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Asas serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Memberdayakan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Wilayah.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agrobisnis dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi



Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
VISI : "MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"			
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama			
1.	Terwujudnya Kerukunan Hidup Bermasyarakat	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indeks kerukunan umat beragama
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi			
2.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai SAKIP
			2. Opini BPK
		2. Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
		3. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
3.	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	1. Persentase Penegakan Perda dan Perkada



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
4.	Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM	1. Terwujudnya Pemenuhan HAM	1. Capaian Atas Kepedulian HAM
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal			
5.	Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	1. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	1. Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat			
6	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat			
7	Terwujudnya UMKM sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya persentase koperasi sehat	1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat
		2. Meningkatnya jumlah wirausaha	2. Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha
		3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	3. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif			
8.	Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	1. Indeks Kebahagiaan
		2. Menurunnya angka kemiskinan	2. Persentase Penduduk Miskin

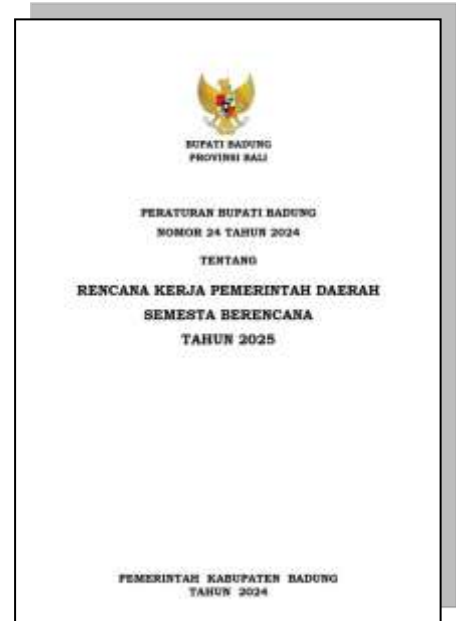


NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)
1	2	3	4
Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam			
9.	Terwujudnya Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri	1. Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	1. Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
		2. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	2. Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam
10.	Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian sinergi dengan sektor Pariwisata Berkelanjutan	1. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	1. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)
			2. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		2. Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi			
11.	Terwujudnya Daya Saing Daerah yang Tinggi	1. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)



2.2 RKPD dan RKT Tahun 2025

Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-4 (Tahun keempat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun



yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.



Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 sebagai berikut:



TEMA

"Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah"

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:



Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain:





Prioritas tersebut telah selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 2025, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Demikian pula dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Sebagai penjabaran operasional dari prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. RKT ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sekaligus sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Secara rinci sasaran strategis, indikator kinerja, dan



target kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83,50
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,75
			(BB)
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Opini BPK	WTP
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50
			(Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00
			(Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	80,00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,65
			(Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	9,00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	30,00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,39%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	77,14



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	10,25%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,98%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,00
			(Surplus)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,60
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	27,50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,81
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7764
			(Sangat Tinggi)

Sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja Pemerintah Kabupaten Badung disusun secara berjenjang dan terintegrasi dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 menjadi dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, serta indikasi pendanaan tahunan. Berdasarkan RKPD tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun. Selanjutnya, sasaran dan target



kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bentuk komitmen kinerja antara pimpinan instansi dengan unit organisasi di bawahnya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan akuntabel.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Badung Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi Perjanjian Kinerja (PK) dilaporkan dalam laporan kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui Perjanjian Kinerja (PK), terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*)
- 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
- 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** pada tanggal 30 Januari 2025 sebagai dokumen komitmen kinerja antara Bupati dengan pimpinan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja memuat indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam satu tahun sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui perjanjian kinerja ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Hidup Beragama	83,50
			(Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,75
		Opini BPK	(BB) WTP
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3, Pemerintahan yang Baik dan Bersih40
			(Baik)
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	67,55 (Rendah)
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50
			(Baik)
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00%
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00
			(Peduli HAM)
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	80,00%
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,65
			(Sangat Tinggi)
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	9,00%
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	30,00%
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,39%
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	77,14
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,78%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	10,25%
15	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,98%
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,00
			(Surplus)
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,60
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	27,50%
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,81
			(Sedang)
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,7764
			(Sangat Tinggi)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Bab ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator sasaran sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026. Pengukuran capaian ini merupakan bagian dari proses evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan akuntabel guna memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021–2026 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan (15 indikator), 19 sasaran dan 22 indikator kinerja utama (IKU).

Evaluasi kinerja Tahun 2025 menjadi sangat strategis karena berada pada fase akhir periode RPJMD 2021–2026, sehingga mencerminkan tingkat konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja Tahun 2025 dengan realisasi yang dicapai, serta melihat tren capaian dari tahun-tahun sebelumnya untuk menilai keberlanjutan dan progres kinerja.

Selain menyajikan data kuantitatif capaian indikator sasaran, bab ini juga memuat analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai dasar perumusan langkah perbaikan, penguatan strategi, dan rekomendasi kebijakan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Melalui penyajian capaian kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam memastikan kesinambungan arah pembangunan menuju periode



perencanaan berikutnya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2025 seperti pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indek kerukunan umat beragama	Nilai	83,50 (Sangat Tinggi)	98,1	117
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	2.	Nilai SAKIP	Nilai	79,75 (BB)	76,82 (BB)	96
		3.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Belum rilis
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,40 (Baik)	4,44 (Sangat Baik)	131
		5.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	67,55 (Rendah)	83,10 (Tinggi)	123
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,50 (Baik)	90,09 (Sangat Baik)	103
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	90,00%	100,00%	111
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	8.	Capaian Atas Kepedulian HAM	Nilai	75,00 (Peduli HAM)	-	Tidak dilaksanakan bukti terlampir
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	9.	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	%	80,00%	100%	132
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	10.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,65 (Sangat Tinggi)	84,27 (Sangat Tinggi)	103
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	11.	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	%	9,00%	54,38%	604
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	12.	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	%	30,00%	43,63%	145



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	13.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,39%	26,19%	230
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	14.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	77,14	77,60	101
13.	Menurunnya angka kemiskinan	15.	Persentase Penduduk Miskin	%	1,78%	1,90%	107
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	16.	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	%	10,25%	10,27%	100
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	17.	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	%	31,98%	53,33%	167
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	18.	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Nilai	101,00 (Surplus)	118,15	117
		19.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100,60	133,72	134
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	27,50%	26,63%	97
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,81 (Sedang)	70,98	115
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	22.	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Nilai	3.7764 (Sangat Tinggi)	4,2100 (Sangat Tinggi)	111
Total Kinerja							2.841
Rata-rata Kinerja							142



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan capaian di atas target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat beberapa indikator dengan capaian yang sangat tinggi, seperti pada indikator koperasi sehat dan pengembangan agroindustri, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penetapan target agar lebih realistis dan mencerminkan tingkat kinerja yang sesungguhnya. Selain itu, terdapat pula indikator yang belum mencapai target atau belum memiliki data realisasi, yang menjadi perhatian dalam perbaikan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

Capaian kinerja Tahun 2025 ini menjadi dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut terhadap masing-masing indikator kinerja utama, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, analisis capaian kinerja terhadap masing-masing indikator kinerja utama disajikan pada sub bab berikut.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas hubungan sosial antarumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini pada dasarnya merefleksikan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks pembangunan daerah, IKUB tidak hanya dimaknai sebagai ukuran harmoni sosial, tetapi juga sebagai fondasi stabilitas daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Badung sebagai bagian dari Pulau Bali dikenal sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas penduduk yang cukup tinggi. Selain mayoritas masyarakat beragama Hindu, Badung juga x`dihuni oleh umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu yang hidup berdampingan



secara harmonis. Keberagaman ini semakin diperkuat oleh karakter Badung sebagai destinasi pariwisata internasional yang berada dalam wilayah Provinsi Bali, sehingga interaksi lintas budaya dan lintas agama terjadi secara intensif dalam kehidupan sehari-hari.

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung tercermin dalam praktik toleransi sosial, dukungan terhadap pelaksanaan hari raya keagamaan masing-masing umat, serta keberadaan forum dialog lintas agama yang aktif. Nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti Tri Hita Karana turut menjadi landasan filosofis dalam membangun harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Prinsip ini memperkuat kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat yang majemuk.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada dasarnya disusun dan dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai instrumen pengukuran tingkat toleransi dan harmoni sosial antarumat beragama di Indonesia. Secara regulative, yang mendasari yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Di tingkat daerah, implementasi IKUB juga diperkuat melalui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta kebijakan kepala daerah yang mendukung dialog lintas agama dan pencegahan konflik sosial.

Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, capaian IKUB Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dalam empat tahun terakhir. Dimana capaian pada tahun 2025 sebesar 98,1 dari target yaitu 83,50 sehingga persentase capaian kinerja menjadi 117%. Berikut tren nilai IKUB Kabupaten Badung yang tergambar pada grafik 3.1 di bawah ini :



Grafik 3. 1
Nilai IKUB Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Badung

Secara kuantitatif, terjadi peningkatan sebesar 17,55 poin dalam kurun waktu 2022–2025. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2022 ke 2023, yaitu sebesar 12,85 poin, yang mengindikasikan adanya intervensi kebijakan atau penguatan program kerukunan yang cukup efektif. Selanjutnya, peningkatan tetap terjadi pada 2023–2024 (3,12 poin) dan 2024–2025 (1,58 poin), meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat.

Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Badung tahun 2025 sebesar 98,1, berada jauh di atas rata-rata Provinsi Bali sebesar 82,3 dan juga melampaui rata-rata nasional sebesar 77,89. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung tidak hanya berada pada kategori sangat tinggi, tetapi juga menjadi salah satu yang unggul dibandingkan capaian pada level provinsi maupun nasional. Selisih capaian sebesar 15,8 poin di atas provinsi dan sekitar 20,21 poin di atas nasional mencerminkan efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga toleransi, memperkuat dialog lintas agama, serta menciptakan stabilitas sosial yang kondusif. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Badung dapat dikategorikan sebagai daerah dengan praktik kerukunan umat



beragama yang sangat baik dan berpotensi menjadi role model dalam pengelolaan harmoni sosial di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan data jumlah tempat ibadah di Kabupaten Badung pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5.969 unit. Apabila dilihat dari distribusi kondisi tempat ibadah tahun 2025 dalam kategori baik, total tercatat sebanyak 5.969 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Pura: 5.790 unit
- Masjid: 17 unit
- Gereja Kristen: 134 unit
- Gereja Katolik: 19 unit
- Wihara: 9 unit

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas tempat ibadah di Kabupaten Badung adalah pura, yang tersebar di seluruh kecamatan, mencerminkan karakteristik demografis masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Secara kewilayahan, distribusi tempat ibadah kondisi baik menunjukkan bahwa:

- Kecamatan Mengwi memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.301 unit, didominasi oleh 2.274 pura.
- Kecamatan Kuta Utara sebanyak 1.150 unit.
- Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 862 unit.
- Kecamatan Abiansemal sebanyak 804 unit.
- Kecamatan Petang sebanyak 443 unit.
- Kecamatan Kuta sebanyak 409 unit.

Sebaran ini memperlihatkan bahwa selain pura sebagai tempat ibadah mayoritas, fasilitas peribadatan agama lain seperti masjid, gereja, dan wihara juga tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan yang merupakan kawasan pariwisata dengan tingkat heterogenitas penduduk yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, data jumlah dan distribusi tempat ibadah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki infrastruktur keagamaan yang memadai dan tersebar secara proporsional sesuai dengan komposisi penduduknya. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung tingginya



Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), karena tersedianya sarana ibadah yang layak merupakan prasyarat penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Kabupaten Badung menghadapi sejumlah faktor penghambat sekaligus memiliki berbagai faktor pendukung yang memperkuat stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

a. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat utama adalah penyebaran hoaks bernuansa SARA yang berpotensi menciptakan kegaduhan serta memicu ketegangan antarumat beragama. Di era digital dan media sosial, arus informasi yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik dan memicu kesalahpahaman apabila tidak ditangani secara bijak dan cepat.

b. Faktor Pendukung

Di sisi lain, Kabupaten Badung memiliki modal sosial yang sangat kuat sebagai faktor pendukung kerukunan, antara lain:

- Keaktifan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melaksanakan dialog lintas agama, mediasi, serta pemantauan rumah ibadah.
- Nilai-nilai budaya lokal seperti menyama braya, tatwam asi, dan Tri Hita Karana yang menjadi landasan filosofis dalam membangun hubungan harmonis antar sesama.
- Interaksi sosial yang harmonis melalui desa adat, banjar, serta tradisi gotong royong yang mempererat kohesi sosial.
- Kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil dan inklusif, sehingga masyarakat lebih terbuka terhadap keberagaman.
- Kegiatan lintas agama, seperti doa bersama, bakti sosial, dan perayaan hari besar keagamaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi utama yang menjelaskan tingginya capaian IKUB Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir.



c. Upaya yang Telah Dilakukan

Dalam rangka meminimalkan hambatan dan memperkuat faktor pendukung, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai langkah strategis yang bersifat preventif dan edukatif, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan komunikasi lintas agama secara berkelanjutan.
- Memperkuat kelembagaan dan peran FKUB dalam menjaga stabilitas sosial.
- Mendukung kampanye informasi yang benar, edukatif, serta menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat.

Pendekatan ini selaras dengan kebijakan daerah yang menekankan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang stabil, harmonis, serta tidak mudah terprovokasi oleh hoaks maupun narasi negatif. Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama didukung dengan 1 program prioritas yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan Pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 4,008,880,482 dan terealisasi Rp. 2,771,696,304 sehingga persentase serapan anggaran sebesar 69,14%.

Capaian 98,1 mendekati skor maksimal, yang dapat diinterpretasikan bahwa kondisi kerukunan di Kabupaten Badung berada dalam kategori sangat harmonis dan stabil. Pada tahap ini, tantangan bukan lagi pada peningkatan signifikan angka indeks, melainkan pada:

- Menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian.
- Mengantisipasi potensi gangguan sosial akibat dinamika globalisasi dan digitalisasi informasi.
- Memperkuat sistem deteksi dini konflik sosial berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung tidak hanya berbicara tentang angka capaian semata, melainkan juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi, memperkuat dialog, serta mencegah potensi konflik sosial. IKUB menjadi cerminan kualitas kehidupan sosial yang



inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan Badung yang aman, harmonis, dan berdaya saing global. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indikator IKUB di Kabupaten Badung.



FKUB Kab. Badung mengahdiri sholat idul adha bersama Wakil Bupati Badung 1446 H di Puspem Badung(31-03-2025)



Studi Tiru Dalam Rangka Peningkatan Wasan FKUB, FORPELA & FORGIMALA Kab. Badung Ke FKUB Kota Tangerang Selatan (29-08-2025)



Pertemuan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Forkopimda, FKUB, FPK, dan tokoh lintas agama dalam rangka menjaga kondusivitas di Kabupaten Badung, menyikapi unjuk rasa dari masyarakat (01-09-2025)



Bakesbangpol&FKUB Goes to School ke Sekolah dalam rangka Moderasi Beragama dan penguatan Nilai-Nilai Integritas (22-08-2025)



Peninjauan Kesiapan Perayaan Natal di Kabupaten Badung (24-12-2025)

3.2.2 Indikator Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen manajemen kinerja yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bekerja secara terencana, terukur, dan akuntabel. SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Melalui SAKIP, setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, menetapkan indikator kinerja yang jelas, serta mengukur capaian secara objektif. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil (result oriented), bukan semata-mata pada besarnya serapan anggaran.

Implementasi SAKIP mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Setiap program dan kegiatan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip value for money menjadi landasan utama, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan



harus memberikan manfaat optimal bagi publik. Lebih dari itu, SAKIP membangun budaya kerja yang profesional dan berbasis kinerja. Evaluasi berkala terhadap capaian indikator menjadi alat kendali untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Dengan sistem ini, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data dan fakta, bukan asumsi.

Pada Tahun 2025, capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung sebesar 76,82 dengan predikat “BB” dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,75. Dengan demikian, persentase capaian kinerja mencapai 96% dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik dan relatif konsisten dalam mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, selisih sebesar 2,93 poin menggambarkan bahwa sistem pengendalian dan akuntabilitas kinerja telah berada pada jalur yang tepat (on track).

Grafik 3.2
Target dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Kab. Badung
Tahun 2022-2025



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kab.Badung



Berdasarkan data capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Badung selama empat tahun terakhir, terlihat adanya tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada Tahun 2022, target nilai SAKIP ditetapkan sebesar 78,75 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 75,39. Selisih sebesar 3,36 poin menunjukkan bahwa implementasi SAKIP masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja.

Memasuki Tahun 2023, target meningkat menjadi 79, namun realisasi mengalami penurunan menjadi 76,07. Walaupun masih di bawah target, terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,68 poin dari sisi realisasi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam sistem manajemen kinerja.

Pada Tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 79,5, dengan realisasi sebesar 76,33. Capaian ini menunjukkan tren kenaikan positif meskipun belum mampu menutup gap terhadap target. Stabilitas ini mencerminkan konsistensi dalam penguatan akuntabilitas kinerja.

Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang lebih progresif. Dengan target sebesar 79,75, realisasi mencapai 76,82, menjadi capaian tertinggi selama periode empat tahun terakhir. Kenaikan sebesar 0,49 poin dibanding tahun 2024 memperlihatkan adanya perbaikan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan.

Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung telah berada pada jalur perbaikan berkelanjutan dalam implementasi SAKIP. Kenaikan nilai realisasi setiap tahun mencerminkan penguatan tata kelola kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta konsistensi monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, peningkatan nilai yang relatif stabil mengindikasikan perlunya lompatan perbaikan (*performance breakthrough*), bukan sekadar peningkatan inkremental. Penguatan pada aspek kualitas indikator outcome, cascading kinerja, serta analisis dalam LKjIP menjadi kunci untuk menutup selisih terhadap target.



Grafik 3.3

Nilai SAKIP Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2025



Sumber : Biro Organisasi Provinsi Bali

Sebagai pembandingan capaian nilai SAKIP Tahun 2025, Kabupaten Badung memperoleh nilai 76,82, yang menempatkannya diposisi tiga tertinggi di antara kabupaten lainnya di Bali. Secara signifikan berada di atas Karangasem (66,31), Klungkung (69,98), Tabanan (68,85), Gianyar (66,82), Bangli (62,9), Buleleng (69,55), dan Jembrana (69,44). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali mencatat nilai tertinggi sebesar 79,73, yang menjadi benchmark atau rujukan capaian di tingkat daerah.

Capaian nilai SAKIP tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam implementasinya. Beberapa faktor penghambat antara lain masih belum optimalnya perumusan indikator yang sepenuhnya berorientasi pada outcome, aplikasi e-SAKIP Kabupaten Badung yang belum optimal menjabarkan sampai dengan perencanaan kinerja level individu, keterkaitan perencanaan dan penganggaran yang perlu terus diperkuat, belum mewujudkan punishment yang nyata dari dampak SAKIP, serta kualitas analisis dalam pelaporan kinerja yang masih perlu pendalaman. Selain itu, pemahaman dan kapasitas SDM pengelola SAKIP yang belum merata juga menjadi tantangan tersendiri.



Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang cukup kuat, seperti komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, dukungan regulasi dan evaluasi dari pemerintah pusat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, telah mengadakan asistensi terkait Indikator Kinerja Utama dan peningkatan implementasi SAKIP di Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB melalui daring, serta adanya pembinaan dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

Sebagai upaya peningkatan nilai SAKIP, akan dilakukan penguatan kualitas perencanaan dan cascading kinerja, pengoptimalan aplikasi e-SAKIP Badung, penyempurnaan indikator berbasis outcome, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan coaching, serta optimalisasi revidi dan evaluasi internal sebelum penilaian eksternal. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan sehingga capaian nilai SAKIP dapat terus meningkat secara signifikan dan berkelanjutan

Indikator Nilai SAKIP dalam implementasinya didukung oleh 5 (lima) program prioritas, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 5.356.845.825 dan terealisasi sebesar Rp.3.324.234.044 sehingga persentase serapan anggaran pada sebesar 62,06%.

Secara keseluruhan, capaian nilai SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar 76,82 menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten. Dengan persentase capaian sebesar 96% dari target yang ditetapkan, kinerja ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola berbasis hasil dan peningkatan kualitas manajemen kinerja.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tren peningkatan yang stabil serta posisi yang kompetitif di tingkat kabupaten/kota se-Bali menjadi



indikator positif bahwa implementasi SAKIP berada pada jalur yang tepat. Ke depan, penguatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja menjadi kunci untuk mendorong capaian yang lebih optimal dan berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung Indikator Nilai SAKIP di Kabupaten Badung.



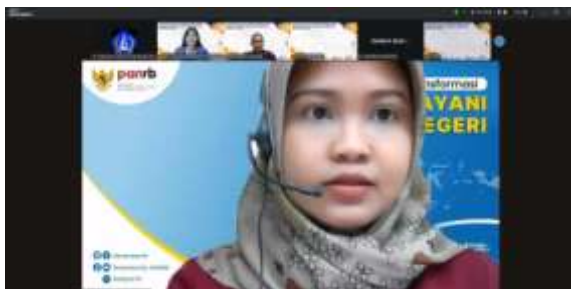
Rapat Kerja Tim SAKIP dan Evaluasi Internal Kabupaten Badung dalam rangka evaluasi kinerja Tim



Melaksanakan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen AKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB Bapak Fernando Silalahi



Pendampingan SAKIP dari Biro Organisasi Provinsi Bali



Melaksanakan kegiatan Asistensi Evaluasi IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PANRB Ibu Rani

3.2.3 Indikator Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta memberikan opini atas kewajaran penyajiannya.

Dalam praktik pemeriksaan, BPK memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- Tidak Wajar (TW)
- Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer).



Opini tersebut diberikan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian opini BPK menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya integrasi antara kinerja program/kegiatan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sampai dengan saat penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2025, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 masih dalam proses pemeriksaan sehingga opini BPK belum diterbitkan secara resmi. Oleh karena itu, informasi terkait opini BPK Tahun 2025 belum dapat disajikan dalam dokumen ini.

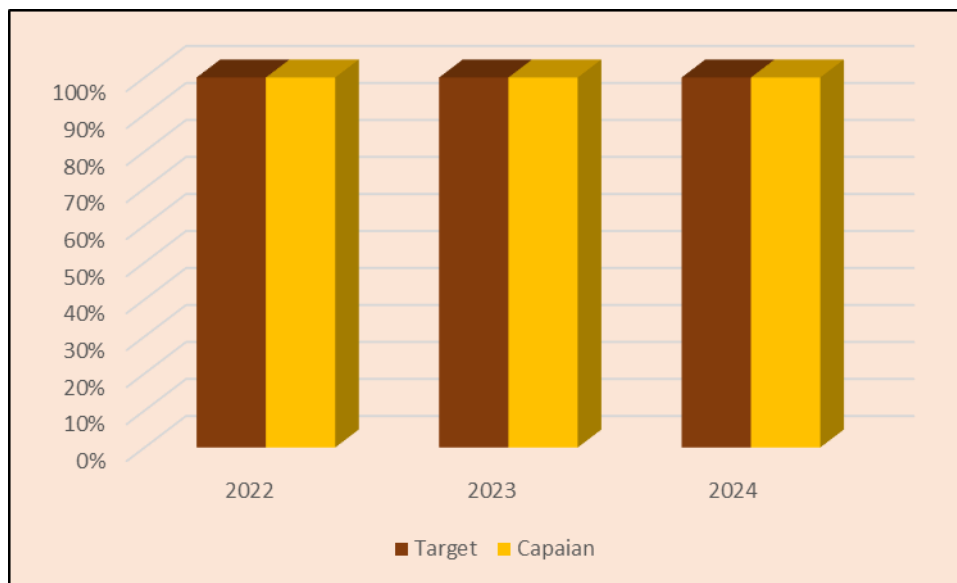
Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan rekonsiliasi keuangan secara berkala, pendampingan kepada perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan mampu menjaga konsistensi kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperoleh hasil pemeriksaan yang optimal dari Badan



Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat terus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Grafik 3.4
Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung
Tahun 2022-2024



Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Badung secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada periode tersebut, target yang ditetapkan yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan target tersebut dapat direalisasikan secara optimal setiap tahunnya. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap indikator opini BPK mencapai 100 persen, yang menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah.



Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut mencerminkan bahwa penyusunan laporan keuangan telah memenuhi kriteria utama pemeriksaan, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan adanya komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dengan capaian opini WTP secara berturut-turut tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Indikator Opini BPK didukung oleh 5 program. Program pendukung meliputi: Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 2.132.641.257.811,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.588.849.137.111,00,- dengan serapan anggaran sebesar 74,50%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), opini yang diperoleh menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pembandingan kinerja, beberapa daerah yang menjadi referensi menunjukkan capaian yang sama yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar pada tingkat kabupaten/kota, serta Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat pada tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa standar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan telah menjadi



praktik yang umum diterapkan oleh pemerintah daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi beberapa faktor penghambat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih memerlukan percepatan terutama dalam penyajian data aset. Data aset yang belum sepenuhnya tertata secara optimal dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kualitas penyusunan laporan keuangan. Selain itu, permasalahan terkait pengelolaan piutang pajak juga menjadi salah satu tantangan dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan rekonsiliasi secara periodik antara perangkat daerah terkait, sehingga data keuangan dapat diselaraskan secara lebih akurat dan tepat waktu. Selain itu, pemberian solusi teknis kepada perangkat daerah dalam menyelesaikan data pendukung LKPD seperti persediaan, piutang pajak, serta pencatatan aset turut membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan sejumlah strategi dan upaya perbaikan. Upaya yang telah dilakukan antara lain :

- Melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga perbedaan data keuangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Inspektorat Daerah juga melakukan pendampingan kepada OPD dalam rangka percepatan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kegiatan pembinaan terkait akuntansi dan pelaporan melalui pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) juga dilakukan untuk



meningkatkan pemahaman aparatur terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Ke depan, berbagai upaya perbaikan akan terus dilaksanakan guna memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan intensitas rekonsiliasi laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, serta data aset secara triwulanan dan semesteran. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan juga menjadi fokus utama agar setiap perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan daerah semakin meningkat sehingga mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator Opini BPK.



*Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 2025 pada
37 Perangkat Daerah*



Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan 2025 pada 13 Puskesmas

3.2.4 Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran Indeks SPBE bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas kinerja.

Penyelenggaraan SPBE di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menerapkan SPBE secara terpadu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam implementasinya, penerapan SPBE juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis

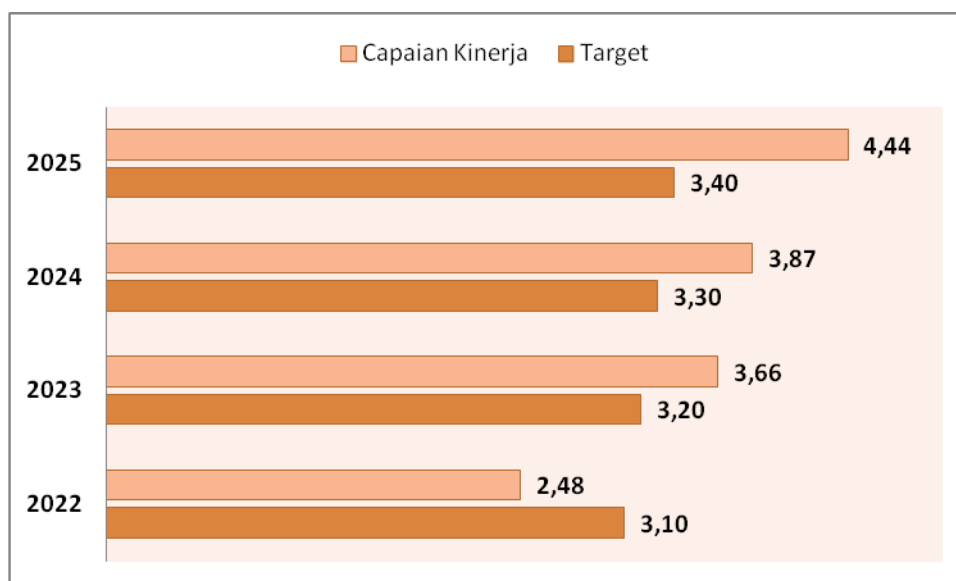


Elektronik, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penilaian dan evaluasi tingkat kematangan SPBE pada instansi pemerintah.

Berdasarkan regulasi tersebut, penilaian Indeks SPBE dilakukan melalui beberapa domain utama yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE, yaitu domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, serta domain layanan SPBE. Keempat domain tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketersediaan regulasi dan kebijakan internal, pengelolaan arsitektur SPBE, manajemen layanan teknologi informasi, hingga integrasi layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Badung, penerapan SPBE menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi proses birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi. Implementasi SPBE juga selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi fokus penilaian oleh Kementerian PANRB.

Grafik 3.5
Target dan Capaian Indeks SPBE Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung



Berdasarkan data target dan capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Badung selama periode tahun 2022 hingga tahun 2025, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target Indeks SPBE Kabupaten Badung ditetapkan sebesar 3,10, namun capaian yang diperoleh sebesar 2,48. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut implementasi SPBE masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek integrasi sistem, penguatan tata kelola SPBE, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital pada perangkat daerah.

Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Badung mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan sebesar 3,20 berhasil dilampaui dengan capaian sebesar 3,66. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan dalam penguatan kebijakan SPBE, pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi SPBE secara lebih terintegrasi.

Pada tahun 2024, tren peningkatan kinerja terus berlanjut. Dengan target sebesar 3,30, Kabupaten Badung mampu mencapai nilai 3,87. Peningkatan ini menunjukkan semakin matangnya implementasi SPBE, khususnya pada aspek tata kelola, manajemen layanan teknologi informasi, serta pengembangan layanan publik digital yang semakin terintegrasi.

Selanjutnya pada tahun 2025, target Indeks SPBE Kabupaten Badung ditetapkan sebesar 3,40, dan capaian yang diperoleh meningkat secara signifikan menjadi 4,44. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Badung telah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital melalui penguatan kebijakan SPBE, integrasi sistem informasi pemerintahan, peningkatan kualitas layanan digital, serta penguatan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

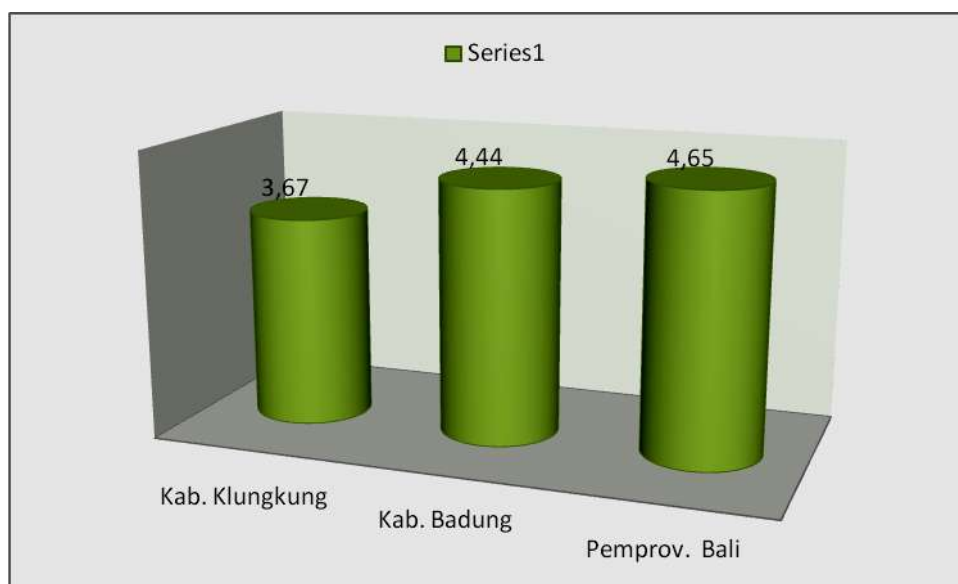
Secara keseluruhan, perkembangan nilai Indeks SPBE Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang sangat positif, di



mana setelah mengalami capaian yang belum memenuhi target pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Badung mampu melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya mampu mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat implementasi transformasi digital pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Grafik 3.6

Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

Berdasarkan grafik diatas, nilai Indeks SPBE Kabupaten Klungkung tercatat sebesar 3,67, sedangkan Provinsi Bali sebagai pembina penyelenggaraan SPBE di tingkat daerah memperoleh nilai 4,65. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian SPBE di wilayah Provinsi Bali secara umum telah berada pada kategori yang baik dengan tingkat kematangan implementasi SPBE yang relatif tinggi. Kabupaten Badung perlu terus meningkatkan kualitas tata kelola SPBE agar mampu mendekati bahkan melampaui capaian pemerintah daerah lain di Provinsi Bali. Perbandingan kinerja ini menjadi salah satu referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten



Badung dalam melakukan evaluasi internal serta merumuskan strategi peningkatan kualitas implementasi SPBE secara berkelanjutan.

Melalui pembelajaran dari praktik baik (best practice) yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah lain maupun oleh Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan Kabupaten Badung dapat terus memperkuat integrasi sistem informasi pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan digital, serta memperkuat tata kelola teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun 2025 berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Dalam penilaian tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memperoleh nilai 94,03 dengan predikat “Informatif”, yang merupakan kategori tertinggi dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi yang terbuka, cepat, dan akurat kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil mengimplementasikan pengelolaan informasi publik secara optimal, baik melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan sistem layanan informasi berbasis digital, maupun peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 3.2
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

Untuk mewujudkan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2025 didukung oleh 8 program, meliputi: Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Kepegawaian, Program Pengelolaan Arsip dan Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 881.339.619.347,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 630.177.413.391,00,- dengan serapan anggaran sebesar 71,50%.

Dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kabupaten Badung masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta masih perlunya peningkatan literasi digital di lingkungan perangkat daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan sistem informasi, integrasi aplikasi, serta pemanfaatan layanan digital pemerintahan secara maksimal.



Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang turut mendorong peningkatan capaian SPBE di Kabupaten Badung, yaitu adanya kerja sama yang baik antar perangkat daerah dalam proses pengumpulan dan penyediaan data dukung yang dibutuhkan dalam evaluasi SPBE. Koordinasi lintas perangkat daerah tersebut telah berjalan dengan baik sehingga proses penyediaan data dan dokumen pendukung dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan penilaian SPBE.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks SPBE dan memperbaiki berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan beberapa langkah strategis perbaikan. Upaya tersebut antara lain :

- melengkapi data dukung yang sebelumnya dinilai kurang tepat atau belum sepenuhnya sesuai dengan indikator penilaian SPBE, sehingga proses evaluasi dapat menggambarkan kondisi implementasi SPBE secara lebih akurat.
- melakukan reviu terhadap dokumen arsitektur SPBE serta peta rencana SPBE daerah guna memastikan keselarasan antara kebijakan, perencanaan, dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan perangkat daerah. Reviu ini bertujuan untuk memperkuat arah pengembangan SPBE secara terintegrasi dan berkelanjutan.
- pelaksanaan audit SPBE, yang bertujuan untuk menilai tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi, keamanan sistem informasi, serta efektivitas pemanfaatan layanan digital pemerintahan. Hasil audit tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam melakukan perbaikan dan penguatan implementasi SPBE pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi SPBE di Kabupaten Badung dapat terus mengalami peningkatan sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan Indeks SPBE di Kabupaten Badung.



Menghadiri FGD Strategi Penguatan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital



Mekanisme pembuatan aplikasi



Pelaksanaan Kegiatan Operasi Monitoring Keamanan Siber . Penanganan Keamanan Siber Web Defacement di Bapenda Kabupaten Badung. melakukan penyampaian anomaly trafik yang terdeteksi pada sensor monitoring BSSN, melakukan verifikasi anomaly yang terdeteksi, melakukan pendataan dan verifikasi aset sistem elektronik milik Bapenda Kabupaten Badung



Sosialisasi Penyusunan dan Uji Konsekuensi DIK dalam Rangka Keterbukan Informasi Publik



Pemasangan perangkat meraki di Objek wisata Taman Beji Samuan , Petang



Test commisioning PTG001 (Perbatasan Bangli dan Catur), PTG002 (Pertigaan Selatang, Petang), PTG003 (berlokasi di Jl. Catur, Jembatan Tukad Bangkung, Petang)



Pergantian perangkat Cisco dari seri lama mx65 ke seri baru mx68 di puskesmas mengwi 2, tumbak bayuh Pemasangan perangkat MX68W di pustu dalung permai

3.2.5 Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengukuran IP ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ASN memiliki kompetensi, kinerja, disiplin, serta kualifikasi yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pengukuran indeks ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan kualitas sumber daya manusia aparatur serta merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen ASN secara lebih terarah.

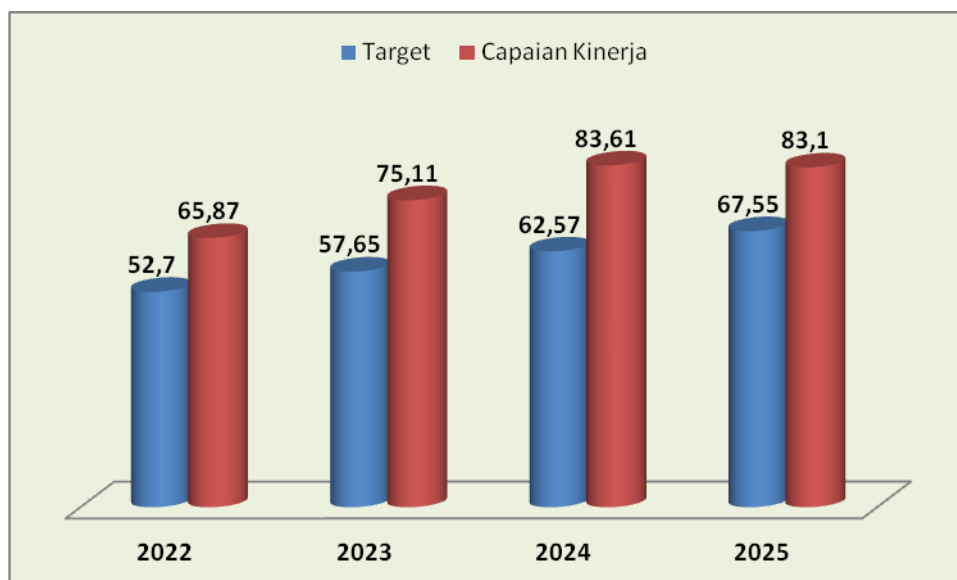
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan bahwa profesionalitas ASN diukur melalui empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Keempat dimensi tersebut menjadi parameter penting dalam menilai kualitas aparatur serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM aparatur di lingkungan instansi pemerintah.



Selain itu, pengukuran IP ASN juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit, dengan menempatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, penguatan profesionalitas ASN menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan nilai IP ASN terus diupayakan melalui pengembangan kompetensi pegawai, peningkatan kinerja berbasis sistem merit, serta penegakan disiplin ASN secara konsisten.

Grafik 3.7
Target dan Capaian IP ASN di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber data : BKPSDM Kabupaten Badung Tahun 2025

Secara umum, capaian IP ASN Kabupaten Badung selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana nilai realisasi setiap tahunnya selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam



meningkatkan profesionalitas aparatur melalui penguatan manajemen ASN, peningkatan kompetensi. Pada tahun 2022, target IP ASN ditetapkan sebesar 52,7, sedangkan realisasi capaian mencapai 65,87. Dengan demikian terdapat selisih positif sebesar 13,17 poin di atas target. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah melampaui ekspektasi yang direncanakan pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2023, target IP ASN meningkat menjadi 57,65, dan realisasi kinerja kembali melampaui target dengan capaian sebesar 75,11. Dengan demikian terdapat selisih sebesar 17,46 poin dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam aspek kualifikasi pendidikan ASN, peningkatan kompetensi melalui pengembangan kapasitas, serta penguatan sistem penilaian kinerja dan disiplin pegawai. Pada tahun 2024, target IP ASN kembali meningkat menjadi 62,57, dengan realisasi capaian sebesar 83,61. Selisih antara target dan capaian mencapai 21,04 poin, yang merupakan selisih tertinggi selama periode pengukuran. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sementara itu pada tahun 2025, target IP ASN ditetapkan sebesar 67,55 dan berhasil direalisasikan sebesar 83,10. Dengan demikian capaian kinerja masih melampaui target sebesar 15,55 poin. Walaupun terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun secara umum nilai IP ASN tetap berada pada kategori tinggi dan menunjukkan konsistensi kinerja aparatur yang baik.

Secara keseluruhan, tren capaian IP ASN Kabupaten Badung selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan profesionalitas ASN melalui penguatan kebijakan pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penerapan prinsip sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Ke depan, upaya



peningkatan nilai IP ASN akan terus dilakukan melalui optimalisasi pengembangan kompetensi ASN, penguatan disiplin dan kinerja pegawai, serta peningkatan kualitas manajemen kepegawaian yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.

Untuk mewujudkan indikator Indeks Profesionalitas ASN didukung oleh 2 program. Program pendukung meliputi : Program Kepegawaian dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.623.970.899,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.199.896.791,00,- dengan serapan anggaran sebesar 74,81%.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Badung adalah tingginya antusiasme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memenuhi indikator pada masing-masing dimensi IP ASN, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung secara aktif berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal maupun kegiatan pengembangan kompetensi seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Tingginya partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai IP ASN secara keseluruhan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengukuran IP ASN, khususnya pada dimensi kinerja. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah belum terintegrasinya penggunaan aplikasi e-Kinerja secara optimal, dimana sebagian perangkat daerah masih menggunakan aplikasi kinerja secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan proses penghitungan nilai pada dimensi kinerja dalam IP ASN masih harus dilakukan secara manual melalui proses rekonsiliasi data, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pemutakhiran data dan kurang efisien dalam proses pengolahan informasi kepegawaian.



Dalam rangka mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kualitas pengukuran IP ASN, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan beberapa langkah perbaikan, sebagai berikut :

- penyediaan link template yang memudahkan ASN dalam mengunggah sertifikat pengembangan kompetensi ke dalam Sistem Informasi ASN (SIASN). Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan kompetensi ASN dapat terdokumentasi dengan baik dan terinput secara valid dalam sistem.
- menyelenggarakan sosialisasi terkait mekanisme penghitungan IP ASN kepada ASN dan pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah, termasuk operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG). Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai dimensi-dimensi yang dinilai dalam IP ASN serta dapat melakukan pemutakhiran data secara tepat dan berkelanjutan, sehingga proses penghitungan indeks profesionalitas ASN dapat dilakukan secara lebih akurat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, dengan adanya dukungan komitmen ASN serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, diharapkan pengelolaan data dan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung dapat semakin optimal, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Profesionalitas ASN di Kabupaten Badung.



Evaluasi Pelaksanaan Diklat Tahun 2025



3.2.6 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pengukuran IKM



dilakukan melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan guna memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus sebagai dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 9 unsur pelayanan, yaitu:

- 1) Persyaratan,
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur,
- 3) Waktu penyelesaian,
- 4) Biaya/tarif,
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan,
- 6) Kompetensi pelaksana,
- 7) Perilaku pelaksana,
- 8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, serta
- 9) Sarana dan prasarana.

Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2025 menjadi salah satu indikator penting yang menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat. Hasil pengukuran IKM tidak hanya digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pelayanan, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna



mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.2
Nilai IKM Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Publik
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	OPP	IKM	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah	88.52	Sangat Baik
2	Sekretariat DPRD	90.48	Sangat Baik
3	Inspektorat	92.09	Sangat Baik
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.72	Sangat Baik
5	Badan Pendapatan Daerah	78.02	Baik
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.57	Sangat Baik
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84.99	Baik
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah	85.05	Baik
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.18	Sangat Baik
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	86.56	Baik
11	Dinas Pariwisata	82.15	Baik
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.53	Sangat Baik
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.70	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	97.73	Sangat Baik
15	Dinas Kebudayaan	95.21	Sangat Baik
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.36	Sangat Baik
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	97.72	Sangat Baik
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	91.74	Sangat Baik
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	82.61	Baik
20	Dinas Pertanian dan Pangan	91.93	Sangat Baik
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	89.47	Sangat Baik



NO	OPP	IKM	KATEGORI
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.51	Baik
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.68	Sangat Baik
24	Dinas Kesehatan	83.65	Baik
25	Dinas Sosial	83.50	Baik
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.07	Sangat Baik
27	Dinas Perikanan	95.38	Sangat Baik
28	Dinas Perhubungan	91.36	Sangat Baik
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.50	Sangat Baik
30	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	92.70	Sangat Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	87.65	Baik
32	Rumah Sakit Daerah Mangusada	93.56	Sangat Baik
33	Kecamatan Petang	87.16	Baik
34	Kecamatan Abiansemal	88.93	Sangat Baik
35	Kecamatan Mengwi	90.04	Sangat Baik
36	Kecamatan Kuta Utara	94.95	Sangat Baik
37	Kecamatan Kuta	93.53	Sangat Baik
38	Kecamatan Kuta Selatan	92.90	Sangat Baik
39	Puskesmas Petang I	95.80	Sangat Baik
40	Puskesmas Petang II	91.55	Sangat Baik
41	Puskesmas Abiansemal I	88.55	Sangat Baik
42	Puskesmas Abiansemal II	90.37	Sangat Baik
43	Puskesmas Abiansemal III	87.36	Baik
44	Puskesmas Abiansemal IV	89.70	Sangat Baik
45	Puskesmas Mengwi I	86.22	Baik
46	Puskesmas Mengwi II	87.20	Baik
47	Puskesmas Mengwi III	87.51	Baik
48	Puskesmas Kuta Utara	92.12	Sangat Baik
49	Puskesmas Kuta II	88.90	Sangat Baik
50	Puskesmas Kuta II	90.20	Sangat Baik
51	Puskesmas Kuta Selatan	86.13	Baik
IKM Kabupaten Badung		90.09	Sangat Baik

Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Badung 2025

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 terhadap unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Badung, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Badung sebesar 90,09 dengan kategori “Sangat Baik”. Dari 51 unit pelayanan publik yang disurvei, sebagian besar perangkat daerah memperoleh nilai pada kategori Sangat Baik, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (97,73), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (97,72), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (97,50), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (96,36). Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan.

Selain itu, beberapa unit layanan strategis seperti Rumah Sakit Daerah Mangusada (93,56), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (95,07), serta sejumlah kecamatan dan puskesmas juga memperoleh nilai pada kategori Sangat Baik, yang menunjukkan bahwa sektor pelayanan dasar kepada masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Secara keseluruhan, capaian IKM Kabupaten Badung Tahun 2025 yang berada pada kategori “Sangat Baik” menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Capaian Kinerja Kabupaten Badung terkait Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022-2025 tergambar pada grafik berikut.

Grafik 3.8
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025



Berdasarkan data capaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung selama periode 2022–2025, terlihat bahwa nilai IKM menunjukkan tren yang relatif baik dan konsisten berada pada kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2022, capaian IKM tercatat sebesar 84,14 dengan target 84,50. Pada tahun 2023, nilai IKM meningkat signifikan menjadi 89,52, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85,50. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IKM kembali meningkat menjadi 90,78, jauh melampaui target sebesar 86,50. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas layanan, termasuk penguatan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah daerah.

Pada tahun 2025, nilai IKM Kabupaten Badung tercatat sebesar 90,09, masih berada pada kategori sangat baik dan tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,50. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, secara umum kinerja pelayanan publik Kabupaten Badung masih menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi dan stabil.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional Indeks Kepuasan Masyarakat yang umumnya berada pada kisaran sekitar 88–89, capaian Kabupaten Badung yang berada pada angka di atas 90 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung berada di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan profesionalitas aparatur, serta penerapan sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan indikator Indeks kepuasan masyarakat didukung oleh 34 program sebagaimana pada Lampiran Program Prioritas. Total pagu anggaran dari 34 program yang dialokasikan tahun 2025 sebesar Rp.



580.367.978.982,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 428.891.493.026,00,- dengan serapan anggaran sebesar 73,90%.

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan survei. Salah satu faktor penghambat yang dihadapi adalah lokasi pelaksanaan survei yang tersebar di berbagai unit pelayanan, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), sementara jumlah tenaga surveyor yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan petugas survei harus bertugas di beberapa lokasi sekaligus sehingga memerlukan dukungan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan survei.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang turut memperlancar pelaksanaan survei, yaitu adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD yang menugaskan petugas pendamping untuk membantu proses pengumpulan data survei. Keterlibatan petugas pendamping tersebut memungkinkan pelaksanaan survei berjalan secara lebih kolaboratif, efektif, dan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Pada tahun 2025, proses survei tidak hanya mengandalkan tenaga surveyor, tetapi juga memanfaatkan alat bantu sederhana berupa QR Code yang memungkinkan responden mengisi survei secara mandiri melalui perangkat digital.

Ke depan, pelaksanaan survei akan terus ditingkatkan melalui mekanisme pelaksanaan survei secara mandiri oleh masing-masing OPD dan UPTD penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, pengumpulan data akan didukung dengan pemanfaatan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB sehingga proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data survei dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan survei serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif



mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat.



Survei di Kecamatan Kuta Selatan



Survei di Puskesmas Mengwi 2



Survei di Puskesmas Abiansemal III



Survei di Puskesmas Mengwi I



Selain pelaksanaan survey, Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Badung, upaya yang dilakukan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh, baik dari aspek proses pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Berikut beberapa upaya strategis yang dilakukan berkelanjutan :

1. Peningkatan Standar dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur
3. Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital
4. Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
6. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala
7. Penguatan Budaya Pelayanan Prima di Lingkungan Perangkat Daerah
8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Badung sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah dapat terus meningkat dan mempertahankan kategori “Sangat Baik” pada Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pelayanan pada unit pelayanan di Kabupaten Badung.



Pemberian pelayanan di Kecamatan Kuta Selatan



Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Lounge Mall Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai standar pelayanan.

3.2.7 Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada

Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Indikator ini menggambarkan sejauh mana Perda dan Perkada yang berlaku dapat ditegakkan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, penindakan pelanggaran, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

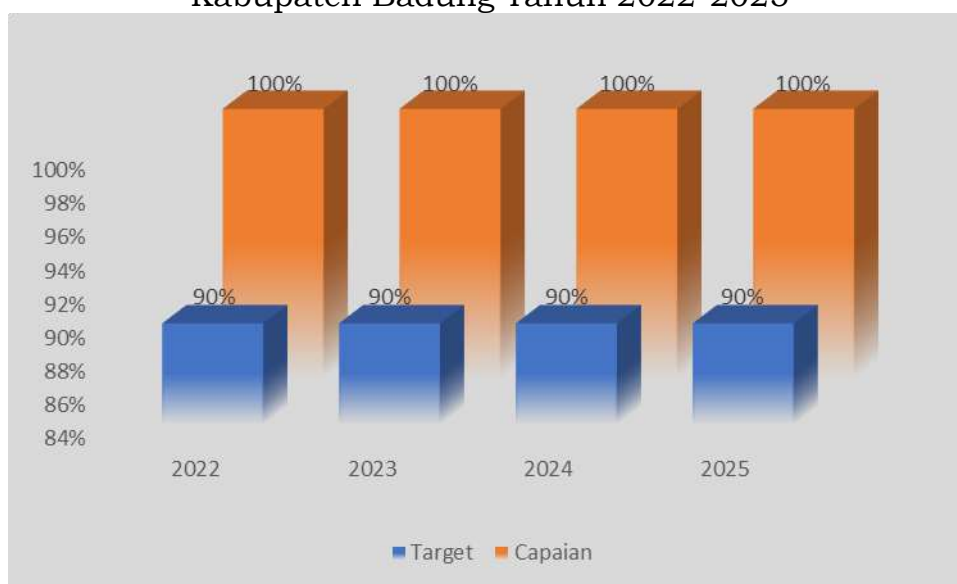
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, penegakan Perda dan Perkada merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan ketertiban umum, kepatuhan hukum masyarakat, serta kepastian dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, capaian indikator ini mencerminkan tingkat efektivitas implementasi regulasi daerah sekaligus menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap



kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Secara regulatif, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada berpedoman pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pelaksanaan fungsi tersebut secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan mandat kepada Satpol PP untuk melakukan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Grafik 3.9
Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Satpol PP Kab. Badung Tahun 2025



Berdasarkan grafik capaian Indikator Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, dapat disampaikan bahwa kinerja penegakan regulasi daerah menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan target kinerja sebesar 90% setiap tahunnya. Namun demikian, realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu 100% pada setiap tahun pengukuran. Dengan demikian, capaian indikator tersebut melampaui target sebesar 10% setiap tahunnya, yang mencerminkan tingkat efektivitas yang sangat baik dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Capaian kinerja yang konsisten berada pada angka maksimal tersebut menunjukkan bahwa upaya pengawasan, penertiban, serta penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Badung telah dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah terkait, khususnya melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pelaksana penegakan peraturan daerah. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban umum dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.

Dari sisi tren kinerja, capaian indikator yang stabil pada angka 100% selama empat tahun berturut-turut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan regulasi daerah di Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa strategi pengawasan, pembinaan, dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mampu menjaga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perda dan Perkada yang berlaku.



Tabel 3.3
Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS POTENSI PELANGGARAN								JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Petang			1				5		6
2	Abiansemal	12		51				122		185
3	Mengwi	94	9	436	1			669		1.209
4	Kuta Utara	136		320	2			594		1.052
5	Kuta				12			12		24
6	Kuta Selatan	3	1			1		1		6
	KABUPATEN									2.482
NO	KECAMATAN	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH								JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Petang			1				5		6
2	Abiansemal	12		51				122		185
3	Mengwi	94	9	506	1			669		1.279
4	Kuta Utara	136		320	2			594		1.052
5	Kuta				12			12		24
6	Kuta Selatan	3	1			1		1		6
	KABUPATEN									2.552

Keterangan:

1. IMB + Usaha tanpa ijin
2. Jalur Hijau
3. Reklame
4. Gepeng dan orang terlantar
5. Usaha Pariwisata
6. Pencemaran Lingkungan
7. Pelanggaran Trotoar
8. Pelanggaran Prokes

Berdasarkan Tabel 3.3 Distribusi Pencegahan Perda dan Perkada di Kabupaten Badung Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah dilaksanakan di enam kecamatan dengan jumlah potensi pelanggaran yang teridentifikasi sebanyak 2.482 kasus. Dari jumlah tersebut, melalui berbagai upaya pengawasan, pembinaan, dan tindakan preventif yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, sebanyak 2.552 potensi pelanggaran berhasil dicegah.



Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Mengwi merupakan wilayah dengan jumlah potensi pelanggaran tertinggi, yaitu 1.209 kasus, diikuti oleh Kecamatan Kuta Utara sebanyak 1.052 kasus, dan Kecamatan Abiansemal sebanyak 185 kasus. Sementara itu, potensi pelanggaran relatif lebih kecil ditemukan di Kecamatan Kuta (24 kasus), Petang (6 kasus), dan Kuta Selatan (6 kasus). Tingginya potensi pelanggaran di wilayah Mengwi dan Kuta Utara dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang berkembang pesat sebagai kawasan permukiman, perdagangan, dan pariwisata, sehingga memiliki tingkat aktivitas masyarakat dan usaha yang lebih tinggi.

Berdasarkan jenis pelanggaran, potensi pelanggaran yang paling dominan berasal dari pelanggaran reklame, jalur hijau, serta aktivitas usaha tanpa izin, diikuti oleh pelanggaran terkait penggunaan trotoar dan aktivitas usaha pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, kegiatan usaha, serta kepatuhan terhadap perizinan masih menjadi fokus utama dalam penegakan regulasi daerah.

Secara umum, bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif, ditandai dengan jumlah pelanggaran yang berhasil dicegah lebih besar dibandingkan potensi pelanggaran yang teridentifikasi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan, sosialisasi regulasi, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada serta mendukung terciptanya ketertiban umum di wilayah Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada didukung oleh 7 program. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh masing-masing dari 6 jumlah Kecamatan di kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 6.592.596.255,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.168.372.992,- sehingga serapan anggaran sebesar 63,23%.



Keberhasilan capaian indikator penegakan Perda dan Perkada tidak terlepas dari berbagai kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan. Dari sisi faktor penghambat, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan regulasi daerah yaitu :

1. Keterbatasan jumlah personil yang tersedia sehingga mempengaruhi optimalisasi pengawasan dan penindakan di seluruh wilayah Kabupaten Badung yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi
2. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti kendaraan operasional dan peralatan pendukung penertiban, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan patroli dan penegakan hukum di lapangan
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga menjadi salah satu kendala, yang menyebabkan masih ditemukannya potensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada juga didukung oleh beberapa faktor pendukung yang cukup kuat. Keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Badung sebagai dasar hukum memberikan landasan yang jelas dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah. Selain itu, adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Satpol PP Provinsi Bali dengan Satpol PP Kabupaten Badung turut memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam menangani permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sehingga proses penyelesaian permasalahan di lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah terkait telah melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain dengan mengajukan permohonan penambahan sarana dan prasarana operasional guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, kegiatan patroli rutin yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait Perda Nomor 7 Tahun 2016



tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga terus dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, berbagai faktor pendukung serta upaya perbaikan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga ketertiban umum, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan akuntabel. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung indikator Persentase Penegakan Perda da Perkada di Kabupaten Badung.



Kegiatan Penegakan Perda



Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Kegiatan Satpol PP Pariwisata



3.2.8 Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM

Indikator Capaian Atas Kepedulian Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, indikator ini umumnya diukur melalui capaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Landasan regulasi dari indikator ini antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Selain itu, pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM juga berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang mengatur indikator penilaian meliputi pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, serta lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2025 perihal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2025, disampaikan bahwa pelaksanaan penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, sehingga kegiatan penilaian yang sebelumnya menjadi dasar pengukuran indikator kepedulian HAM di daerah untuk sementara ditiadakan pada tahun 2025.

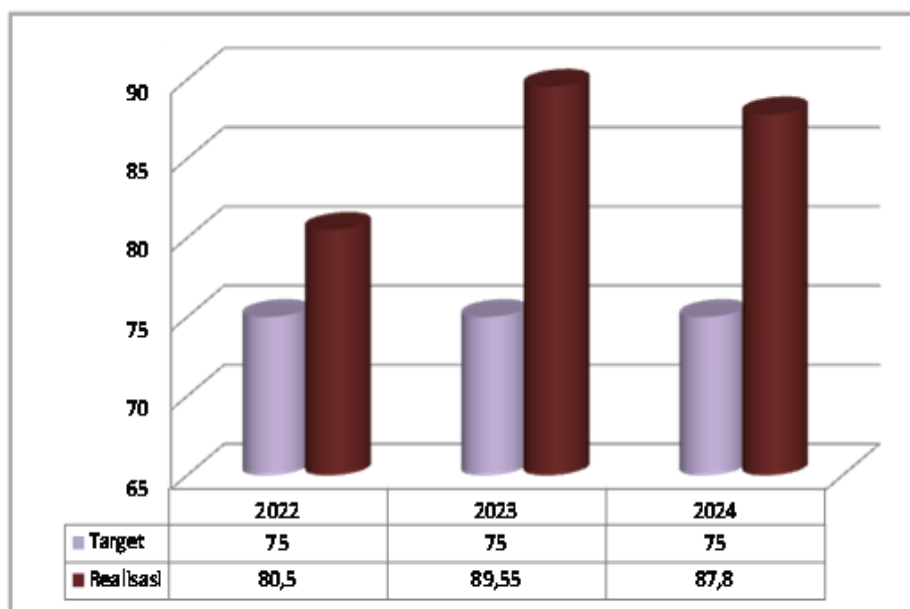
Sehubungan dengan kebijakan tersebut, indikator Capaian Atas Kepedulian HAM pada Tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung tidak memperoleh hasil penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dari



pemerintah pusat pada tahun pelaporan. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen tersebut tetap dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah yang mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, penyediaan layanan kependudukan, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun pengukuran indikator secara nasional tidak dilaksanakan pada tahun 2025, upaya pemajuan HAM tetap menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung.

Grafik 3.10
Target dan Capaian Indikator Capaian Atas Kepedulian HAM di Kabupaten Badung Tahun 2022-2024



Sumber data :Dokumen LKjIP Kab. Badung tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan gambaran bahwa Indikator Kepedulian HAM pernah memiliki capaian selama 3 tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada grafik Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Atas Kepedulian HAM



Tahun 2022–2024, dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam pemenuhan indikator kepedulian HAM menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja selama tiga tahun tersebut ditetapkan sebesar 75, sementara realisasi yang dicapai menunjukkan tren yang cukup baik.

Pada tahun 2022, realisasi capaian mencapai 80,5, atau melampaui target sebesar 5,5 poin. Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja meningkat signifikan dengan realisasi mencapai 89,55, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tetap berada pada angka 87,8, yang masih jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah telah terlaksana dengan baik. Kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, meskipun pada tahun 2025 penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, rekam jejak capaian pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kinerja yang baik dan konsisten dalam indikator kepedulian HAM.

Upaya untuk mewujudkan Indikator pemenuhan HAM didukung oleh 8 program. Program pendukung meliputi: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Hubungan Industrial. Pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2025 sebesar Rp. 12.683.431.190,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.292.170.555,- sehingga serapan anggaran sebesar 81,15%.



Capaian indikator Kepedulian HAM Kabupaten Badung pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana seluruh realisasi capaian secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun pada tahun 2025 penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat, rekam jejak capaian pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepedulian HAM di Kabupaten Badung tetap berada pada kategori baik dan terjaga secara berkelanjutan.

3.2.9 Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya

Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas, pelestarian, dan penguatan seni serta budaya daerah sebagai bagian dari upaya pembangunan kebudayaan. Indikator ini mencerminkan peningkatan jumlah kegiatan seni budaya, komunitas atau sanggar seni, pelaku seni, serta penyelenggaraan event budaya yang berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai tradisi dan identitas budaya daerah. Bagi Kabupaten Badung yang memiliki kekayaan budaya berbasis adat dan tradisi Bali, indikator ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya sekaligus mendukung penguatan pariwisata berbasis budaya.

Pengukuran indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi ruang ekspresi seni budaya masyarakat melalui berbagai program seperti festival budaya, pembinaan sanggar seni, pelestarian adat dan tradisi, serta pengembangan kreativitas seni masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan seni dan budaya tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian nilai luhur budaya Bali, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif dan daya tarik pariwisata daerah.



Secara regulatif, pengembangan dan pelestarian seni budaya didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan urusan kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang menempatkan pembangunan kebudayaan sebagai bagian dari penguatan karakter bangsa dan ketahanan budaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, yang menegaskan pentingnya pelestarian adat, tradisi, seni, dan kearifan lokal Bali sebagai fondasi pembangunan daerah.

Dengan dasar regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong peningkatan aktivitas seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berlandaskan nilai budaya Bali serta mendukung terwujudnya masyarakat yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Indikator ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah dinamika perkembangan zaman.



Tabel 3.4
Jumlah Desa Adat, Cagar Budaya, dan Subak
Di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA ADAT	JUMLAH CAGAR BUDAYA	JUMLAH SUBAK
1	Petang	27	3	43 (Subak yeh dan Subak abian)
2	Abiansemal	35		48 (Subak yeh dan Subak abian)
3	Mengwi	39	3	70 (Subak yeh dan Subak abian)
4	Kuta Utara	8		19 (Subak yeh)
5	Kuta	6		3 (Subak yeh)
6	Kuta Selatan	9	3	27 (Subak abian)
	KABUPATEN	124	9	210

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025

Potensi seni dan budaya di Kabupaten Badung didukung oleh keberadaan desa adat, cagar budaya, dan subak yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 124 desa adat, 9 cagar budaya, dan 210 subak yang menjadi bagian penting dari sistem sosial, budaya, dan tradisi masyarakat Bali.

Kecamatan Mengwi tercatat memiliki jumlah desa adat terbanyak yaitu 39 desa adat, serta didukung oleh 3 cagar budaya dan 70 subak, yang menunjukkan kuatnya basis budaya dan tradisi masyarakat. Kecamatan Abiansemal juga memiliki potensi budaya yang besar dengan 35 desa adat dan 48 subak, sedangkan Kecamatan Petang memiliki 27 desa adat, 3 cagar budaya, dan 43 subak yang menunjukkan kekayaan tradisi berbasis masyarakat adat dan sistem pertanian tradisional. Sementara itu, wilayah Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan meskipun memiliki jumlah desa adat yang relatif lebih sedikit, tetap didukung oleh keberadaan subak dan cagar budaya yang memperkuat identitas budaya lokal di tengah perkembangan kawasan pariwisata.



Keberadaan desa adat, cagar budaya, dan subak tersebut merupakan pilar utama dalam pelestarian seni dan budaya di Kabupaten Badung, karena aktivitas seni, upacara adat, tradisi, serta ekspresi budaya masyarakat umumnya tumbuh dan berkembang di lingkungan desa adat serta terikat dengan sistem nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, subak sebagai warisan budaya dunia juga tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional, tetapi juga memiliki nilai budaya, spiritual, dan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Bali.

Besarnya jumlah desa adat, cagar budaya, dan subak di Kabupaten Badung menjadi modal sosial dan budaya yang sangat penting dalam mendukung peningkatan indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya. Infrastruktur sosial budaya tersebut memungkinkan terselenggaranya berbagai kegiatan seni tradisional, festival budaya, upacara adat, serta pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja pembangunan kebudayaan di Kabupaten Badung.

Tabel 3.5
Jumlah Sekaa Tari, Tabuh dan Kidung di Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
		TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN
1	PETANG	3	3	0	3	3	0
2	ABIANSEMAL	8	23	5	8	23	5
3	MENGWI	17	49	19	17	49	19
4	KUTA UTARA	8	4	4	8	4	4
5	KUTA	2	6	0	2	6	0
6	KUTA SELATAN	12	20	3	12	20	3
	KABUPATEN	50	105	31	50	105	31

Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025



Keberadaan sekaa (kelompok seni tradisional) di Kabupaten Badung menunjukkan kondisi yang sangat mendukung perkembangan seni dan budaya daerah. Secara keseluruhan terdapat 186 sekaa seni, yang terdiri dari 50 sekaa tari, 105 sekaa tabuh, dan 31 sekaa kidung/kekawin, dan seluruhnya tercatat aktif dalam melaksanakan kegiatan seni budaya di masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Mengwi memiliki jumlah sekaa terbanyak dengan 17 sekaa tari, 49 sekaa tabuh, dan 19 sekaa kidung/kekawin, yang menunjukkan tingginya aktivitas dan pelestarian seni tradisional di wilayah tersebut. Selanjutnya Kecamatan Abiansemal juga memiliki potensi seni yang cukup besar dengan 8 sekaa tari, 23 sekaa tabuh, dan 5 sekaa kidung/kekawin, sedangkan Kecamatan Kuta Selatan memiliki 12 sekaa tari, 20 sekaa tabuh, dan 3 sekaa kidung/kekawin yang menunjukkan dinamika aktivitas seni budaya yang cukup aktif.

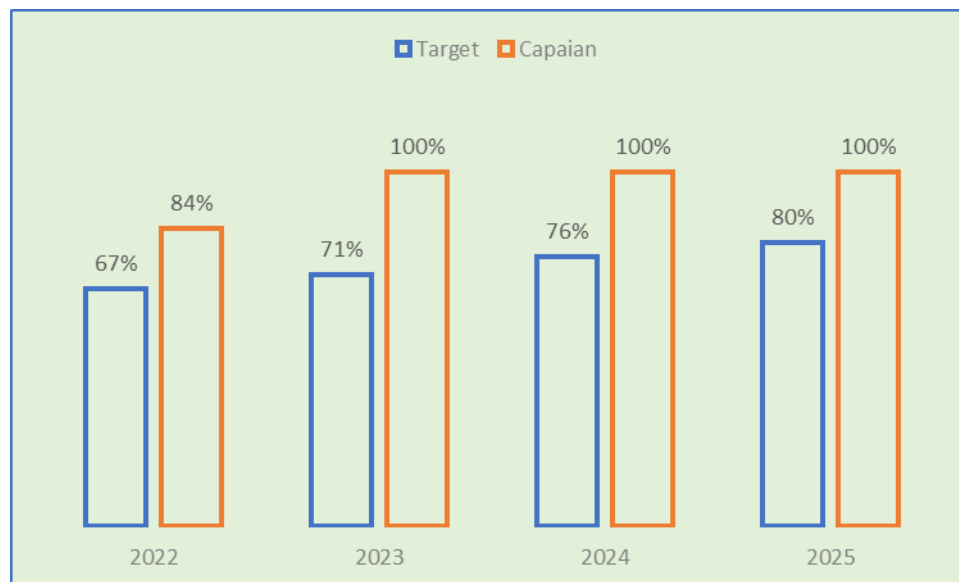
Di sisi lain, kecamatan Petang, Kuta Utara, dan Kuta juga tetap menunjukkan keberadaan kelompok seni yang aktif, meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Namun demikian, keberadaan sekaa-sekaa tersebut tetap berperan penting dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan adat, upacara keagamaan, serta event seni budaya di masyarakat.

Keberadaan dan keaktifan sekaa seni di Kabupaten Badung merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya, karena mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni tradisional serta kuatnya keberlanjutan aktivitas seni budaya di tingkat komunitas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Badung berjalan secara aktif dan berkelanjutan.



Grafik 3.11

Target dan Realisasi Indikator Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya Tahun 2022-2025



Sumber data : Dinas Kebudayaan Kab. Badung Tahun 2025

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendorong pertumbuhan seni dan budaya menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, target indikator ditetapkan sebesar 67%, sementara realisasinya mencapai 84%, sehingga terjadi kelebihan capaian sebesar 17 poin persentase dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pembinaan, pelestarian, dan pengembangan seni budaya yang dilaksanakan mampu mendorong peningkatan aktivitas seni dan budaya di masyarakat.

Pada tahun 2023, target indikator meningkat menjadi 71%, dan realisasi kinerja berhasil mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan semakin optimalnya pelaksanaan program pengembangan seni dan budaya, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, pelaku seni, serta terselenggaranya berbagai kegiatan seni budaya yang mendukung pelestarian budaya lokal.

Selanjutnya pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 76% dan realisasinya tetap mampu mencapai 100%. Konsistensi capaian maksimal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan



pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan seni dan budaya yang sangat baik.

Pada tahun 2025, target indikator kembali dinaikkan menjadi 80%, dan realisasinya kembali mencapai 100%. Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah melalui berbagai program seperti festival budaya, pembinaan sanggar seni, pelestarian tradisi lokal, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya Bali.

Secara keseluruhan, capaian indikator selama periode 2022–2025 selalu berada di atas target yang ditetapkan, bahkan sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 capaian telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengembangan seni dan budaya berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan ini juga mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat serta kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan budaya sebagai bagian penting dari identitas daerah dan penopang sektor pariwisata berbasis budaya di Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 11 program. Program pendukung meliputi: Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp 673.891.522.173,- dengan realisasi sebesar Rp 537.323.862.634,- sehingga serapan anggaran sebesar 79,73%.

Dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang seni dan budaya di Kabupaten Badung, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung. Identifikasi faktor-faktor tersebut penting sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kebudayaan ke depan.



a. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang berpotensi menjadi kendala dalam pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Badung antara lain:

- Keterbatasan SDM Teknis

Beban kerja yang tinggi dalam pelaksanaan program kebudayaan tidak selalu sebanding dengan jumlah personel yang tersedia. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, pendampingan, serta pengembangan seni dan budaya di masyarakat.

- Administrasi dan Birokrasi

Proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan program yang cukup kompleks berpotensi memperlambat pelaksanaan kegiatan kebudayaan, terutama yang membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah maupun dengan lembaga adat dan komunitas seni.

- Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi

Perkembangan globalisasi dan modernisasi membawa tantangan dalam menjaga nilai-nilai sakral budaya di tengah meningkatnya komersialisasi pariwisata. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan agar pelestarian budaya tetap berjalan tanpa mengurangi nilai autentisitasnya.

- Partisipasi Generasi Muda yang Fluktuatif

Tidak semua generasi muda memiliki minat yang konsisten untuk terlibat dalam kegiatan seni dan budaya tradisional. Kondisi ini menjadi tantangan dalam proses regenerasi seniman serta pelaku budaya di masa mendatang.

- Dampak Kondisi Eksternal

Faktor eksternal seperti pandemi, bencana, maupun penurunan sektor pariwisata dapat mempengaruhi kemampuan pendanaan serta intensitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan.

b. Faktor Pendukung

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor yang secara signifikan mendukung keberhasilan pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Badung, antara lain:



- **Komitmen Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pelestarian budaya Bali melalui berbagai kebijakan, program, serta dukungan anggaran yang memadai. Budaya diposisikan sebagai identitas daerah sekaligus sebagai daya dukung utama sektor pariwisata.

- **Ketersediaan Anggaran**

Pendapatan daerah yang relatif tinggi, khususnya dari sektor pariwisata, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan seperti festival budaya, pembinaan seniman, serta pelestarian adat dan tradisi.

- **Kekayaan Budaya Lokal**

Kabupaten Badung memiliki kekayaan budaya yang sangat kuat, seperti tradisi, seni, adat istiadat, serta keberadaan desa adat yang masih aktif menjalankan fungsi sosial budaya. Hal ini menjadi modal utama dalam pengembangan program kebudayaan.

- **Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Tersedianya aparatur yang memahami nilai-nilai kebudayaan Bali serta dukungan tokoh adat, seniman, dan budayawan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program kebudayaan. Kolaborasi dengan desa adat dan sanggar seni juga memperkuat implementasi kegiatan di masyarakat.

- **Dukungan Masyarakat**

Kesadaran masyarakat Kabupaten Badung terhadap pentingnya pelestarian budaya relatif tinggi. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan adat, upacara keagamaan, serta aktivitas seni dan budaya di tingkat komunitas.

c. **Langkah Strategis**

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memperkuat pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah. Upaya yang dilakukan yaitu :



- Penyelenggaraan festival dan kegiatan budaya secara berkelanjutan. Kegiatan seperti Utsawa Dharma Gita dilaksanakan secara rutin sebagai sarana pelestarian seni dan sastra agama Hindu Bali yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Badung
- Pelaksanaan Festival Bulan Bahasa Bali juga menjadi wadah untuk memperkenalkan serta menjaga keberlangsungan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, khususnya di kalangan generasi muda melalui berbagai kegiatan seperti lomba, seminar, dan pameran budaya.
- Pemberdayaan generasi muda dan komunitas seni. Dinas Kebudayaan secara aktif melakukan pembinaan terhadap sekaa teruna/yowana, sanggar seni, serta komunitas lokal melalui pemberian bantuan dana kreativitas dan bimbingan teknis, termasuk dalam pembuatan ogoh-ogoh sebagai bagian dari ekspresi seni masyarakat.
- Pembinaan terhadap kelompok kesenian seperti baleganjur juga terus dilakukan melalui monitoring dan dukungan langsung agar komunitas seni lokal dapat berkembang dan menjadi duta budaya daerah.
- Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya, salah satunya melalui konservasi lontar atau naskah kuno. Program ini bertujuan untuk memulihkan, merawat, serta mendigitalisasi naskah-naskah bersejarah sehingga dapat tetap terjaga keberadaannya dan dapat diakses oleh generasi mendatang.
- Penguatan desa adat dan struktur budaya lokal melalui pengembangan wadah budaya di tingkat komunitas, seperti program Banjar Menari yang menjadikan banjar sebagai pusat aktivitas seni dan kreativitas masyarakat. Program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pelestarian budaya sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat pelestarian seni dan budaya melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, komunitas seni, serta generasi muda, sehingga mampu mendukung



peningkatan kinerja pembangunan kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung indicator Seni dan Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2025.

1. Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya Tahun 2025



Registrasi Nasional Cagar Budaya Kab Badung Pura Puseh Desa Adat Kiadan Pelaga Petang



Registrasi Nasional Cagar Budaya Kabupaten Badung Pura Desa Adat Kapal, Mengwi

2. Kegiatan Pelatihan Metembang Bali



3. Pembinaan Harmonisasi dan Verifikasi Awig Awig Desa Adat



4. Kreatifitas Sekaa Teruna/Yowana (Lomba Ogoh-ogoh)





3.2.10 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif melalui tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita. IPM menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan daerah karena menggambarkan sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Pengukuran IPM di Indonesia mengacu pada metodologi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi penyedia statistik nasional. Data IPM dihitung setiap tahun dan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan serta perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja pembangunan secara terukur dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembangunan manusia juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Indikator IPM digunakan sebagai salah satu tolok ukur utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui penguatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menjaga tren



peningkatan IPM secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 3.6
Rincian Pendukung Capaian Kinerja IPM Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	UHH	HLS	RLS	PENGELUARAN	IPM
1	2022	75.52	14.03	10.64	17,445	82.13
2	2023	75.73	14.22	10.90	19,915	83.00
3	2024	75.90	14.23	11.14	18,556	83.73
4	2025	76.18	14.26	11.26	19,004	84.27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Badung
Tahun 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten pada seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu:

1. Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. pengeluaran riil per kapita.

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Badung tercatat sebesar 82,13 dengan komponen penyusun yaitu UHH 75,52 tahun, HLS 14,03 tahun, RLS 10,64 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 17,445. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung telah berada pada kategori sangat tinggi, yang mencerminkan cukup baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

Pada tahun 2023, IPM mengalami sedikit penyesuaian menjadi 83,00. Peningkatan ini didukung oleh membaiknya indikator UHH menjadi 75,73 tahun, HLS menjadi 14,22 tahun, dan RLS meningkat menjadi 10,90 tahun, serta pengeluaran per kapita meningkat menjadi 19,915. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang

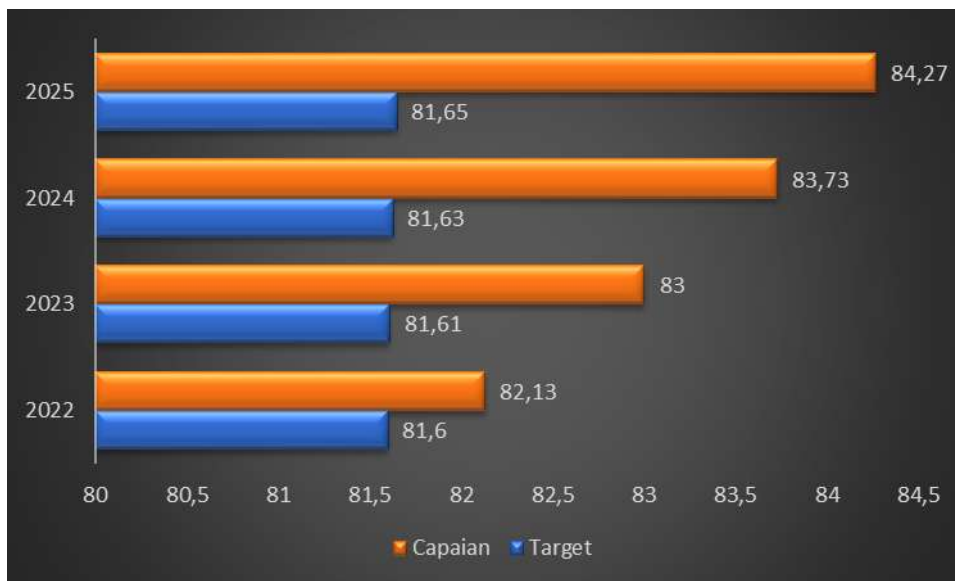


dipengaruhi oleh membaiknya akses pendidikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IPM meningkat cukup signifikan menjadi 83,73. Peningkatan ini didukung oleh UHH sebesar 75,90 tahun, HLS 14,23 tahun, serta RLS meningkat menjadi 11,14 tahun, yang mengindikasikan semakin baiknya kualitas pendidikan masyarakat. Meskipun pengeluaran per kapita tercatat sebesar 18,556, peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan tetap memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Badung kembali mengalami peningkatan menjadi 84,27, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu UHH meningkat menjadi 76,18 tahun, HLS menjadi 14,26 tahun, RLS menjadi 11,26 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 19,004. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

Grafik 3.12
Target dan Capaian IPM di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung
Tahun 2025



Berdasarkan data pada tabel komponen penyusun IPM dan grafik perbandingan target dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa nilai IPM Kabupaten Badung menunjukkan tren peningkatan yang konsisten serta selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, target IPM ditetapkan sebesar 81,60 dengan capaian 82,13. Pencapaian tersebut didukung oleh kondisi komponen pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 75,52 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,03 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,64 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 17,445.

Pada tahun 2023, capaian IPM meningkat menjadi 83,00 dengan target 81,61. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya indikator penyusun IPM seperti UHH yang meningkat menjadi 75,73 tahun, HLS 14,22 tahun, RLS 10,90 tahun, serta pengeluaran per kapita yang meningkat menjadi 19,915, yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2024, capaian IPM kembali meningkat menjadi 83,73, lebih tinggi dari target 81,63. Hal ini didukung oleh peningkatan pada dimensi kesehatan dan pendidikan, yaitu UHH 75,90 tahun, HLS 14,23 tahun, dan RLS 11,14 tahun, yang menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

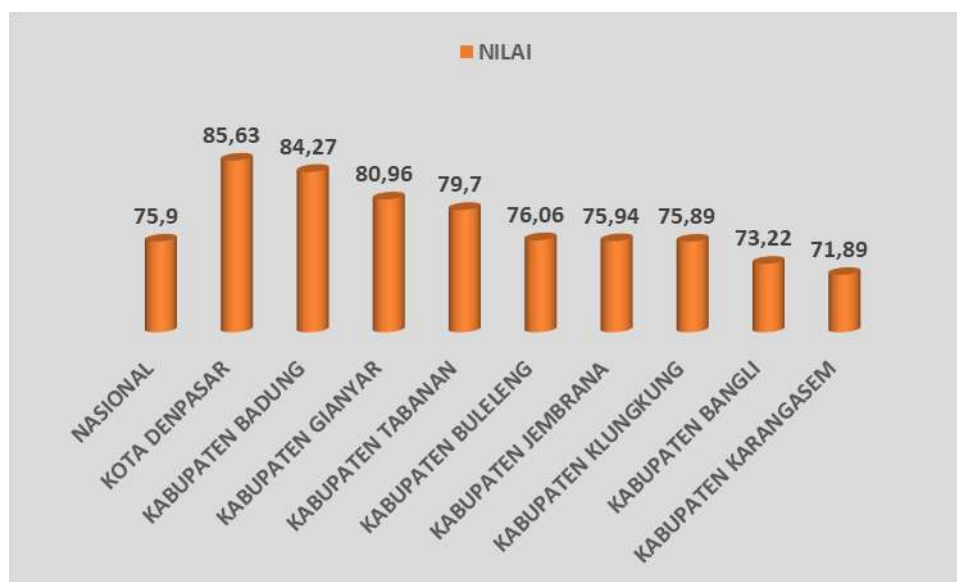
Pada tahun 2025, capaian IPM Kabupaten Badung mencapai 84,27, melampaui target 81,65. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu UHH 76,18 tahun, HLS 14,26 tahun, RLS 11,26 tahun, serta pengeluaran per kapita sebesar 19,004.

Secara keseluruhan, data pada tabel dan grafik menunjukkan keterkaitan yang kuat antara peningkatan komponen penyusun IPM dengan kenaikan nilai IPM Kabupaten Badung dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat telah berjalan secara efektif sehingga mampu mendorong capaian IPM yang terus meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.



Grafik 3.13

Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung Tahun 2025

Berdasarkan data pada grafik perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Bali, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berada pada kelompok daerah dengan tingkat pembangunan manusia sangat tinggi.

Nilai IPM Kabupaten Badung tercatat sebesar 84,27, yang menempatkan Kabupaten Badung pada peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bali, setelah Kota Denpasar yang mencapai 85,63. Capaian tersebut juga jauh berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 75,9, sehingga menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Badung relatif lebih maju dibandingkan rata-rata nasional.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali, nilai IPM Kabupaten Badung juga lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Gianyar (80,96), Kabupaten Tabanan (79,7), Kabupaten Buleleng (76,06), Kabupaten Jembrana (75,94), Kabupaten Klungkung (75,89), Kabupaten Bangli (73,22), dan Kabupaten Karangasem (71,89). Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Kabupaten



Badung berkembang lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya di Provinsi Bali.

Tabel 3.7
Distribusi Sekolah dan Siswa Per Kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH			TOTAL	JUMLAH SISWA			TOTAL
		TK	SD	SMP		TK	SD	SMP	
1	PETANG	13	27	4	44	583	2,215	1,167	3,965
2	ABIANSEMAL	37	65	6	108	1,966	8,605	4,589	15,160
3	MENGWI	45	73	12	130	2,714	12,439	6,238	21,391
4	KUTA UTARA	56	46	20	122	3,558	13,763	6,122	23,443
5	KUTA	25	22	7	54	1,971	7,148	4,110	13,229
6	KUTA SELATAN	64	56	17	137	3,619	14,975	6,261	24,855
	KABUPATEN	240	289	66	595	14,411	59,145	28,487	102,043

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Badung Tahun 2025

Berdasarkan data distribusi sekolah dan siswa menurut kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025, terlihat bahwa ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Badung cukup memadai dan tersebar di seluruh kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 595 unit sekolah yang terdiri dari 240 TK, 289 SD, dan 66 SMP, dengan jumlah peserta didik mencapai 102.043 siswa yang meliputi 14.411 siswa TK, 59.145 siswa SD, dan 28.487 siswa SMP.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Kecamatan Kuta Selatan memiliki jumlah sekolah dan siswa terbanyak dengan 137 sekolah dan 24.855 siswa, diikuti oleh Kuta Utara dengan 122 sekolah dan 23.443 siswa, serta Mengwi dengan 130 sekolah dan 21.391 siswa. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah sekolah dan siswa relatif lebih sedikit adalah Petang, dengan 44 sekolah dan 3.965 siswa, yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya.

Ketersediaan dan pemerataan fasilitas pendidikan tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah



(RLS). Dengan tersedianya akses pendidikan yang cukup luas serta jumlah peserta didik yang tinggi, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Upaya untuk mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung pada tahun 2025 didukung oleh 8 program, meliputi: Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dibagi menjadi 3 indikator baik dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Uptd. Puskesmas. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.538.587.543.973,00 dengan realisasi sebesar Rp. 952.845.445.201,20 sehingga serapan anggaran sebesar 61,93%.

Terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia. yaitu :

- belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung lainnya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran
- kondisi ekonomi sebagian keluarga yang kurang mampu juga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
- kualitas dan pemerataan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya optimal
- motivasi dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.
- ketimpangan akses pelayanan kesehatan di beberapa wilayah, khususnya pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi maupun wilayah yang relatif jauh dari fasilitas kesehatan
- perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sebagian masyarakat belum optimal



- masih ditemukannya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang cenderung meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat
- kebutuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang perlu terus ditingkatkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.

Namun demikian, terdapat berbagai faktor pendukung yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Badung, diantaranya :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif memadai menjadi salah satu modal penting dalam mendukung proses belajar mengajar
- dukungan kebijakan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan gratis turut mendorong peningkatan partisipasi sekolah
- program prioritas untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
- ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang relatif memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan
- dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan program kesehatan preventif, menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- Tingginya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan promotif preventif juga menjadi modal utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan Indeks Pembangunan Manusia di bidang pendidikan, telah dilakukan beberapa upaya yang akan terus dilanjutkan guna perbaikan, yaitu :



- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya
- Bantuan Ekonomi bagi Peserta Didik dengan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk mencegah anak putus sekolah
- Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi guru secara berkala serta pemerataan penempatan guru ke seluruh wilayah
- Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan
- Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya strategis, antara lain peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dengan membuka 2 RSD yaitu RSD Suwiti dan Giri Asih, penguatan program promotif dan preventif seperti imunisasi, posyandu, serta edukasi pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan
- pemerintah daerah juga mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan melalui integrasi program jaminan kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, yang berperan penting dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat.



Berikut beberapa dokumentasi penghargaan dan kegiatan yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung.

1. Juara 1 pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) BALI XVI Tahun 2025



2. Juara 2 pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar (PORJAR) Provinsi Tahun 2025





3. Program Bimbingan Belajar (Bimbel) Bahasa Inggris gratis untuk masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2025 yang diikuti oleh 62 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung



3.2.11 Indikator Persentase Jumlah Koperasi Sehat

Indikator Persentase Jumlah Koperasi Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kelembagaan dan kinerja koperasi di daerah. Koperasi sehat menggambarkan beberapa hal sebagai berikut :

- koperasi yang dikelola secara profesional
- memiliki tata kelola yang baik
- aktif menjalankan kegiatan usaha
- melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- memenuhi aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan persentase koperasi sehat menunjukkan semakin baiknya pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi koperasi melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap koperasi yang aktif. Persentase jumlah koperasi sehat dihitung dari perbandingan antara jumlah koperasi yang dinyatakan sehat dengan jumlah koperasi yang aktif



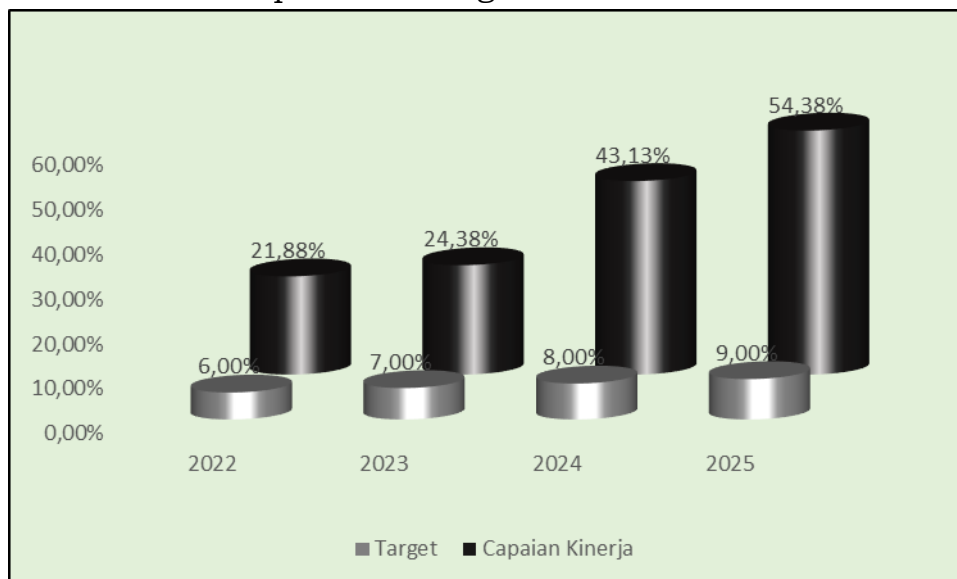
pada tahun berjalan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan kuantitas koperasi yang beroperasi, tetapi juga kualitas pengelolaan koperasi yang mampu menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara akuntabel dan berkelanjutan.

Secara regulatif, indikator ini berlandaskan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Selain itu, penilaian kesehatan koperasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta ketentuan pembinaan dan pengawasan koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan jumlah koperasi sehat juga mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya pembinaan, pendampingan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, serta penguatan pengawasan kelembagaan guna mendorong peningkatan kualitas dan kesehatan koperasi sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Grafik 3.14
Target dan Capaian Persentase Koperasi Sehat
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025

Persentase Jumlah Koperasi Sehat di Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 6,00%, sementara capaian kinerja mampu mencapai 21,88%, sehingga realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi mulai menunjukkan hasil yang positif.

Pada tahun 2023, target indikator meningkat menjadi 7,00%, dengan capaian kinerja sebesar 24,38%. Capaian tersebut kembali menunjukkan realisasi yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas tata kelola koperasi, terutama dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta penguatan manajemen usaha koperasi.

Selanjutnya pada tahun 2024, target kembali ditingkatkan menjadi 8,00%, dan capaian kinerja meningkat signifikan hingga mencapai 43,13%. Lonjakan capaian ini menunjukkan semakin efektifnya program pembinaan, pendampingan, serta evaluasi kesehatan koperasi yang dilakukan oleh



perangkat daerah terkait, sehingga semakin banyak koperasi yang mampu memenuhi kriteria sebagai koperasi sehat.

Pada tahun 2025, target indikator kembali ditingkatkan menjadi 9,00%, dengan capaian kinerja sebesar 54,38%. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pengelolaan koperasi di Kabupaten Badung, serta meningkatnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi dalam menerapkan tata kelola koperasi yang sehat dan akuntabel.

Secara keseluruhan, tren peningkatan persentase koperasi sehat dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa program pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan efektif. Peningkatan ini juga mencerminkan semakin kuatnya peran koperasi sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian daerah yang mampu mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian persentase koperasi sehat Kabupaten Badung Tahun 2025 sebesar 54,38% yang jauh melampaui target RPJMD sebesar 9% dapat dijelaskan sebagai hasil dari dinamika kebijakan dan kondisi eksternal yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat penetapan target RPJMD, kondisi perekonomian masih berada dalam fase pemulihan pasca pandemi Covid-19, sehingga kinerja keuangan sebagian besar koperasi diperkirakan belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut menyebabkan proyeksi jumlah koperasi yang dapat mencapai predikat sehat diperkirakan relatif terbatas, sehingga target yang ditetapkan cenderung konservatif.

Selain itu, sejak tahun 2021 telah diberlakukan sistem penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dengan pendekatan yang baru, yang pada saat itu belum sepenuhnya teruji dampaknya terhadap hasil penilaian kesehatan koperasi. Ketidakpastian terhadap implementasi sistem penilaian baru tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penetapan target yang lebih moderat.



Namun demikian, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi daerah serta meningkatnya kapasitas tata kelola koperasi melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dengan demikian, capaian sebesar 54,38% tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi indikator bahwa koperasi di Kabupaten Badung telah mampu beradaptasi dan berkembang lebih baik dari proyeksi awal yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3.8
Koperasi Sehat Per Kecamatan Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI YANG DINILAI		%
		ADA	SEHAT	
1	PETANG	1	0	0.00%
2	ABIANSEMAL	44	20	45.45%
3	MENGWI	45	30	66.67%
4	KUTA UTARA	31	11	35.48%
5	KUTA	9	5	55.56%
6	KUTA SELATAN	30	21	70.00%
	KABUPATEN	160	87	54.38%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data rincian koperasi sehat per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025, diketahui bahwa dari 160 koperasi yang dinilai, terdapat 87 koperasi yang masuk kategori sehat, sehingga menghasilkan persentase koperasi sehat sebesar 54,38% pada tingkat kabupaten. Capaian ini menunjukkan kondisi yang sangat baik karena mampu melampaui target kinerja tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 9,00%, sebagaimana terlihat pada capaian indikator kinerja daerah dalam LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2025.

Apabila dilihat berdasarkan sebaran wilayah kecamatan, capaian koperasi sehat tertinggi terdapat di Kecamatan Kuta Selatan dengan persentase 70,00% (21 koperasi sehat dari 30 koperasi yang dinilai), diikuti oleh Kecamatan Mengwi sebesar 66,67% (30 koperasi sehat dari 45 koperasi yang dinilai), serta Kecamatan Kuta sebesar 55,56% (5 koperasi sehat dari 9



koperasi yang dinilai). Sementara itu, Kecamatan Abiansemal mencapai 45,45%, dan Kecamatan Kuta Utara sebesar 35,48%. Adapun Kecamatan Petang belum memiliki koperasi yang masuk kategori sehat dari 1 koperasi yang dinilai sehingga persentasenya masih 0,00%.

Berdasarkan data pembandingan kinerja pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Bali, capaian persentase koperasi sehat Kabupaten Badung tahun 2025 sebesar 54,38% menunjukkan kinerja yang relatif kompetitif dibandingkan dengan daerah lain. Secara provinsi, persentase koperasi sehat di Provinsi Bali tercatat sebesar 58%, yang menggambarkan rata-rata kondisi kesehatan koperasi pada tingkat regional.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, capaian Kabupaten Badung juga berada pada posisi yang cukup baik. Kota Denpasar memiliki persentase koperasi sehat sebesar 48%, sedangkan Kabupaten Gianyar sebesar 43%. Dengan demikian, capaian Kabupaten Badung yang mencapai 54,38% berada di atas capaian Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, serta hanya sedikit berada di bawah rata-rata tingkat Provinsi Bali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola koperasi. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan bahwa koperasi di Kabupaten Badung memiliki tingkat kesehatan kelembagaan yang relatif baik dan mampu bersaing dengan daerah lain di Provinsi Bali dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan indikator persentase jumlah koperasi sehat tahun 2025 didukung 5 program, yaitu : Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.005.300.030,00 dengan realisasi sebesar Rp. 984.843.950,00 sehingga serapan anggaran sebesar 97,97%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan indikator persentase koperasi sehat di Kabupaten Badung Tahun 2025, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut.



a. Faktor penghambat

- masih terdapat beberapa koperasi yang belum kooperatif dalam proses penilaian kesehatan koperasi, khususnya dalam pengisian dan pengembalian kuisioner yang diberikan oleh dinas terkait. Kondisi ini menyebabkan proses pengumpulan data dan penilaian kesehatan koperasi tidak dapat dilakukan secara optimal.
- keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani penilaian kesehatan koperasi juga menjadi kendala, sehingga dalam satu tahun penilaian hanya dapat dilakukan terhadap sekitar 160 koperasi
- masih terdapat koperasi yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan penilaian kesehatan koperasi secara komprehensif.

b. Faktor pendukung

- kegiatan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja koperasi secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi koperasi yang lebih lengkap, jelas, dan akurat.
- Pada Tahun 2024 telah ditetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Muda, dan Madya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung oleh Kementerian PANRB. Penetapan formasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi, sehingga keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi dapat segera teratasi di masa mendatang.

c. Langkah Strategis

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas penilaian kesehatan koperasi serta memperkuat tata kelola koperasi di daerah. Pada tahun 2025, strategi yang telah dilakukan yaitu :



- mengusulkan penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bertugas melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan petugas yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi kesehatan koperasi secara lebih luas dan optimal.
- Dinas Koperasi bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Badung juga terus melakukan sosialisasi kepada gerakan koperasi terkait penerapan kebijakan akuntansi koperasi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi sehingga dapat memenuhi standar penilaian kesehatan koperasi secara lebih akuntabel dan transparan.

Adapun sebagai upaya perbaikan ke depan, mekanisme pengisian kuisisioner penilaian kesehatan koperasi tidak lagi dilakukan secara daring, melainkan melalui pertemuan langsung dengan mengundang gerakan koperasi ke perangkat daerah terkait. Melalui mekanisme ini diharapkan proses pengisian data dapat dilakukan secara lebih akurat, lengkap, dan tepat, sehingga hasil penilaian kesehatan koperasi dapat menggambarkan kondisi koperasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, berbagai strategi yang telah dilakukan serta rencana perbaikan yang akan dilaksanakan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sehat, serta mendukung peran koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah secara berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung persentase jumlah koperasi sehat.



1. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Karyawan Kawan Sejati



2. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Simpan Pinjam Tiara Nirwana





3. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Ke Koperasi Kresna Dana Mandiri



3.2.12 Indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha

Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan jumlah pelaku usaha atau individu yang menjalankan kegiatan kewirausahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini menggambarkan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi daerah berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan jumlah wirausaha menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan wirausaha mencerminkan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam menciptakan peluang usaha, memperluas kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung secara berkelanjutan mendorong pengembangan kewirausahaan melalui program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi permodalan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

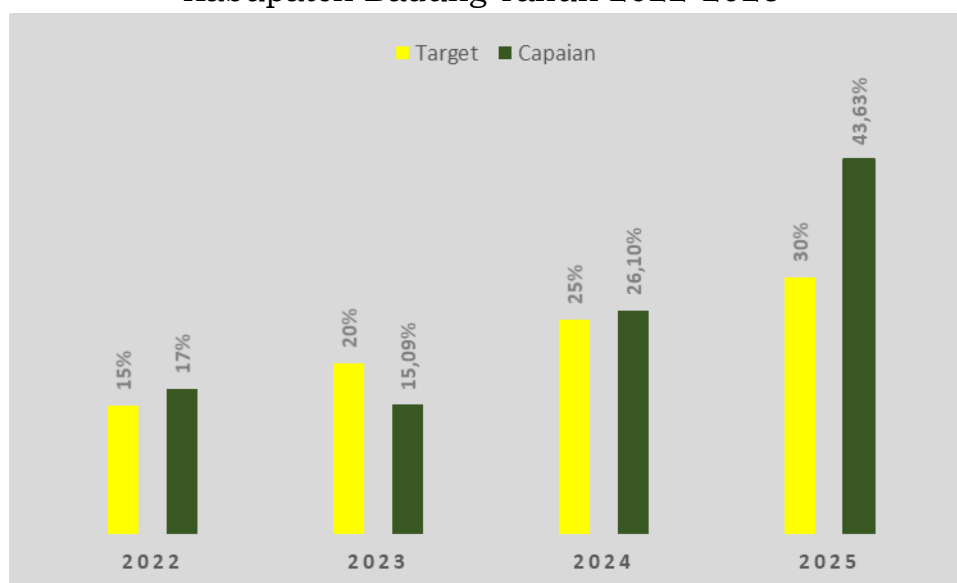


Secara regulatif, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan jumlah wirausaha didukung oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembinaan, serta pengembangan kewirausahaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan penguatan kewirausahaan.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024, yang menargetkan peningkatan rasio kewirausahaan nasional melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah.

Grafik 3.15

Target dan Capaian Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025



Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya dinamika perkembangan yang menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada tahun 2025. Analisis ini penting untuk menggambarkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, target pertumbuhan jumlah wirausaha ditetapkan sebesar 15%, sementara realisasinya mencapai 17%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target sebesar 2%, yang mengindikasikan bahwa berbagai program pemberdayaan usaha masyarakat mulai memberikan dampak positif. Kondisi ini juga menggambarkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi serta meningkatnya minat masyarakat untuk menjalankan usaha mandiri.

Memasuki tahun 2023, target pertumbuhan ditingkatkan menjadi 20%, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 15,09%. Capaian ini berada di bawah target yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan kewirausahaan pada tahun tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini antara lain dinamika pemulihan ekonomi, keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha baru, serta masih terbatasnya kapasitas manajerial dan inovasi usaha pada sebagian pelaku UMKM.

Pada tahun 2024, pemerintah daerah kembali meningkatkan target pertumbuhan menjadi 25%. Capaian yang diperoleh bahkan mencapai 26,10%, sehingga kembali melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendorong kewirausahaan mulai menunjukkan hasil yang lebih optimal. Program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, serta kemudahan perizinan usaha melalui sistem digital memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah wirausaha baru di Kabupaten Badung.

Perkembangan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, dimana target pertumbuhan ditetapkan sebesar 30%, namun capaian yang berhasil diraih mencapai 43,63%. Capaian ini melampaui target sebesar 13,63%, yang



menunjukkan akselerasi pertumbuhan kewirausahaan yang sangat kuat. Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Badung, yang didukung oleh meningkatnya peluang usaha di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, serta penguatan program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, tren perkembangan indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah wirausaha di Kabupaten Badung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan capaian pada tahun 2023. Namun demikian, pada periode berikutnya terjadi pemulihan yang sangat baik bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi permodalan, kemudahan perizinan usaha, serta penguatan akses pasar telah berjalan cukup efektif.

Dengan capaian yang sangat signifikan pada tahun 2025, indikator pertumbuhan jumlah wirausaha ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki potensi ekonomi masyarakat yang kuat serta ekosistem kewirausahaan yang semakin berkembang, sehingga mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Tabel 3.9
Jumlah UMKM Per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	PETANG	1,988
2	ABIANSEMAL	7,007
3	MENGWI	11,248
4	KUTA UTARA	14,186
5	KUTA	10,734
6	KUTA SELATAN	13,139
	KABUPATEN	58,302

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025



Berdasarkan data persebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung, jumlah pelaku usaha pada tahun 2025 tercatat sebanyak 58.302 unit usaha yang tersebar di enam kecamatan. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan masyarakat di Kabupaten Badung berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Secara rinci, Kecamatan Kuta Utara memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu 14.186 unit usaha, diikuti oleh Kuta Selatan sebanyak 13.139 unit usaha, serta Kecamatan Mengwi sebanyak 11.248 unit usaha. Selanjutnya Kecamatan Kuta tercatat memiliki 10.734 unit usaha, sementara itu Kecamatan Abiansemal memiliki 7.007 unit usaha, dan Kecamatan Petang sebanyak 1.988 unit usaha. Persebaran ini menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan tidak hanya berkembang di kawasan pariwisata, tetapi juga mulai tumbuh di wilayah penyangga ekonomi lainnya.

Banyaknya jumlah UMKM tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong capaian pertumbuhan jumlah wirausaha pada tahun 2025 yang mencapai 43,63%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 30%. Tingginya jumlah UMKM mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik pada sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, maupun sektor pendukung pariwisata yang menjadi karakteristik utama perekonomian Kabupaten Badung.

Selain itu, tingginya capaian pertumbuhan wirausaha pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah daerah dalam pengembangan kewirausahaan telah berjalan secara efektif. Program tersebut antara lain berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi perizinan berusaha, penguatan akses pembiayaan, serta perluasan akses pemasaran produk UMKM. Dukungan tersebut mendorong masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usaha secara mandiri sehingga jumlah wirausaha terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk mewujudkan indikator persentase pertumbuhan jumlah wirausaha tahun 2025 didukung oleh 3 program, yaitu : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM),



Program Pengembangan UMKM dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 22.478.811.058,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.643.512.133,00 sehingga serapan anggaran sebesar 78,49%.

Kabupaten Badung masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan jumlah wirausaha, diantaranya :

- Keterbatasan akses pasar yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu memperluas jangkauan pemasaran produknya secara optimal.
- kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pengelolaan usaha, pengembangan produk, serta penguatan daya saing usaha.
- terbatasnya akses dan pemanfaatan teknologi, termasuk kurangnya pemahaman terhadap pemasaran digital, turut mempengaruhi kemampuan UMKM dalam mengikuti perkembangan ekonomi berbasis teknologi dan digitalisasi.

Namun demikian, terdapat berbagai faktor pendukung yang berperan dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Badung. Pemerintah daerah secara aktif memfasilitasi pelaku UMKM melalui pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, serta menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki tenaga pendamping UMKM yang kompeten dan bersertifikat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan ekosistem digital juga mulai dioptimalkan untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM UMKM, fasilitasi kemitraan usaha dengan pelaku usaha menengah dan besar, serta akses pembiayaan dan permodalan melalui program Sidi Kumbara.
- pemerintah daerah juga memfasilitasi akses pemasaran produk UMKM melalui kegiatan promosi seperti Jumat Ceria dan pameran Badung UMKM



Week. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan jumlah wirausaha secara berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung jumlah wirausaha di Kabupaten Badung. Berikut dokumentasi kegiatan jumlah wirausaha tahun 2025.

1. Launching Kegiatan Sidi Kumbara di Kabupaten Badung tahun 2025



2. Pembukaan Kegiatan Pelatihan Desain Mode Tahun 2025





3.2.13 Indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan peran sektor perdagangan dalam pembentukan nilai tambah ekonomi daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar sumbangan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi kontribusinya, semakin besar pula peran aktivitas perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan perputaran barang dan jasa di masyarakat.

Secara regulatif, pengukuran indikator ini mengacu pada konsep dan metodologi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan kerangka System of National Accounts 2008 (SNA 2008) yang menjadi standar internasional dalam penghitungan statistik ekonomi. Selain itu, penggunaan indikator kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB juga selaras dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan kinerja berbasis indikator yang terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan.



Grafik 3.16

Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022-2026



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data target dan capaian Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022-2025, terlihat bahwa kinerja sektor perdagangan menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan serta secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2022, target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditetapkan sebesar 8,78%, dengan capaian realisasi sebesar 7,82%. Meskipun capaian masih berada sedikit di bawah target, kondisi ini mencerminkan fase pemulihan aktivitas ekonomi daerah setelah periode tekanan ekonomi sebelumnya. Aktivitas perdagangan mulai kembali bergerak seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan mulai pulihnya kegiatan ekonomi.

Memasuki tahun 2023, kontribusi sektor perdagangan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dengan target sebesar 9,54%, realisasi kontribusi sektor perdagangan mencapai 20,98%, atau lebih dari dua kali lipat target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, terutama seiring meningkatnya aktivitas pariwisata, perdagangan



barang dan jasa, serta berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2024, tren positif tersebut terus berlanjut. Target yang ditetapkan sebesar 10,48% berhasil dilampaui secara signifikan dengan capaian 23,38%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan semakin kuat dalam menopang struktur perekonomian daerah, didukung oleh meningkatnya transaksi perdagangan, aktivitas distribusi barang, serta pertumbuhan pusat-pusat perdagangan modern maupun tradisional.

Selanjutnya pada tahun 2025, kinerja sektor perdagangan kembali menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi. Target kontribusi sebesar 11,39% berhasil dilampaui dengan capaian 26,19%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengukuran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, khususnya melalui meningkatnya aktivitas perdagangan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, jasa, serta perkembangan ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Badung. Capaian yang secara konsisten melampaui target menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas perdagangan, memperkuat ekosistem usaha, serta meningkatkan perputaran ekonomi di masyarakat. Dengan kinerja yang terus meningkat, sektor perdagangan diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung secara berkelanjutan.

Sebagai gambaran pembandingan, struktur ekonomi Provinsi Bali menunjukkan bahwa kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada kisaran sekitar 8–9 persen terhadap PDRB provinsi. Angka ini menggambarkan rata-rata kontribusi sektor perdagangan dalam struktur ekonomi wilayah Bali secara keseluruhan.



Apabila dibandingkan dengan kisaran kontribusi sektor perdagangan di wilayah Bali tersebut, maka capaian kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Badung yang mencapai lebih dari 20 persen pada tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa:

1. Peran sektor perdagangan di Kabupaten Badung jauh lebih dominan dibandingkan rata-rata daerah lain di Bali.
2. Tingginya kontribusi ini tidak terlepas dari karakteristik ekonomi Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata, perdagangan, jasa, dan distribusi barang di Bali bagian selatan.
3. Aktivitas perdagangan di Badung memiliki multiplier effect yang kuat terhadap sektor lain seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan jasa pariwisata.

Untuk mewujudkan indikator Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2025 didukung oleh 5 program, yaitu : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.303.965.749,00 dengan realisasi sebesar Rp 971.413.311,00 sehingga serapan anggaran sebesar 74,50%.

a. Faktor penghambat:

- infrastruktur logistik yang belum merata, yang dapat menyebabkan distribusi barang tidak berjalan secara optimal dan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi serta waktu distribusi.
- sektor perdagangan juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, baik yang berasal dari aktivitas ekspor maupun impor. Perubahan harga komoditas tersebut dapat mempengaruhi stabilitas perdagangan dan pada akhirnya berdampak terhadap kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.
- ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik, seperti perang dagang yang berpotensi mengganggu permintaan ekspor serta stabilitas rantai pasok global.



- kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan penguasaan teknologi juga menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan, terutama dalam menghadapi transformasi digital. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mampu mengadopsi teknologi digital dalam kegiatan perdagangan sehingga menghambat peningkatan efisiensi dan jangkauan pasar. Hambatan lainnya adalah rantai pasok yang relatif panjang, yang seringkali meningkatkan biaya distribusi dan mengurangi margin keuntungan pelaku usaha.

b. Faktor Pendukung

Namun demikian, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memberikan dorongan positif terhadap perkembangan sektor perdagangan, diantaranya:

- Tingginya konsumsi rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya aktivitas perdagangan, karena meningkatnya daya beli masyarakat secara langsung mendorong permintaan terhadap berbagai barang dan jasa.
- perbaikan infrastruktur dan sistem logistik juga berperan dalam mempercepat distribusi barang sehingga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan.
- Perkembangan ekonomi digital dan perdagangan berbasis elektronik (E-commerce) juga memberikan peluang besar bagi sektor perdagangan untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Kemudahan masyarakat dalam berbelanja secara online mendorong peningkatan volume transaksi perdagangan.
- keterkaitan antar sektor ekonomi melalui proses hilirisasi, mulai dari sektor pertanian hingga sektor industri, turut memperkuat rantai nilai perdagangan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dalam perekonomian daerah.
- peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi faktor pendukung yang sangat penting karena sektor ini merupakan penggerak utama dalam perdagangan eceran serta mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.



Upaya yang telah dilakukan difokuskan pada penguatan sistem distribusi, pengendalian harga, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melancarkan jalur distribusi melalui Bahan Pokok Penting (BAPOKTING) sehingga ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dapat terjaga dan proses distribusi menjadi lebih efisien. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan monitoring stok ketersediaan BAPOKTING guna memastikan pasokan barang tetap tersedia dan dapat beredar secara optimal di masyarakat.

Upaya lainnya adalah pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan kepada pengelola pasar dan pelaku usaha, sehingga kegiatan perdagangan dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perdagangan ke depan, pemerintah juga merumuskan upaya yang akan dilakukan sebagai langkah penguatan berkelanjutan, diantaranya :

- meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan kapasitas usaha, manajemen usaha, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan pasar.
- pemerintah daerah juga akan menyelenggarakan pelatihan di bidang ekspor guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku usaha terkait peluang perdagangan internasional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar hingga ke tingkat global serta meningkatkan daya saing produk daerah.
- peningkatan pengawasan terhadap distribusi perdagangan, sehingga proses distribusi barang dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam memperkuat sektor perdagangan melalui penguatan sistem distribusi,



peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pengawasan perdagangan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor perdagangan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut dokumentasi kegiatan yang mendukung sektor perdagangan.



Kegiatan Jumat Ceria bersama UMKM

3.2.14 Indikator Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat yang mencerminkan bagaimana individu menilai kualitas hidupnya secara menyeluruh. Indeks ini menggambarkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat melalui tiga dimensi utama yaitu kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Kebahagiaan menjadi indikator penting karena tidak hanya menilai capaian pembangunan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari perspektif kualitas hidup dan kesejahteraan batin masyarakat.

Secara regulatif, pengukuran Indeks Kebahagiaan di Indonesia mengacu pada metodologi yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 yang menempatkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu sasaran pembangunan nasional.



Selain itu, penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah, termasuk indikator kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Kebahagiaan, juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa indikator kinerja harus mampu menggambarkan outcome pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Grafik 3.17
Target dan Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Badung Tahun 2025

Pada tahun 2022, target Indeks Kebahagiaan ditetapkan sebesar 76,39, namun realisasi capaian berada pada angka 75,02. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator tersebut masih berada 1,37 poin di bawah target, yang mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat pada tahun tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2023, target ditetapkan sebesar 76,64 dan realisasi capaian mencapai 78,69. Dengan demikian, capaian tahun 2023 melampaui target sebesar 2,05 poin, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada persepsi kebahagiaan masyarakat. Kondisi ini dapat mencerminkan



mulai pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Selanjutnya pada tahun 2024, target kembali ditingkatkan menjadi 76,89, dengan realisasi capaian sebesar 78,86. Capaian tersebut melampaui target sebesar 1,97 poin, yang menunjukkan bahwa tren peningkatan kebahagiaan masyarakat tetap terjaga. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat.

Pada tahun 2025, target Indeks Kebahagiaan ditetapkan sebesar 77,14 dengan realisasi capaian sebesar 77,60. Capaian tersebut masih melampaui target sebesar 0,46 poin, meskipun selisihnya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung tetap berada pada kategori yang baik dan relatif stabil.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 menunjukkan tren yang positif, dimana setelah mengalami capaian di bawah target pada tahun 2022, indikator ini mampu melampaui target secara konsisten pada tahun 2023 hingga 2025. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Badung tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan subjektif masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2025 tercatat sebesar 77,60 dan termasuk dalam kategori tinggi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat Kabupaten Badung berada pada kondisi yang baik. Jika dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kebahagiaan nasional maupun provinsi pada pengukuran sebelumnya yang berada pada kisaran 71–72 poin, capaian Kabupaten Badung menunjukkan posisi yang relatif lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan



kualitas hidup masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan indikator Indeks Kebahagiaan pada tahun 2025 didukung 6 program, meliputi: Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pelatihan Kerja Dan Prduktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.927.627.873,00 dengan realiasi sebesar Rp. 5.514.782.055,00 sehingga serapan anggaran sebesar 93,04%.

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendukung, dari sisi faktor penghambat, kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu aspek yang berpotensi mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, keterbatasan mobilitas akibat gangguan fisik, maupun rasa nyeri yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas hidup individu dan secara langsung memengaruhi kepuasan hidup. Selain itu, meningkatnya keluhan fisik harian maupun penyakit akut dan kronis juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kesejahteraan subjektif masyarakat. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi, sehingga berdampak pada persepsi kebahagiaan.

Di samping itu, gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres—termasuk stres akibat tekanan pekerjaan—menjadi faktor penting yang dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Permasalahan kesehatan mental tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis individu, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan sosial, produktivitas kerja, dan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Faktor lainnya adalah tingginya biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat, yang dapat menimbulkan beban ekonomi dan tekanan psikologis sehingga mengurangi rasa aman dan kesejahteraan. Selain itu, pada kelompok lanjut usia, penurunan kesehatan fisik seringkali disertai dengan perasaan



keseharian atau berkurangnya produktivitas, yang juga berpotensi menurunkan tingkat kebahagiaan.

Sementara itu, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan Indeks Kebahagiaan masyarakat, diantaranya:

1. Dari aspek kesehatan fisik, penerapan gaya hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, serta aktivitas olahraga secara rutin dapat meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus memperbaiki suasana hati. Aktivitas fisik diketahui mampu merangsang produksi hormon endorfin dan serotonin yang berperan dalam meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi stres.
2. kesehatan mental dan psikologis yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Kemampuan individu dalam mengelola stres, memiliki ketahanan diri (resiliensi), serta memandang kehidupan secara positif dapat meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Kualitas tidur yang baik dan keseimbangan antara aktivitas kerja dan kehidupan pribadi juga turut berperan dalam menjaga stabilitas emosional masyarakat.
3. akses dan mutu pelayanan kesehatan yang memadai. Kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, serta program promotif dan preventif seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif masyarakat.
4. kondisi lingkungan dan sosial juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Lingkungan yang bersih dan nyaman, hubungan sosial yang harmonis dengan keluarga dan komunitas, serta kondisi tempat tinggal yang aman dari risiko bencana maupun gangguan keamanan akan meningkatkan rasa aman dan kenyamanan hidup masyarakat.



Pemerintah Kabupaten Badung melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kebahagiaan masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

1. melalui pengembangan Aplikasi Badung Sehat, yaitu inovasi layanan kesehatan digital yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi layanan kesehatan secara lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
2. Pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan penghargaan kepada lansia yang telah melampaui usia harapan hidup, yaitu di atas 75 tahun. Program ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kelompok lanjut usia, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kualitas kesehatan sepanjang siklus kehidupan.
3. penguatan pelayanan kesehatan primer, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Melalui peningkatan kualitas layanan, puskesmas diarahkan untuk lebih proaktif dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif guna mencegah timbulnya penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
4. pemerintah daerah juga meningkatkan pelayanan kesehatan mental (mental health) dengan memperluas layanan kesehatan jiwa yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan emosional masyarakat, mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat. Upaya ini menjadi penting mengingat kesehatan mental merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan masyarakat.
5. melalui implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemerintah daerah melakukan pengawasan kualitas air minum, edukasi



perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6. Pemerintah Kabupaten Badung juga melaksanakan program percepatan penurunan stunting melalui berbagai intervensi yang bersifat intensif dan terintegrasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sejak dini, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.

Selain program-program tersebut, pemerintah daerah juga mengoptimalkan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan dalam momentum Hari Kesehatan Nasional melalui penyelenggaraan seminar kesehatan dan komitmen peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan secara berkelanjutan mendukung peningkatan Indeks Kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan di bidang kesehatan yang mendukung Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Badung.



Kegiatan Badung Emergency Service and Treatment (BEST) adalah program layanan kesehatan komprehensif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



3.2.15 Indikator Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin merupakan salah satu indikator makro pembangunan yang menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Penurunan persentase penduduk miskin mencerminkan keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Indikator Persentase Penduduk Miskin menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan, antara lain melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Analisis terhadap indikator ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah serta sebagai bahan perumusan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Secara regulatif, pengukuran dan pengendalian indikator Persentase Penduduk Miskin didukung oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

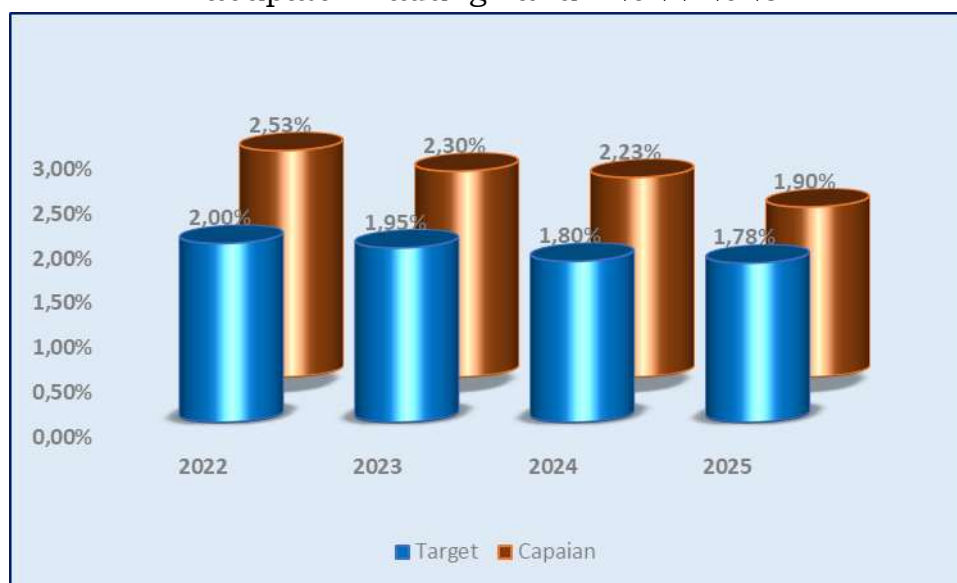
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur kebijakan, program, dan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang menjadi dasar koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan penggunaan indikator makro pembangunan termasuk tingkat kemiskinan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Dengan demikian, indikator Persentase Penduduk Miskin tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Grafik 3.18
Target dan Capaian Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badug Tahun 2025

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, target persentase penduduk miskin ditetapkan sebesar 2,00%, sedangkan realisasi tercatat sebesar 2,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tingkat kemiskinan masih berada di



atas target yang direncanakan, yang dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih berlangsung sehingga berdampak pada kemampuan ekonomi sebagian masyarakat.

Memasuki tahun 2023, target ditetapkan sebesar 1,95%, dengan realisasi 2,30%. Meskipun capaian masih berada di atas target, namun secara substantif telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,23 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta mulai optimalnya berbagai program pemulihan ekonomi daerah.

Selanjutnya pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 1,80% dan realisasi tercatat 2,23%. Pada periode ini kembali terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,07 poin persentase dibandingkan tahun 2023, yang mencerminkan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya efektivitas program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 1,78%, sedangkan realisasi tercatat sebesar 1,90%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan sebesar 0,33 poin persentase dibandingkan tahun 2024, sekaligus merupakan angka kemiskinan terendah dalam empat tahun terakhir. Meskipun realisasi masih sedikit di atas target yang ditetapkan, tren penurunan yang konsisten menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2022–2025 persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung berhasil ditekan dari 2,53% menjadi 1,90%, atau mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase. Hal ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Badung dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program strategis seperti peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi lokal, perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta peningkatan akses



terhadap layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Dengan tren yang terus menurun tersebut, diharapkan pada tahun-tahun mendatang tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung dapat semakin ditekan sehingga target pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Badung
Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)
1	2020	13,75
2	2021	18,52
3	2022	18,28
4	2023	17,01
5	2024	16,87
6	2025	14,66

Sumber: Dinas Sosial Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2020–2025, terlihat bahwa secara umum jumlah penduduk miskin menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 13,75 ribu jiwa. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 18,52 ribu jiwa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak perlambatan ekonomi dan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat pada periode tersebut.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan menjadi 18,28 ribu jiwa, kemudian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 17,01 ribu jiwa. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16,87 ribu jiwa, dan kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 14,66 ribu jiwa.

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 2021–2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Badung berhasil ditekan dari 18,52 ribu jiwa menjadi 14,66 ribu jiwa, atau mengalami penurunan sebesar 3,86 ribu jiwa. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas berbagai program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan, seperti penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesempatan



kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi daerah. Tren penurunan ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung.

Tabel 3.11
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
dan Provinsi Bali Tahun 2021-2025

NO	KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	14,24	15	14,12	12,9	12,45
2	Kab. Tabanan	23,11	23,46	21,42	20,16	19,45
3	Kab. Badung	18,52	18,28	17,01	16,87	14,66
4	Kab. Gianyar	25,36	24,74	23,76	21,45	20
5	Kab. Klungkung	10,19	10,89	10,22	9,68	9,48
6	Kab. Bangli	11,68	12,17	12,24	11,79	11,28
7	Kab. Karangasem	28,52	29,45	27,83	27,76	27,32
8	Kab. Buleleng	40,92	41,68	39,52	36,55	35,39
9	Kota Denpasar	29,41	30,02	27,69	27,27	23,2
10	Provinsi Bali	202	205,7	193,8	184,4	173,2

Sumber : Kabupaten Badung Dalam Angka 2026

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2021–2025, terlihat bahwa secara umum sebagian besar daerah menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin, meskipun pada beberapa wilayah sempat mengalami fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta meningkatnya efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi.

Sebagai perbandingan pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin tertinggi tercatat di Kabupaten Buleleng sebesar 35,39 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Karangasem sebesar 27,32 ribu jiwa, serta Kota Denpasar sebesar 23,20 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kabupaten Klungkung sebesar 9,48 ribu jiwa, diikuti oleh Kabupaten Bangli sebesar 11,28 ribu jiwa dan Kabupaten Jembrana sebesar 12,45 ribu jiwa. Untuk Kabupaten Badung, jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat



sebesar 14,66 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 16,87 ribu jiwa dan 2023 sebesar 17,01 ribu jiwa.

Upaya untuk mewujudkan indikator persentase penduduk miskin tahun 2025 didukung oleh 4 program, yaitu: Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 396.299.377.222,00 dengan realisasi sebesar Rp. 366.126.918.473,00 sehingga serapan anggaran sebesar 92,39%.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah menghadapi beberapa tantangan sekaligus didukung oleh berbagai strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dari sisi faktor penghambat, masih terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi optimalisasi penanganan kemiskinan yaitu :

- kemajuan sosial dan ekonomi Kabupaten Badung yang tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata, turut menjadi daya tarik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, dan pekerja seks komersial untuk melakukan aktivitas di wilayah Badung. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Badung belum sepenuhnya terbebas dari permasalahan sosial tersebut.
- belum optimalnya validitas data Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan social.
- struktur perekonomian Kabupaten Badung yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan strategi diversifikasi ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama pada saat terjadi gejolak pada sektor pariwisata.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor pendukung yang turut memperkuat upaya penanganan permasalahan sosial dan kemiskinan di Kabupaten Badung, diantaranya :

- Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan penertiban dan pembinaan terhadap PMKS melalui koordinasi lintas instansi dan kerja sama antar



daerah, termasuk dengan Kabupaten Karangasem dalam penanganan masalah sosial.

- penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan terus dioptimalkan untuk memastikan proses pendataan dan validasi PPKS berjalan lebih akurat, sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.
- Adanya partisipasi dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkontribusi dalam berbagai program penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- pemerintah daerah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk social safety net, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat agar mampu meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian ekonomi.

Berdasarkan strategi yang dirumuskan untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial guna mendukung penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan diarahkan pada perluasan akses layanan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat memperoleh layanan dan perlindungan sosial secara lebih merata.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial, baik melalui penguatan program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan. Langkah ini bertujuan agar program yang dilaksanakan tidak hanya menjangkau lebih banyak masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan.

Di samping itu, optimalisasi sarana dan prasarana kesejahteraan sosial juga menjadi fokus perbaikan guna mendukung efektivitas pelaksanaan program sosial di lapangan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta penguatan sistem pelayanan sosial, diharapkan program penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Badung dapat berjalan lebih efektif, tepat



sasaran, dan berkelanjutan. Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung pengentasan penduduk miskin di Kabupaten Badung.

1. K3S Badung serahkan bantuan social bagi anak rentan di Kabupaten Badung





2. Pemberian bantuan untuk veteran, lansia dan disabilitas di Kabupaten Badung oleh Bapak Bupati Badung



3. Pemberian bantuan hari raya bagi masyarakat Badung





3.2.16 Indikator Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Badung. Namun demikian, dinamika perkembangan pariwisata global menuntut adanya transformasi model pengembangan destinasi yang tidak hanya berorientasi pada wisata massal, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan potensi lokal. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis pertanian (agro-tourism) sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk wisata sekaligus upaya menjaga keseimbangan antara sektor pariwisata dan sektor pertanian yang menjadi warisan budaya Bali.

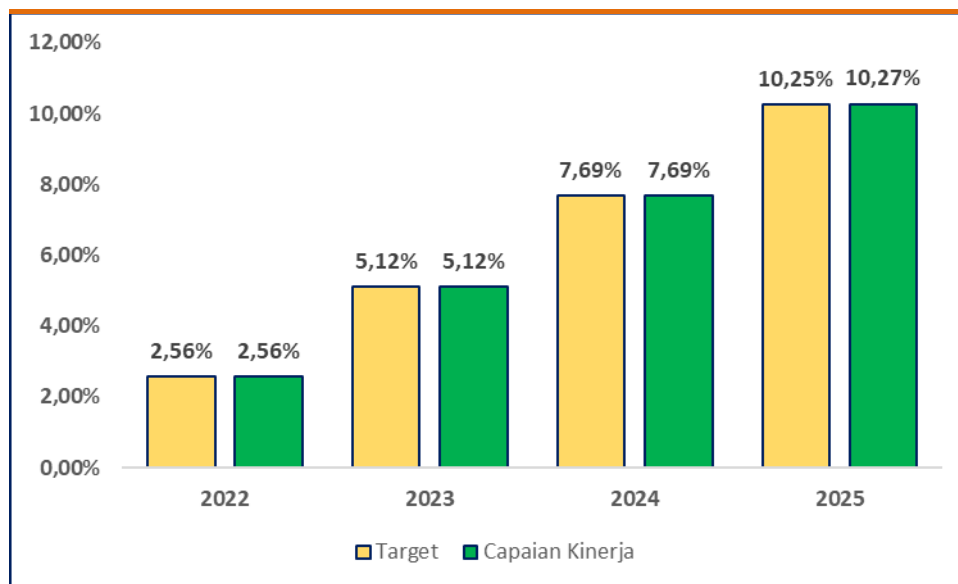
Indikator Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengintegrasikan potensi pertanian dengan aktivitas pariwisata sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, memperkuat ketahanan sektor pertanian, serta meningkatkan daya saing destinasi wisata Kabupaten Badung. Melalui pengembangan destinasi yang mengedepankan konsep agro-pariwisata, diharapkan tercipta pengalaman wisata yang autentik, edukatif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengukuran capaian indikator ini menjadi penting untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dalam mendorong pengembangan destinasi pariwisata berbasis pertanian. Analisis terhadap capaian indikator ini juga memberikan gambaran mengenai kontribusi kebijakan daerah dalam memperkuat sinergi antara sektor pariwisata dan sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



Grafik 3.19

Target dan Capaian Indikator Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data capaian indikator Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian tahun 2022–2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten baik dari sisi target maupun realisasi kinerja. Pada tahun 2022, capaian indikator tercatat sebesar 2,56%, yang sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana capaian indikator meningkat menjadi 5,12%, atau meningkat sebesar 2,56 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dan kembali berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Peningkatan kinerja juga berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 7,69%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 2,57 poin persentase dibandingkan tahun 2023. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan destinasi pariwisata yang terintegrasi dengan potensi pertanian daerah semakin berkembang dan mampu dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah terkait.



Pada tahun 2025, kinerja indikator kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 10,27%, sedikit melampaui target yang ditetapkan yaitu 10,25%. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata berbasis pertanian telah berjalan dengan baik, sehingga tidak hanya mampu mencapai target kinerja, tetapi juga memberikan capaian yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan capaian indikator dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian di Kabupaten Badung telah berjalan secara progresif dan terarah. Konsistensi peningkatan capaian tersebut mencerminkan adanya sinergi antara upaya pengembangan sektor pariwisata dengan potensi pertanian lokal, sehingga mampu memperkuat diversifikasi produk wisata sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dengan capaian yang selalu memenuhi bahkan melampaui target, indikator ini menunjukkan kinerja yang efektif dan selaras dengan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Tabel 3.12
Distribusi Daya Tarik Wisata Per Kecamatan
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DTW YANG ADA	JUMLAH DTW SESUAI STANDAR	%	JUMLAH DESA WISATA	JUMLAH DESA WISATA MAJU	%
1	Petang	6	6	100%	6	4	66,67
2	Abiansemal	5	4	80%	4	3	75
3	Mengwi	8	6	75%	8	2	25
4	Kuta Utara	3	3	100%			
5	Kuta	7	6	85.71%			
6	Kuta Selatan	17	14	82.35%			
	KABUPATEN	46	39	84.78%	18	9	50%

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2025



Berdasarkan Distribusi Daya Tarik Wisata (DTW) per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2025, tercatat bahwa jumlah DTW yang ada di Kabupaten Badung mencapai 46 DTW, dengan 39 DTW telah memenuhi standar pengelolaan, atau sebesar 84,78%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daya tarik wisata yang ada telah memenuhi kriteria standar pengelolaan dan pengembangan destinasi, sehingga berpotensi mendukung peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata daerah.

Jika dilihat berdasarkan sebaran wilayah, Kecamatan Kuta Selatan memiliki jumlah DTW terbanyak yaitu 17 DTW, dengan 14 DTW telah memenuhi standar atau sebesar 82,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan Kuta Selatan masih menjadi salah satu pusat konsentrasi pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Badung. Selanjutnya, Kecamatan Mengwi memiliki 8 DTW, dengan 6 DTW telah memenuhi standar (75%), sementara Kecamatan Kuta memiliki 7 DTW, dengan 6 DTW sesuai standar (85,71%). Adapun Kecamatan Petang dan Kecamatan Kuta Utara menunjukkan capaian yang sangat baik karena seluruh DTW yang ada telah memenuhi standar pengelolaan atau mencapai 100%.

Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga tercermin dari keberadaan 18 desa wisata di Kabupaten Badung, dimana 9 desa wisata telah masuk kategori desa wisata maju atau sebesar 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya terpusat pada destinasi wisata utama, tetapi juga mulai berkembang di wilayah perdesaan yang memiliki potensi alam, budaya, maupun aktivitas pertanian sebagai daya tarik wisata.

Kondisi tersebut secara langsung mendukung capaian indikator Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian di Kabupaten Badung, yang pada tahun 2025 tercatat mencapai 10,27%, sedikit melampaui target yang ditetapkan sebesar 10,25%. Sebaran DTW yang cukup merata di beberapa kecamatan, khususnya pada wilayah yang memiliki potensi pertanian dan pedesaan seperti Petang dan Mengwi, memberikan peluang bagi pengembangan konsep agrowisata dan desa wisata



berbasis pertanian yang memadukan aktivitas pertanian dengan pengalaman wisata.

Dengan demikian, peningkatan jumlah DTW yang memenuhi standar serta berkembangnya desa wisata di Kabupaten Badung menjadi salah satu faktor pendukung dalam mendorong pengembangan destinasi wisata yang berorientasi pada sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Badung tidak hanya berfokus pada kawasan wisata utama, tetapi juga diarahkan pada diversifikasi produk wisata berbasis potensi lokal dan pertanian, sehingga mampu mendukung capaian indikator kinerja daerah secara berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang menggunakan indikator pengembangan destinasi pariwisata sejenis, capaian Kabupaten Badung sebesar 10,27% pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik. Beberapa daerah lain menargetkan pengembangan destinasi wisata pada kisaran sekitar 10% dari total destinasi wisata yang ada setiap tahunnya, sehingga capaian Kabupaten Badung berada pada tingkat yang kompetitif dalam mendorong pengembangan daya tarik wisata berbasis potensi lokal, termasuk yang berorientasi pada sektor pertanian.

Untuk mewujudkan Indikator Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian tahun 2025 didukung oleh 4 program, meliputi: program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Program Perekonomian dan Pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 137.898.179.227,00 dengan realisasi sebesar Rp. 136.479.071.107,40 dengan serapan anggaran sebesar 98,97%.

Capaian pengembangan destinasi pariwisata masih dipengaruhi oleh beberapa tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Beberapa faktor penghambat yaitu :



- belum optimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengemas potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
- ketersediaan sarana dan prasarana penunjang di beberapa daya tarik wisata masih belum optimal, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan dan kualitas pengalaman wisata yang ditawarkan.
- pengelolaan desa wisata yang belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, maupun pengelolaan paket wisata yang terintegrasi.
- pengembangan usaha ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, sehingga potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat sekitar destinasi.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang memberikan peluang bagi peningkatan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Badung, sebagai berikut :

- ketersediaan aksesibilitas yang relatif memadai, yang memudahkan wisatawan dalam menjangkau berbagai daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Badung.
- peran serta masyarakat dalam pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata juga menjadi faktor penting dalam mendorong pengelolaan pariwisata yang berbasis komunitas dan berkelanjutan.
- berkembangnya usaha ekonomi kreatif yang mendukung aktivitas pariwisata, seperti kerajinan, kuliner lokal, serta berbagai produk kreatif yang dapat meningkatkan daya tarik dan pengalaman wisata.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut sekaligus memanfaatkan potensi yang ada, Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan berbagai strategi penataan destinasi wisata pada tahun 2025, antara lain melalui penataan DTW kawasan luar Pura Uluwatu serta penataan Pantai Jimbaran sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan. Selain itu, dilakukan pula penataan dan penguatan desa



wisata, seperti Desa Wisata Belok Sidan, Bongkasa, Kuwum, Carangsari, Kapal, Munggu, Pangsan, Penarungan, dan Sulangai, guna mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal.

Ke depan, upaya perbaikan akan terus dilaksanakan melalui penataan dan pengembangan beberapa daya tarik wisata baru maupun penguatan destinasi yang sudah ada, seperti penataan DTW Air Terjun Goa Gong Sulangai, Pantai Pererenan, Pantai Batu Pageh, serta kawasan luar Pura Uluwatu. Selain itu, pengembangan desa wisata juga akan diperluas melalui penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Kapal, Munggu, Petang, dan Pangsan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata sekaligus memperkuat integrasi antara sektor pariwisata dengan potensi lokal, termasuk sektor pertanian dan ekonomi kreatif masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata di Kabupaten Badung dapat semakin optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata yang berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Berikut beberapa dokumentasi penghargaan dan kegiatan yang mendukung capaian Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.

1. Nominasi Bali Prosperity Village Award (ITMW) 2025 diberikan kepada Desa Wisata Sangeh





2. Juara Harapan I Bali Cultural Peace Village Award (ITMW) 2025 diberikan kepada Desa Wisata Cemagi kategori Ekowisata



3. Kegiatan Program Pemasaran Pariwisata Bali Beyond Travel Fair (BBTF) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Hotel Westin Nusa Dua kegiatan ini mempertemukan seller dan buyer di bidang pariwisata





4. Kegiatan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Penataan Daya Tarik Pantai Jimbaran



3.2.17 Indikator Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam

Sebagai daerah dengan struktur perekonomian yang terus berkembang dan tekanan pembangunan yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam, sehingga aktivitas pengolahan hasil pertanian tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

engembangan agroindustri berbasis pelestarian sumber daya alam menjadi penting karena sektor ini berperan sebagai penghubung antara kegiatan produksi pertanian di tingkat hulu dengan proses pengolahan di tingkat hilir. Melalui pengembangan agroindustri yang ramah lingkungan, diharapkan dapat tercipta sistem produksi yang efisien, berdaya saing, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal tanpa mengabaikan aspek konservasi. Hal ini sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah.



Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan indikator Persentase Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam sebagai salah satu ukuran kinerja untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah mendorong tumbuhnya unit agroindustri yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Grafik 3.20
Target dan Capaian Persentase Pengembangan Agroindustri
yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam
Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja indikator Persentase Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam selama periode tahun 2022–2025, menunjukkan tren kinerja yang sangat positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar 31,37% berhasil direalisasikan sebesar 43,33%, atau melampaui target sebesar 11,96 poin persentase. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengembangan agroindustri telah berjalan cukup efektif pada tahap awal implementasi. Selanjutnya pada tahun 2023, target meningkat menjadi 31,67% dan realisasi



juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 49,08%, dengan selisih capaian sebesar 17,41 poin persentase di atas target. Hal ini mencerminkan adanya penguatan intervensi program serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan agroindustri berkelanjutan.

Tren positif tersebut terus berlanjut pada tahun 2024, dimana target sebesar 31,83% mampu dilampaui dengan realisasi sebesar 50,33%, atau lebih tinggi 18,50 poin persentase. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan, fasilitasi, serta pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah semakin memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. Pada tahun 2025, target kembali mengalami kenaikan menjadi 31,98%, dengan capaian realisasi sebesar 53,33%, atau melampaui target sebesar 21,35 poin persentase. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir dan menunjukkan kinerja yang semakin optimal.

Untuk mewujudkan Indikator Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam tahun 2025 didukung oleh 3 program, meliputi: Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 68.163.461.155,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.833.860.617,00 sehingga serapan anggaran sebesar 70,18%.

Capaian indikator Persentase Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang bersifat internal maupun eksternal pada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dari sisi faktor penghambat, yaitu :

- masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, masih terbatasnya kemampuan pelaku IKM dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami prosedur perizinan berbasis elektronik sehingga proses legalisasi usaha belum optimal.



- keterbatasan sarana dan prasarana produksi yang dimiliki oleh pelaku IKM turut mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.
- kemampuan pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas produksi masih relatif terbatas sehingga masih diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif agar proses produksi dapat memenuhi standar kualitas sekaligus mendukung praktik usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang turut mendorong pengembangan agroindustri di Kabupaten Badung, diantaranya :

- Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan Mall Pelayanan Publik yang berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses perolehan legalitas usaha bagi pelaku IKM.
- pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana produksi melalui bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2025 guna meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agroindustri.
- Dukungan kebijakan juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kapasitas pelaku IKM.

Menindaklanjuti berbagai kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. Upaya tersebut antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku IKM, fasilitasi proses perizinan dan pengawasan legalitas usaha, serta pembinaan dan pengembangan kapasitas pelaku IKM agar mampu meningkatkan kualitas produksi dan daya saing produk. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pelaku agroindustri di Kabupaten Badung dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta tetap menjaga kelestarian



sumber daya alam sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan di daerah. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung agroindustri di Kabupaten Badung.

1. Pembinaan ke IKM Ancak Saji Bali, Br. Cabe, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal



2. Pameran Inacraft bulan Pebruari Tahun 2025 dengan mengajak 10 IKM





3. Pameran IKM di Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan menampilkan produk dari 5 IKM



4. Pameran Inacraft bulan Oktober dengan mengajak 6 IKM



3.2.18 Indikator Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)

Dalam kerangka evaluasi kinerja pembangunan daerah, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan perekonomian daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian adalah Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Indikator ini memberikan gambaran mengenai kemampuan usaha pertanian dalam



menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi dan penambahan barang modal.

Secara konseptual, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk biaya produksi dan penambahan barang modal (Ib). Dengan demikian, NTUP mencerminkan tingkat keuntungan usaha pertanian. Apabila nilai NTUP lebih besar dari 100, maka usaha pertanian dinilai memberikan keuntungan karena pendapatan yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Sebaliknya, NTUP di bawah 100 menunjukkan bahwa usaha pertanian mengalami tekanan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh.

Penggunaan indikator NTUP dalam pengukuran kinerja pembangunan pertanian telah menjadi standar nasional yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Metodologi penghitungan indikator ini mengacu pada konsep statistik resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Tukar Petani yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2023 tentang Statistik Nilai Tukar Petani. Selain itu, penguatan sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan petani melalui perlindungan usaha tani dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.



Grafik 3.21
Target dan Capaian NTUP di Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data target dan capaian indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa kinerja sektor usaha pertanian menunjukkan tren yang positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Badung relatif mampu menghasilkan nilai ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Pada Tahun 2022, target NTUP ditetapkan sebesar 92,73, sementara realisasi capaian mencapai 111,87. Dengan demikian terdapat selisih capaian sebesar 19,14 poin di atas target. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh petani dari kegiatan usaha pertanian mampu menutupi biaya produksi dan bahkan memberikan surplus yang cukup signifikan.

Pada Tahun 2023, target NTUP meningkat menjadi 94,73 dan realisasinya kembali melampaui target dengan capaian 114,52. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja usaha pertanian sebesar 2,65 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sekaligus memperlihatkan bahwa



kebijakan dan program pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tetap mampu menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha pertanian.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target NTUP kembali ditingkatkan menjadi 100, yang mencerminkan ekspektasi bahwa usaha pertanian minimal berada pada kondisi break even point antara penerimaan dan biaya produksi. Realisasi capaian pada tahun tersebut mencapai 117,97, atau 17,97 poin di atas target, yang menunjukkan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Badung tetap berada pada kondisi yang menguntungkan bagi petani.

Pada Tahun 2025, target NTUP kembali dinaikkan menjadi 101 sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan petani secara bertahap dan berkelanjutan. Realisasi capaian pada tahun 2025 mencapai 118,15, yang berarti 17,15 poin di atas target. Capaian ini juga menunjukkan adanya tren peningkatan yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menggambarkan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Badung masih mampu mempertahankan tingkat keuntungan yang baik.

Secara keseluruhan, selama periode 2022–2025, capaian NTUP Kabupaten Badung selalu berada pada kisaran di atas 111, yang menunjukkan bahwa pendapatan usaha pertanian secara konsisten lebih tinggi dibandingkan biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Badung memiliki daya tahan ekonomi yang cukup baik, serta didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah seperti peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penguatan akses sarana produksi pertanian, serta dukungan terhadap pemasaran hasil pertanian.



Tabel 3.13

Distribusi Luas Sawah, Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025

NO	TAHUN	LUAS SAWAH	LUAS AREAL TANAM	PRODUKSI TANAMAN PANGAN
1	2022	-	18.640,00	122.291,04
2	2023	9.023,38	15.677,00	112.099,41
3	2024	8.689,49	18.066,95	118.489,29
4	2025	8.394,70	14.211,43	105.608,92

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data luas sawah, luas areal tanam, dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Badung selama periode 2022–2025, terlihat adanya dinamika perkembangan sektor pertanian yang turut mempengaruhi kinerja Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebagai indikator kesejahteraan usaha tani.

Pada Tahun 2022, produksi tanaman pangan tercatat sebesar 122.291,04 ton dengan luas areal tanam mencapai 18.640,00 hektare. Meskipun data luas sawah pada tahun tersebut tidak tersedia pada tabel, tingginya produksi tanaman pangan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki tingkat produktivitas yang cukup baik. Kondisi ini berkontribusi terhadap capaian NTUP sebesar 111,87, yang menunjukkan bahwa penerimaan petani dari hasil usaha pertanian mampu melampaui biaya produksi yang dikeluarkan.

Memasuki Tahun 2023, luas sawah tercatat sebesar 9.023,38 hektare dengan luas areal tanam sebesar 15.677,00 hektare, serta produksi tanaman pangan sebesar 112.099,41 ton. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi tanaman pangan mengalami penurunan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola tanam, kondisi iklim, maupun konversi lahan. Namun demikian, capaian NTUP pada tahun 2023 tetap meningkat menjadi 114,52, yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan



produksi secara agregat, nilai ekonomi hasil pertanian yang diterima petani masih mampu memberikan keuntungan usaha yang lebih baik.

Pada Tahun 2024, luas sawah tercatat sebesar 8.689,49 hektare dengan luas areal tanam meningkat menjadi 18.066,95 hektare. Produksi tanaman pangan juga mengalami peningkatan menjadi 118.489,29 ton. Peningkatan produksi tersebut mencerminkan adanya perbaikan produktivitas atau optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Kondisi ini sejalan dengan capaian NTUP sebesar 117,97, yang menunjukkan bahwa usaha pertanian semakin memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani di Kabupaten Badung.

Selanjutnya pada Tahun 2025, luas sawah tercatat sebesar 8.394,70 hektare dengan luas areal tanam sebesar 14.211,43 hektare, sementara produksi tanaman pangan tercatat sebesar 105.608,92 ton. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan luas lahan dan produksi tanaman pangan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, perubahan pola tanam, maupun faktor lingkungan dan iklim. Meskipun demikian, capaian NTUP Kabupaten Badung pada tahun 2025 tetap berada pada angka yang tinggi yaitu sebesar 118,15, yang menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian masih mampu memberikan tingkat keuntungan yang baik bagi petani.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kecenderungan penurunan luas sawah dan fluktuasi produksi tanaman pangan, capaian NTUP Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 tetap menunjukkan tren yang positif dan berada jauh di atas angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pertanian di Kabupaten Badung masih memiliki daya saing ekonomi yang cukup kuat, yang dapat dipengaruhi oleh faktor harga komoditas yang relatif baik, efisiensi biaya produksi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian.

Dengan demikian, keterkaitan antara data produksi tanaman pangan dengan capaian NTUP menunjukkan bahwa kesejahteraan usaha tani tidak hanya ditentukan oleh volume produksi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai ekonomi komoditas pertanian, efisiensi biaya produksi, serta akses pasar



bagi petani. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas pertanian, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, serta penguatan nilai tambah hasil pertanian tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan capaian NTUP Kabupaten Badung pada tahun-tahun mendatang.

Untuk meningkatkan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada tahun 2025 didukung oleh 9 program, meliputi: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 40.334.445.132,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.233.196.399,00 sehingga serapan anggaran sebesar 82,39%.

Berdasarkan identifikasi kondisi sektor pertanian di Kabupaten Badung, terdapat sejumlah faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja usaha pertanian, yang pada akhirnya turut berdampak terhadap capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Analisis terhadap faktor-faktor tersebut penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan perbaikan ke depan. Faktor penghambat yaitu :

- keterbatasan tenaga Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang hingga saat ini belum sebanding dengan luas wilayah kerja serta kompleksitas permasalahan hama dan penyakit tanaman yang dihadapi di lapangan. Kondisi ini berpotensi menghambat kecepatan penanganan serangan hama dan penyakit yang dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan.
- sebagian besar kelembagaan petani masih menghadapi keterbatasan kapasitas manajerial dan administrasi, sehingga pengelolaan usaha tani belum sepenuhnya dilakukan secara profesional dan efisien. Keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan kelompok tani dalam mengakses



informasi pasar, teknologi pertanian, maupun program dukungan pemerintah.

- serangan hama dan penyakit tanaman yang secara langsung dapat mengancam produktivitas pertanian. Di samping itu, kondisi alam yang tidak menentu, seperti kekeringan, banjir, serta dampak perubahan iklim, juga berpotensi menurunkan hasil panen dan meningkatkan risiko usaha pertanian.
- alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman maupun industri juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin terbatasnya lahan pertanian produktif di Kabupaten Badung. Kondisi ini berpotensi menurunkan kapasitas produksi sektor pertanian apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- petani juga masih menghadapi keterbatasan akses pasar, baik dalam hal informasi harga maupun rantai distribusi hasil pertanian. Keterbatasan ini menyebabkan posisi tawar petani dalam sistem perdagangan hasil pertanian menjadi relatif lebih lemah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan usaha pertanian.

Namun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah faktor pendukung yang mampu memperkuat keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Badung, yaitu :

- pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan drone pertanian yang membantu petani dalam melakukan pemantauan lahan serta penyemprotan pupuk dan pestisida secara lebih efisien. Inovasi teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan serta mengurangi biaya operasional usaha tani.
- dukungan kebijakan pemerintah, baik melalui program subsidi, bantuan sarana produksi, maupun kegiatan penyuluhan pertanian, juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas petani serta memperkuat keberhasilan kegiatan pertanian di daerah.
- terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara petani, pemerintah daerah, serta berbagai pihak pendukung lainnya, yang menciptakan sinergi dalam pengembangan sektor pertanian. Sinergi



tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian.

- Kabupaten Badung juga memiliki keanekaragaman komoditas pangan yang cukup melimpah, yang menjadi potensi strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung telah dan akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan sektor pertanian. Upaya tersebut antara lain :

- melalui pembentukan Tim URC (Unit Reaksi Cepat) untuk membantu petani dalam menangani permasalahan mendesak seperti serangan hama dan kendala teknis lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan pembinaan melalui pelatihan manajemen, administrasi, serta penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani.
- pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta penguatan akses pasar melalui promosi produk pertanian lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong modernisasi pertanian, peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, embung, dan sarana pascapanen, serta pengembangan nilai tambah produk pertanian melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian.
- peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian juga menjadi perhatian melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan, dan regenerasi petani guna mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Berbagai kebijakan dukungan seperti subsidi dan asuransi pertanian juga terus dioptimalkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi petani.

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Badung dapat semakin tangguh dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani yang tercermin dalam capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang tetap berada pada kondisi menguntungkan. Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung Indikator NTUP di Kabupaten Badung.



1. Badung Promo Tani



2. Bantuan Pengembagan Jagung





3. Bantuan alat mesin pertanian



4. Pengembangan Pertanian Hidroponik





2.3.19 Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan merupakan indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan atau daya beli nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta kemampuan mereka dalam membiayai kegiatan usaha penangkapan atau budidaya perikanan. Secara konseptual, NTN menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan atas hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar nelayan, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi usaha perikanan. Dengan demikian, peningkatan nilai NTN mencerminkan membaiknya tingkat kesejahteraan nelayan, sedangkan penurunan NTN dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan.

Pengukuran Nilai Tukar Nelayan juga memiliki landasan regulatif yang kuat dalam kerangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Secara umum, indikator ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai kebijakan perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu, pengukuran NTN juga mengacu pada metodologi statistik yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator resmi untuk memantau kondisi ekonomi rumah tangga nelayan.

Dalam konteks pembangunan daerah, indikator Nilai Tukar Nelayan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan, stabilitas harga hasil perikanan, serta pengendalian biaya produksi usaha nelayan. Oleh karena itu, analisis terhadap capaian indikator ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2025 telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.



Grafik 3.22

Target dan Capaian Indikator Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan grafik capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa kinerja indikator ini menunjukkan tren yang positif serta secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Badung secara umum berada pada kondisi yang baik, ditunjukkan oleh kemampuan daya beli nelayan yang relatif meningkat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kegiatan usaha perikanan.

Pada tahun 2022, target Nilai Tukar Nelayan ditetapkan sebesar 100,30, sedangkan realisasi capaian kinerja mencapai 103,88. Capaian tersebut menunjukkan bahwa NTN telah berada di atas angka 100, yang berarti indeks harga yang diterima nelayan lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayar nelayan, sehingga secara umum kondisi ekonomi rumah tangga nelayan berada pada tingkat yang cukup baik.

Selanjutnya pada tahun 2023, target NTN meningkat menjadi 100,40, dengan capaian kinerja sebesar 125,25. Realisasi ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang



mengindikasikan adanya perbaikan dalam nilai ekonomi hasil perikanan serta meningkatnya produktivitas usaha perikanan yang dijalankan oleh nelayan.

Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 100,50, dengan realisasi sebesar 116,72. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun 2023, namun nilai tersebut tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena masih berada jauh di atas target yang ditetapkan, sehingga menggambarkan kondisi kesejahteraan nelayan yang tetap stabil.

Sementara itu pada tahun 2025, target NTN ditetapkan sebesar 100,60, dengan capaian kinerja mencapai 133,72. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan di Kabupaten Badung terus mengalami perbaikan.

Secara keseluruhan, capaian Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan adanya perbaikan pada aspek produktivitas usaha perikanan, stabilitas harga hasil perikanan, serta efisiensi biaya operasional usaha nelayan, sehingga mampu meningkatkan daya beli serta ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Badung.

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2025

Wilayah	Nilai NTN 2025 (kisaran)	Keterangan
Indonesia (nasional)	±103–104	Kondisi kesejahteraan nelayan relatif stabil
Provinsi Sulawesi Utara	sekitar 106–108 (awal 2025)	Mengalami fluktuasi bulanan namun tetap di atas 100 (BPS Sulawesi Utara)
Provinsi Bengkulu	sekitar 106 (awal 2025)	Menunjukkan daya beli nelayan cukup baik (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu)
Provinsi Kalimantan Utara	sekitar 99–100	Mendekati kondisi impas (stabil) (BPS Kalimantan Utara)

Sumber : Media elektronik



Jika dibandingkan dengan capaian Nilai Tukar Nelayan pada tingkat nasional yang pada tahun 2025 berada pada kisaran 103–104 serta beberapa provinsi lain yang umumnya berada pada rentang 100–110, capaian Kabupaten Badung sebesar 133,72 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Badung relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah dalam mendorong produktivitas usaha perikanan, menjaga stabilitas harga hasil perikanan, serta meningkatkan efisiensi biaya operasional nelayan.

Untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2025 didukung oleh 4 program, meliputi: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.992.368.547,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.203.137.677,00 sehingga serapan anggaran sebesar 84,50%.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi sektor perikanan di Kabupaten Badung, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi capaian kinerja, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan nelayan yang tercermin melalui indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

a. faktor penghambat

- kondisi cuaca ekstrem, gelombang laut yang tinggi, serta anomali musim yang dapat mengurangi jumlah hari melaut nelayan. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada menurunnya intensitas kegiatan penangkapan ikan dan berpotensi mempengaruhi pendapatan nelayan.
- alih fungsi lahan pesisir dan lahan basah menjadi kawasan pariwisata maupun permukiman juga menjadi tantangan tersendiri, karena mengakibatkan berkurangnya area yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perikanan.



- rendahnya minat generasi muda untuk menekuni profesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan, yang dalam jangka panjang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan sektor perikanan daerah.

b. faktor pendukung

- program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) serta dukungan terhadap program prioritas penanganan stunting, yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan terhadap produk perikanan dan menjamin penyerapan hasil tangkapan nelayan di pasar lokal.
- pengembangan teknologi budidaya perikanan secara intensif pada lahan terbatas juga menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan budidaya akibat alih fungsi lahan.
- komitmen Pemerintah Kabupaten Badung melalui dukungan APBD dalam bentuk bantuan modal, penyediaan alat tangkap, serta pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha perikanan.

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan tersebut sekaligus mengoptimalkan faktor pendukung yang ada, Pemerintah Kabupaten Badung telah dan akan terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan kinerja secara terarah. Upaya tersebut antara lain melalui pemberian bantuan mesin motor tempel dan alat tangkap kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan guna meningkatkan efektivitas kegiatan penangkapan ikan. Selain itu, dilakukan pula pelatihan teknis budidaya ikan serta perbaikan mesin motor tempel bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi operasional usaha perikanan.

Upaya lainnya adalah penguatan fungsi Balai Benih Ikan (BBI) milik daerah guna menjamin ketersediaan benih ikan unggul bagi para pembudidaya lokal sehingga dapat meningkatkan produktivitas budidaya perikanan. Di samping itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem jejaring informasi mitigasi bencana laut serta deteksi dini terhadap potensi cuaca ekstrem, sehingga nelayan dapat memperoleh informasi yang



akurat dan tepat waktu sebagai dasar dalam mengambil keputusan saat melaut, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan kerja nelayan.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan sektor perikanan di Kabupaten Badung dapat terus berkembang secara berkelanjutan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara adaptif, responsif, dan berbasis pada peningkatan kinerja pelayanan publik. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Badung.

1. Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap



2. Pelaksanaan Program Gemar Ikan





3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya



4. Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan



3.2.20 Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan peran sektor pariwisata dalam struktur perekonomian daerah. Bagi Kabupaten Badung, sektor pariwisata memiliki posisi yang sangat vital karena menjadi motor penggerak utama aktivitas ekonomi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, jasa, serta usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran kontribusi sektor pariwisata



terhadap PDRB menjadi penting untuk menilai sejauh mana sektor ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengukuran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan kontribusi lapangan usaha yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata, khususnya pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor-sektor pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas kepariwisataan. Semakin besar kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB, maka semakin besar pula peran sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

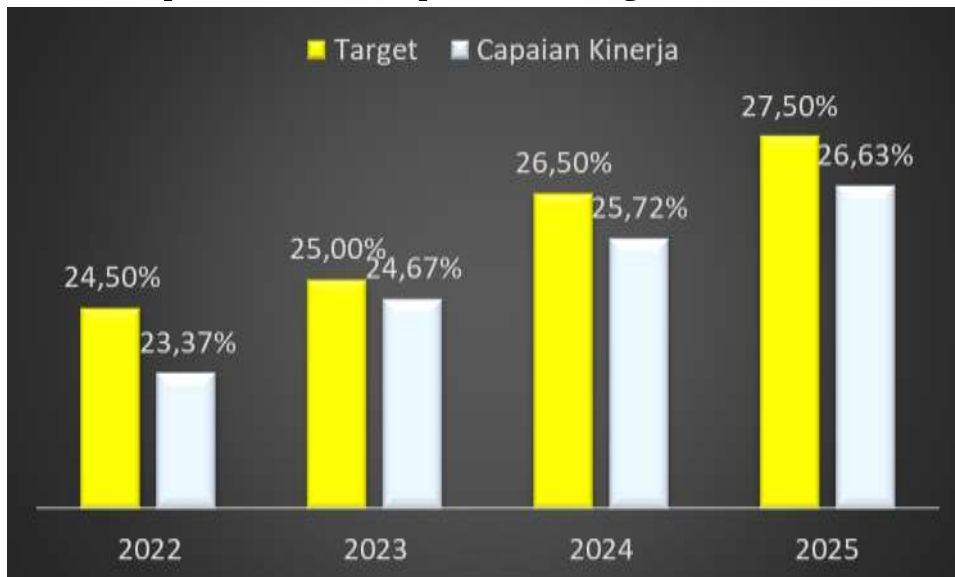
Secara regulatif, pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa pariwisata diselenggarakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, serta melestarikan alam, lingkungan, dan budaya. Selain itu, pengukuran indikator berbasis kontribusi sektor terhadap PDRB mengacu pada metodologi statistik yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha.

Pada tingkat daerah, arah pengembangan pariwisata juga sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang berorientasi pada kualitas, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dengan demikian, indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB tidak hanya menggambarkan capaian kinerja ekonomi daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Grafik 3.23

Target dan Capaian Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data pada grafik capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun pada beberapa tahun capaian masih berada sedikit di bawah target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ditetapkan sebesar 24,50%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 23,37% atau sekitar 95,39% dari target. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada periode tersebut sektor pariwisata masih berada dalam fase pemulihan pasca-pandemi, dimana aktivitas wisata, tingkat kunjungan wisatawan, serta okupansi usaha pariwisata belum sepenuhnya kembali pada kondisi normal.

Memasuki tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata menunjukkan perbaikan kinerja, dengan capaian sebesar 24,67% dari target 25,00%, atau sekitar 98,68% dari target. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Badung mulai mengalami rebound yang signifikan, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi, makan minum, dan jasa pariwisata lainnya.



Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024, dimana capaian kontribusi sektor pariwisata mencapai 25,72% dari target 26,50%, atau sekitar 97,06% dari target. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya peran sektor pariwisata dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, didukung oleh meningkatnya mobilitas wisatawan, penyelenggaraan berbagai event pariwisata, serta pemulihan kinerja industri pariwisata secara bertahap.

Pada tahun 2025, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 26,63%, mendekati target yang ditetapkan yaitu 27,50% atau sekitar 96,84% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi sektor unggulan dan kontributor utama terhadap struktur perekonomian Kabupaten Badung, sekaligus memperlihatkan adanya konsistensi pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata selama empat tahun terakhir.

Secara keseluruhan, meskipun capaian indikator belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya, namun tren peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menunjukkan kinerja yang positif dan stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan cukup efektif dalam mendorong pemulihan dan penguatan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Ke depan, upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB perlu terus diperkuat melalui pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan daya tarik wisata, penguatan ekosistem industri pariwisata, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan struktur ekonomi Provinsi Bali, dimana sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sekitar 21–23 persen terhadap PDRB, maka capaian Kabupaten Badung sebesar 26,63 persen menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang lebih



dominan dalam pembentukan PDRB daerah. Kondisi ini mempertegas posisi Kabupaten Badung sebagai pusat aktivitas pariwisata di Provinsi Bali yang ditopang oleh keberadaan kawasan pariwisata internasional seperti Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, dan Canggu.

Tabel 3.15
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Badung
Tahun 2025

NO	TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN	
		DOMESTIK	MANCANEGERA
1	2022	1.573.429 orang	2.212.789 orang
2	2023	1.911.765 orang	5.386.878 orang
3	2024	2.130.159 orang	6.438.123 orang
4	2025	1.630.687 orang	7.153.893 orang

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Badung Tahun 2025

Jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.573.429 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.911.765 orang, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2.130.159 orang. Namun pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan domestik tercatat 1.630.687 orang, yang menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 2.212.789 orang pada tahun 2022, meningkat menjadi 5.386.878 orang pada tahun 2023, kemudian 6.438.123 orang pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 7.153.893 orang pada tahun 2025.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi sektor pariwisata, khususnya pada subsektor penyediaan akomodasi, restoran, transportasi wisata, serta berbagai usaha jasa pariwisata lainnya. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap peningkatan Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung, dimana pada tahun 2025 capaian indikator tercatat



sebesar 26,63%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan peran sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Badung.

Untuk mewujudkan indikator meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program, yaitu: Program Pemasaran pariwisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.645.335.153,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.124.767.425,00 sehingga serapan anggaran sebesar 42,52%.

Berdasarkan identifikasi faktor yang mempengaruhi capaian Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2025, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja sektor pariwisata, serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah.

Dari sisi faktor penghambat, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sektor pariwisata, sebagai berikut :

- strategi promosi dan pemasaran pariwisata melalui media digital maupun platform online masih perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas serta memperkuat positioning destinasi wisata Kabupaten Badung di pasar global. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin penting mengingat tren perilaku wisatawan yang semakin mengandalkan informasi melalui platform digital dalam menentukan pilihan destinasi wisata.
- pangsa pasar pariwisata juga dinilai belum tergarap secara optimal, dimana identifikasi serta penetrasi terhadap segmen pasar wisatawan potensial, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh dan terarah. Kondisi ini berpotensi membatasi peluang peningkatan kunjungan wisatawan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah.

Namun demikian, capaian kinerja sektor pariwisata Kabupaten Badung juga didukung oleh beberapa faktor pendukung yang cukup kuat, yaitu :



- kualitas layanan usaha pariwisata yang relatif baik, yang tercermin dari tersedianya berbagai fasilitas dan layanan dari pelaku usaha pariwisata yang telah memenuhi standar kualitas pelayanan.
- kondisi keamanan dan kenyamanan wilayah yang kondusif turut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Badung. Stabilitas keamanan serta dukungan lingkungan yang aman dan nyaman memberikan pengalaman wisata yang positif bagi wisatawan, sehingga dapat mendorong peningkatan kunjungan dan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata.

Dalam rangka mengoptimalkan capaian indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah melaksanakan berbagai strategi penguatan sektor pariwisata pada tahun 2025. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui kegiatan pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata Kabupaten Badung, publikasi promosi melalui media cetak dan media elektronik untuk memperluas jangkauan informasi pariwisata, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha industri pariwisata guna menjaga kualitas layanan serta meningkatkan standar pelayanan kepada wisatawan.

Ke depan, untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara lebih optimal, beberapa upaya perbaikan strategis perlu terus diperkuat. Di antaranya adalah peningkatan strategi pemasaran pariwisata melalui media digital dan platform online agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan analisis pasar yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi dan menyasar segmen pasar wisatawan potensial secara lebih efektif. Upaya lainnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Pariwisata (SITA) sebagai sarana pendukung pengelolaan data, promosi, dan penguatan tata kelola sektor pariwisata secara lebih terintegrasi.

Melalui penguatan strategi promosi, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor pariwisata, diharapkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung dapat terus



meningkat dan semakin memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Badung.

Kegiatan Program Pemasaran Pariwisata Post Tour Badung 2025



3.2.21 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas lingkungan secara komprehensif pada suatu wilayah. Indikator ini menjadi alat ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam



menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung, pengukuran IKLH tidak hanya mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang ada, tetapi juga menjadi parameter kinerja dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Secara konseptual, IKLH merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Ketiga komponen tersebut menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, dinamika sektor pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah. Oleh karena itu, pencapaian nilai IKLH menjadi refleksi dari efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pengukuran dan pelaporan IKLH juga memiliki landasan regulasi yang jelas pada tingkat nasional. Secara normatif, pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, metode perhitungan dan penyusunan IKLH secara teknis mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup beserta pembaruan metodologinya yang digunakan dalam pengukuran IKLH di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejalan dengan kerangka regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung secara konsisten melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program pengelolaan lingkungan, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta penguatan



partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Capaian nilai IKLH Kabupaten Badung pada tahun 2025 selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.

Grafik 3.24
Target dan Capaian IKLH Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten serta selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan daerah.

Pada tahun 2022, target IKLH ditetapkan sebesar 61,55, sementara realisasi capaian mencapai 67,12. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun tersebut melampaui target sebesar 5,57 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah,



serta perlindungan sumber daya alam telah mampu memberikan hasil yang lebih baik dari perencanaan yang ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2023, target IKLH mengalami sedikit peningkatan menjadi 61,64, sedangkan capaian kinerja meningkat menjadi 69,06. Realisasi ini berarti melampaui target sebesar 7,42 poin, sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa berbagai program pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif, termasuk penguatan pengawasan kualitas lingkungan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2024, target IKLH kembali meningkat menjadi 61,72, dengan capaian kinerja sebesar 69,44. Realisasi tersebut melampaui target sebesar 7,72 poin dan menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan yang tetap terjaga secara berkelanjutan. Stabilitas peningkatan capaian ini menggambarkan bahwa pengelolaan kualitas udara, kualitas air, serta pengendalian pemanfaatan lahan di Kabupaten Badung tetap berada dalam kondisi yang baik.

Adapun pada tahun 2025, target IKLH ditetapkan sebesar 61,81, sedangkan realisasi capaian meningkat signifikan menjadi 70,98. Dengan demikian, capaian kinerja melampaui target sebesar 9,17 poin, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menjaga kualitas lingkungan hidup semakin kuat, sejalan dengan upaya pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

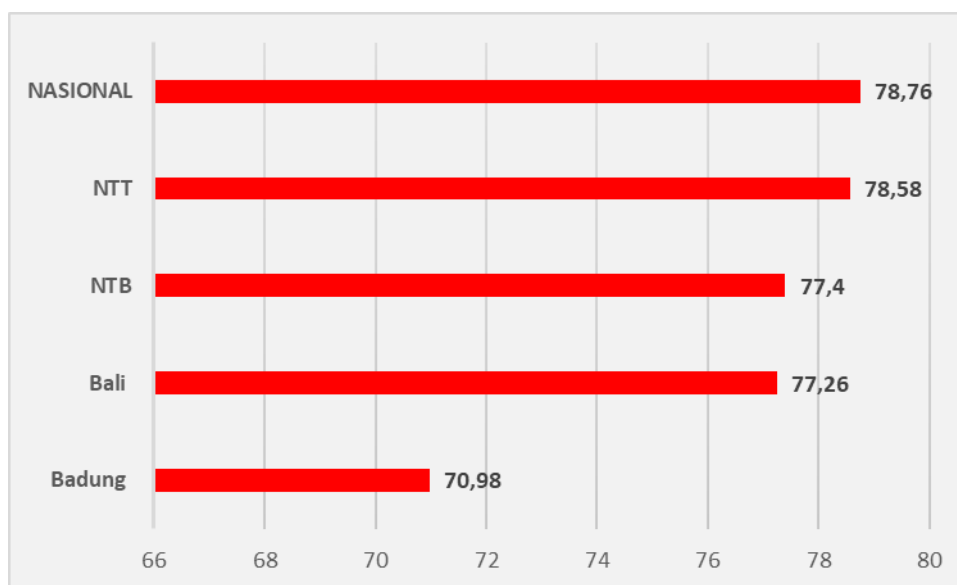
Secara keseluruhan, capaian IKLH Kabupaten Badung selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 67,12 pada tahun 2022 menjadi 70,98 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk melalui program pengendalian pencemaran lingkungan,



pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung berada dalam kondisi yang baik dan terus mengalami perbaikan, sehingga mendukung terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup akan terus diperkuat melalui berbagai kebijakan dan inovasi pengelolaan lingkungan yang adaptif, sehingga capaian IKLH dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Grafik 3.25
Perbandingan capaian IKLH dengan daerah lainnya
Tahun 2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025, capaian IKLH Kabupaten Badung tercatat sebesar 70,98. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung berada pada kategori baik, namun masih berada di bawah rata-rata capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Bali, yang mencapai 77,26, nilai IKLH Kabupaten Badung masih lebih rendah dengan selisih sekitar 6,28



poin. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian wilayah provinsi lain di kawasan yang sama, seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (77,40) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (78,58), capaian IKLH Kabupaten Badung masih berada di bawah nilai tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 78,76, capaian Kabupaten Badung memiliki selisih sekitar 7,78 poin.

Perbedaan capaian ini dapat dipahami mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Badung yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta intensitas kegiatan pariwisata yang sangat tinggi dibandingkan banyak daerah lainnya. Tingginya mobilitas penduduk dan wisatawan, perkembangan kawasan permukiman dan pariwisata, serta tekanan terhadap sumber daya lingkungan berpotensi mempengaruhi kualitas udara, kualitas air, maupun kondisi tutupan lahan yang merupakan komponen utama penyusun IKLH.

Meskipun demikian, capaian nilai 70,98 tetap menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung masih berada dalam kondisi baik dan terkendali, serta mencerminkan bahwa berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah berjalan secara efektif. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya alam, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas kualitas lingkungan hidup di daerah.

Untuk mewujudkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 didukung oleh 5 program, yaitu: Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Dan Program Pengelolaan Persampahan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 280.686.427.872,00 dengan realisasi sebesar Rp 171.201.964.494,00 sehingga serapan anggaran sebesar 60,99%.



Dapat diketahui bahwa keberhasilan pencapaian kinerja masih dipengaruhi oleh berbagai dinamika baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun kondisi sosial masyarakat. Dari sisi faktor penghambat, sebagai berikut :

- keterbatasan koordinasi antar pihak, sarana dan prasarana, serta dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi pengawas lingkungan, sehingga mempengaruhi optimalisasi pengawasan terhadap kegiatan usaha dan pengelolaan lingkungan.
- belum optimalnya sistem pendataan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat desa, yang menyebabkan informasi kegiatan lingkungan belum terdokumentasi secara baik.
- peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Badung turut memberikan tekanan terhadap lingkungan, khususnya melalui peningkatan volume dan jenis timbulan sampah, termasuk sampah plastik serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan rumah tangga maupun usaha. Kondisi ini diperkuat dengan masih adanya masyarakat serta pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan limbah B3 secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- peningkatan timbulan sampah per kapita masyarakat yang meningkat dari 0,57 kg/orang/hari pada tahun 2021 menjadi 0,91 kg/orang/hari pada tahun 2025 juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Meskipun demikian, terdapat berbagai faktor pendukung yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung. Faktor tersebut antara lain:

- dukungan pimpinan daerah, ketersediaan anggaran, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan.



- kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan juga mulai meningkat, yang menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
- adanya pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan tenaga teknis yang kompeten dan bersertifikat dalam proses persetujuan lingkungan, serta keberadaan Komisi Penilai AMDAL yang telah memiliki lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga telah mengoperasikan Pusat Daur Ulang (PDU) dengan kapasitas 10 ton per hari, serta mengoptimalkan TPS3R, TPST, dan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, yang didukung dengan penyediaan dana operasional serta pengembangan fasilitas pengolahan kompos.

Sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Badung telah dan akan melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui penguatan perencanaan yang selaras dengan RPJMD, penetapan indikator kinerja yang terukur, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga terus dilakukan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Berikut dokumentasi penghargaan dan kegiatan yang mendukung indikator IKLH di Kabupaten Badung.



1. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Mandiri Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) Sekolah.



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan



3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)





3.2.22 Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Dalam kerangka pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing wilayah, Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya mendorong terciptanya ekosistem pembangunan yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kelembagaan dan infrastruktur pembangunan adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indikator ini menjadi penting karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi sumber daya secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

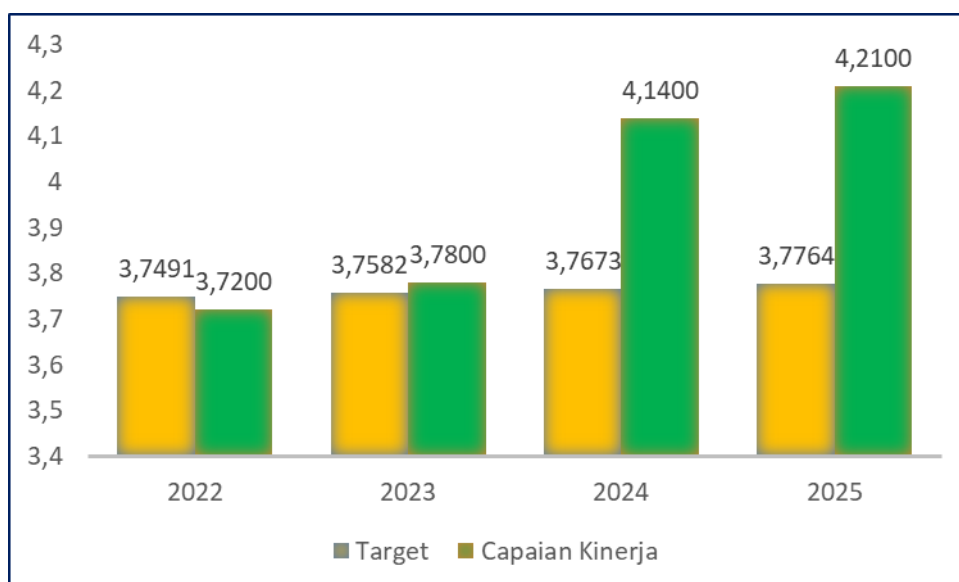
Secara konseptual, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat produktivitas suatu wilayah melalui berbagai dimensi pembangunan, meliputi aspek lingkungan penguat (enabling environment), sumber daya manusia, efisiensi pasar, serta ekosistem inovasi. Nilai IDSD mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat inovasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Pengukuran IDSD di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bagian dari instrumen evaluasi pembangunan daerah yang berbasis data dan evidence-based policy. Penghitungan indeks ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, yang menempatkan peningkatan daya saing daerah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Selain itu, penguatan inovasi dan daya saing daerah juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menekankan pentingnya riset, inovasi, dan pengembangan teknologi sebagai motor penggerak peningkatan produktivitas dan daya saing wilayah.



Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung menjadikan peningkatan daya saing daerah sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, serta penguatan ekosistem inovasi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 3.26
Target dan Capaian IDSD Kabupaten Badung
Tahun 2022-2025



Sumber : BRIDA Kab. Badung Tahun 2025

Berdasarkan data pada grafik capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Badung Tahun 2022–2025, terlihat adanya kecenderungan peningkatan kinerja yang relatif konsisten dan menunjukkan kinerja yang semakin baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, capaian IDSD Kabupaten Badung tercatat sebesar 3,7200, sedikit berada di bawah target yang ditetapkan yaitu 3,7491. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode awal pengukuran masih terdapat beberapa aspek daya saing daerah yang belum optimal, baik dari sisi penguatan ekosistem inovasi, efisiensi pasar, maupun faktor pendukung daya saing lainnya.



Memasuki tahun 2023, kinerja indikator mulai menunjukkan perbaikan. Capaian IDSD meningkat menjadi 3,7800 dan telah melampaui target sebesar 3,7582. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing wilayah, khususnya dalam penguatan iklim usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.

Peningkatan kinerja yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, dimana capaian IDSD mencapai 4,1400, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,7673. Capaian ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan daya saing daerah yang didukung oleh penguatan berbagai dimensi pembangunan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan aktivitas inovasi daerah yang mendorong produktivitas ekonomi.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, dimana capaian IDSD kembali meningkat menjadi 4,2100, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,7764. Kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mampu menjaga konsistensi peningkatan daya saing daerah melalui penguatan kebijakan pembangunan yang adaptif, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah terutama pada sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, tren capaian indikator selama periode 2022–2025 menunjukkan bahwa Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang signifikan dan secara konsisten melampaui target sejak tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi pembangunan daerah yang dilaksanakan telah mampu memperkuat ekosistem daya saing wilayah, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Dari perspektif evaluasi kinerja, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pembangunan daerah telah berjalan efektif dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Badung, sekaligus menjadi indikator



penting dalam memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Untuk meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2025 didukung oleh 18 program prioritas. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.510.015.912.635,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.507.166.088.019,00 dengan serapan anggaran sebesar 42,94%.

Beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) antara lain:

- Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor pariwisata yang cukup tinggi sehingga rentan terhadap dinamika global, seperti fluktuasi kunjungan wisatawan, kondisi ekonomi dunia, maupun faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
- Belum meratanya penguatan inovasi daerah dan hilirisasi hasil riset, sehingga kontribusi inovasi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah masih perlu dioptimalkan.
- Keterbatasan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia pada sektor tertentu, khususnya dalam penguasaan teknologi, ekonomi digital, dan kewirausahaan berbasis inovasi.
- Tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur wilayah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Badung yang memerlukan pengelolaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mendukung peningkatan daya saing daerah, yaitu:

- Struktur ekonomi daerah yang kuat dan didukung sektor pariwisata unggulan, yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di Kabupaten Badung.
- Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan konektivitas wilayah yang relatif baik, termasuk akses transportasi, fasilitas pariwisata, dan infrastruktur penunjang investasi.



- Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, yang mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM, yang mampu mendorong diversifikasi ekonomi daerah serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.
- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penguatan inovasi daerah, termasuk pengembangan riset, teknologi, dan digitalisasi pelayanan publik.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Daya Saing Daerah pada periode selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

- Mendorong diversifikasi struktur ekonomi daerah, melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, agroindustri, serta usaha berbasis teknologi dan inovasi guna mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
- Memperkuat ekosistem inovasi daerah, melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan riset serta inovasi daerah.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, guna mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta pengembangan kawasan strategis daerah.
- Memperkuat digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, guna meningkatkan efisiensi birokrasi serta menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan transparan.
- Mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi dapat tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.



Berikut beberapa dokumentasi yang mendukung Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Badung.

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi terkait Indeks Daya Saing Daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung



2. Presentasi Badung Festival Inovasi Tahun 2025 peserta Perguruan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Presentasi Badung Festival Inovasi Tahun 2025 peserta SMA/SMK





3. Rilis Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional



3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, alokasi anggaran menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, analisis realisasi anggaran dilakukan untuk melihat tingkat penyerapan anggaran serta kesesuaiannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Analisis ini memberikan gambaran mengenai optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.



Tabel 3.16
Sasaran Strategis, Jumlah Program, Pagu dan Realisasi Anggaran
Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indek kerukunan umat beragama	83 (Sangat Tinggi)	1	4.008.880.482,00	2.771.696.304,00	69,14
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	79,50 (BB)	5	5.356.845.825	3.324.234.044	62,06
		Opini BPK	WTP	5	2.132.641.257.811	1.588.849.137.111	74,50
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30 (Baik)	8	881.339.619.347	630.177.413.391	71,50
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,57 (Rendah)	2	9.623.970.899	7.199.896.791	74,81
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50 (Baik)	34	580.367.978.982	428.891.493.026	73,90



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90,00%	7	6.592.596.255	4.168.372.992	63,23
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	75,00 (Peduli HAM)	8	12.683.431.190	10.292.170.555	81,15
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	76,00%	11	673.891.522.173	537.323.862.634	79,73
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,63 (Sangat Tinggi)	8	1.538.587.543.973	952.845.445.201	61,93
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	8,00%	5	1.005.300.030	984.843.950	97,97
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	25,00%	3	22.478.811.058	17.643.512.133	78,49
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,48%	5	1.303.965.749	971.413.311	74,50
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	76,89	6	5.927.627.873	5.514.782.055	93,04



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	1,80%	4	396.299.377.222	366.126.918.473	92,39
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	7,69%	4	137.898.179.227	136.479.071.107	98,97
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	31,83%	3	68.163.461.155	47.833.860.617	70,18
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	100 (Impas)	9	40.334.445.132	33.233.196.399	82,39
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,50	4	17.992.368.547	15.203.137.677	84,50
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	26,50%	1	2.645.335.153	1.124.767.425	42,52



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU (Perbup No. 11 Tahun 2022)	TARGET	JML. PROGRAM	JML. PAGU ANGGARAN	JLM. REALISASI ANGGARAN	%
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,72 (Sedang)	5	280.686.427.872	171.201.964.494	60,99
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.7673 (Sangat Tinggi)	18	3.510.015.912.635	1.507.166.088.019	42,94
TOTAL				156	10.329.844.858.590	6.469.327.277.710	62,63



Berdasarkan Tabel 3.16 mengenai jumlah program, pagu, dan realisasi anggaran Kabupaten Badung Tahun 2025, secara keseluruhan pemerintah daerah melaksanakan 156 program/kegiatan yang mendukung pencapaian 19 sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja daerah. Total pagu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp10.329.844.858.590, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.469.327.277.710 atau 62,63% dari total pagu yang tersedia.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing sasaran strategis, tingkat penyerapan anggaran menunjukkan variasi yang cukup beragam. Beberapa sasaran strategis menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi. Di antaranya adalah peningkatan persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian dengan realisasi mencapai 98,97%, serta peningkatan persentase jumlah koperasi sehat yang mencapai 97,97%. Tingginya tingkat realisasi pada sasaran tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, sasaran strategis lain seperti menurunnya angka kemiskinan juga menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi yaitu 92,39%, serta peningkatan kebahagiaan masyarakat dengan realisasi 93,04%. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi pada sasaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan terukur.

Di sisi lain, terdapat beberapa sasaran strategis dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif lebih rendah. Salah satunya adalah meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah yang diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan realisasi sebesar 42,94%, serta peningkatan kontribusi sektor terhadap PDRB yang memiliki realisasi sekitar 42,52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran tersebut masih menghadapi beberapa kendala, baik terkait dinamika



pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan, maupun penyesuaian kebijakan selama tahun berjalan.

Sementara itu, beberapa sasaran strategis lainnya menunjukkan tingkat realisasi yang berada pada kategori menengah, antara lain peningkatan toleransi hidup beragama (69,14%), peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui nilai SAKIP (62,06%), peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas (73,90%), serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (60,99%). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berjalan, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi pelaksanaan agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal.

Secara umum, capaian realisasi anggaran Kabupaten Badung Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dengan tingkat penyerapan yang relatif rendah sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan program, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.



3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Efisien, jika hasil dari pengurangan persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase rata-rata capaian anggaran positif
- b. Tidak efisien, jika hasil dari pengurangan persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase rata-rata capaian anggaran negatif

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektivitas yaitu: Nilai positif berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus (negatif) berarti tidak efektif. Hasil Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :



Tabel 3.17
Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program
di Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perbup No. 11 Tahun 2022)	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEKTIVITAS	EFISIENSI
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indek kerukunan umat beragama	117	69	48	Efisien
2.	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	96	62	34	Efisien
		Opini BPK	Belum rilis	74	-	-
3.	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	131	71	60	Efisien
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	123	75	48	Efisien
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	103	74	29	Efisien



5.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	111	63	48	Efisien
6.	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	Tidak dilaksanakan bukti terlampir	81	-	-
7.	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	132	80	52	Efisien
8.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	103	62	41	Efisien
9.	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	604	98	506	Efisien
10.	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	145	78	67	Efisien
11.	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	230	74	156	Efisien
12.	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	101	93	8	Efisien



13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	107	92	15	Efisien
14.	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	100	99	1	Efisien
15.	Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	167	70	97	Efisien
16.	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	117	82	35	Efisien
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	134	84	50	Efisien
17.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	97	43	54	Efisien
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	115	61	54	Efisien
19.	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	111	43	68	Efisien
Total Kinerja			2.841	1.626	1.215	Efisien



3.5 Prestasi dan Penghargaan

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2025 mendapat 12 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 3.18
Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2025

Penghargaan	Dokumentasi
<p>Raih Penghargaan MPP dengan Kinerja Prima Tahun 2024</p> <p>13 Maret 2025 Dari MenPAN-RB</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Penghargaan Inovasi Pembangunan Terpuji dalam kategori Pengembangan Wisata</p> <p>Detik Bali Awards pada tanggal 22 Maret 2025</p>	
<p>Raih Juara Harapan I Desa Wisata Cemagi Kategori Ekowisata</p> <p>Trisaksi Tourism Award (Desa Wisata) Pada tanggal 8 Mei 2025</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Penghargaan Kalpataru Lestari Tahun 2025</p> <p>Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 pada tanggal 5 Juni 2025 diberikan oleh Menteri LH/BPLH RI</p>	
<p>Badung Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bupati Terima LHP BPK atas LKPD Badung 2024</p> <p>Oleh BPK RI pada tanggal 5 Juni 2025</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Penghargaan sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2025</p> <p>Diberikan oleh Kepala ANRI pada tanggal 26 Juni 2025</p>	
<p>Badung Raih Apresiasi Daerah Peduli Pengembangan UMKM pada HUT ke-14 KompasTV</p> <p>Diberikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia pada tanggal 11 September 2025</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Bupati Badung Menerima Penghargaan Apresiasi dalam Mencegah Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>Pada kegiatan Peluncuran Program Jaga Desa Bali 2025 di tanggal 11 September 2025 oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI.</p>	
<p>Kabupaten Badung Raih Penghargaan Praja Anindita Mahotamma dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025</p> <p>Pada Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025 diberikan oleh Gubernur Bali</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Penghargaan Pembentukan Posbankum</p> <p>Pada kegiatan Pos Bantuan Hukum tanggal 12 Desember 2025 diberikan oleh Menkum RI</p>	
<p>Bupati Badung Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2025</p> <p>Pada kegiatan Puncak Peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) tanggal 15 Januari 2026 diberikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)</p>	



Penghargaan	Dokumentasi
<p>Pemkab Badung Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI</p> <p>Kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 tanggal 29 Januari 2026 diberikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI</p>	



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja pada BAB III, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan berada pada jalur yang tepat (on track) dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021–2026.
2. Sebagian besar indikator kinerja utama telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi dalam pengendalian kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target maupun yang memiliki capaian sangat tinggi, sehingga mengindikasikan perlunya penajaman kualitas perencanaan dan penetapan target yang lebih realistis dan berbasis outcome.
3. Hasil pengukuran indikator sasaran sebanyak 22 indikator kinerja diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 18 indikator kinerja utama
 - b. Dibawah target (<100%) sebanyak 2 indikator kinerja utama
 - c. Capaian Kinerja belum rilis sebanyak 1 indikator kinerja utama
 - d. Tidak diukur sebanyak 1 indikator kinerja utama
4. Dari sisi tata kelola kinerja, capaian nilai SAKIP sebesar 76,82 (predikat BB) dengan tingkat capaian 96% dari target menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan cukup baik dan terintegrasi, meskipun masih diperlukan lompatan perbaikan untuk mencapai target optimal.
5. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Badung menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas



akuntabilitas, yang tercermin dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengelolaan data aset dan piutang daerah.

6. Dari sisi efisiensi dan efektivitas anggaran, sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, namun masih terdapat beberapa kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran yang belum optimal, sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.
7. Alokasi anggaran untuk program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025 sebesar Rp. 10.329.844.858.590,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.469.327.277.710,- sehingga persentase penyerapan sebesar 62,63%.
8. Secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 mencerminkan akuntabilitas yang baik, tren peningkatan kinerja yang konsisten, serta dukungan faktor internal yang cukup kuat, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan, integrasi sistem, serta kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

4.2 Upaya Perbaikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mendorong pencapaian target yang lebih optimal pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan beberapa upaya perbaikan strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan Kinerja
 - Melakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan dampak (impact), bukan hanya output.
 - Meningkatkan kualitas penetapan target kinerja agar lebih realistis, terukur, dan menantang (stretch target).



- Memperkuat keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara konsisten.

2. Optimalisasi Implementasi SAKIP

- Mengembangkan sistem cascading kinerja hingga level individu secara lebih optimal melalui pemanfaatan aplikasi e-SAKIP.
- Meningkatkan kualitas analisis dalam LKjIP agar lebih tajam, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan kinerja.
- Mendorong implementasi reward and punishment berbasis kinerja secara lebih nyata.
- Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mempercepat penataan dan validasi data aset daerah secara menyeluruh.
- Mengoptimalkan pengelolaan piutang daerah, khususnya piutang pajak.
- Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan melalui rekonsiliasi berkala dan pendampingan intensif kepada perangkat daerah.
- Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam seluruh proses pengelolaan keuangan.

4. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

- Melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dengan tingkat serapan rendah untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil.
- Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program.
- Mendorong penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang berorientasi pada hasil.



5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, khususnya dalam bidang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.
- Memperkuat kelembagaan pengawasan internal serta fungsi pembinaan kepada perangkat daerah.
- Mengatasi keterbatasan SDM pada sektor-sektor strategis melalui penataan formasi jabatan fungsional.

6. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi

- Mengembangkan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
- Meningkatkan kualitas data kinerja agar lebih akurat, valid, dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan.

7. Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam tata kelola pemerintahan, sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang unggul, transparan, dan berorientasi hasil, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Mangupura, 25 Maret 2026

BUPATI BADUNG,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Keabsahan dapat diakses melalui pindai QRCode yang tersedia pada dokumen ini atau tautan berikut.

<https://tte.badungkab.go.id/doc/694e4a67c3d418ae60c4e5133d4e8a10>

Informasi dan panduan terkait pemeriksaan keabsahan dokumen tersedia pada <https://tte.badungkab.go.id>

LAMPIRAN I

PROGRAM PRIORITAS RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
1	Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama	Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.008.880.482,00	2.771.696.304,00	69,14%
						4.008.880.482,00	2.771.696.304,00	69,14%
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	311.148.571	186.935.181,00	60,08%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.320.355.279,00	692.357.648,00	52,44%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.720.494.399,00	1.134.557.552,00	65,94%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	1.312.369.138,00	954.793.653,00	72,75%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	692.478.438,00	355.590.010,00	51,35%
						5.356.845.825,00	3.324.234.044,00	62,06%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.983.022.366.542	1.473.422.146.520,00	74,30%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.823.651.232	4.174.740.481,00	71,69%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Adm. Pembangunan)	876.460.633	697.072.335,00	79,53%
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Keuangan)	142.896.223.187	110.538.129.125,00	77,36%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	22.556.217,00	17.048.650,00	75,58%
						2.132.641.257.811,00	1.588.849.137.111,00	74,50%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.073.411.858,00	7.738.816.783,00	85,29%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.201.765.278,00	85.501.868.305,00	87,07%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	292.320.892,00	257.161.100,00	87,97%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.043.032,00	50.970.741,00	59,24%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	653.336.626	610.090.211,00	93,38%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83.687.194,00	52.226.498,00	62,41%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	253.673.890,00	218.989.637,00	86,33%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Kesehatan	772.695.380.577,00	535.747.290.116,00	69,33%
						881.339.619.347,00	630.177.413.391,00	71,50%
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.117.956.369,00	861.517.761,00	40,68%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.506.014.530,00	6.338.379.030,00	84,44%
						9.623.970.899,00	7.199.896.791,00	74,81%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	15.738.239.877,00	12.740.940.344,00	80,96%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEHJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	5.914.924.500		0,00%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	7.315.955	7.133.123,00	97,50%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	27.552.076	16.738.471,00	60,75%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	104.596.080	24.665.815,00	23,58%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	413.138.192	412.047.788,00	99,74%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)	318.166.162	207.246.785,00	65,14%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	187.026.668.995	125.068.341.603,00	66,87%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah (Bagian Prokopim)	17.371.878.126	16.413.242.902,00	94,48%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)	106.874.170.455	72.913.201.083,00	68,22%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.475.625.642,00	1.985.958.949,00	80,22%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	10.200.774.378,00	8.589.937.228,00	84,21%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	60.963.012.237	49.019.772.979,00	80,41%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.207.870.877,00	2.601.100.203,00	81,08%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.361.718.334,00	25.318.644.261,00	73,68%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.964.140,00	133.412.561,00	73,72%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	679.033.622,00	665.148.623,00	97,96%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	916.169.796,00	887.262.510,00	96,84%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	102.887.888.873,00	83.517.893.978,00	81,17%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.005.468,00	13.983.000,00	87,36%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.409.152.183,00	1.913.889.191,00	79,44%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.504.852.853,00	796.598.719,00	52,94%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta	4.282.457.635,00	4.018.781.937,00	93,84%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta	931.965.422,00	863.077.693,00	92,61%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	5.721.836.706,00	5.579.725.266,00	97,52%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Utara	736.155.999,00	684.934.405,00	93,04%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	5.110.645.595,00	4.894.463.417,00	95,77%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	763.563.437,00	719.533.200,00	94,23%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	6.409.956.752,00	6.372.707.203,00	99,42%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mengwi	776.093.448,00	671.445.573,00	86,52%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Abiansemal	257.759.580,00	254.493.700,00	98,73%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	743.215.823,00	659.571.379,00	88,75%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang	320.593.115,00	311.479.324,00	97,16%
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan Berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Petang	714.016.649,00	614.119.813,00	86,01%
						580.367.978.982,00	428.891.493.026,00	73,90%
3	Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	6.201.288.383,00	3.914.767.155,00	63,13%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta	99.163.730,00	90.707.475,00	91,47%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Utara	30.111.866,00	6.786.140,00	22,54%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kuta Selatan	106.662.302,00	89.072.340,00	83,51%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mengwi	62.794.186,00	28.478.000,00	45,35%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Abiansemal	34.266.143,00	31.291.882,00	91,32%
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mentaati Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Petang	58.309.645,00	7.270.000,00	12,47%
						6.592.596.255,00	4.168.372.992,00	63,23%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	5.744.993.580	4.384.607.714,00	76,32%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	374.901.364,00	352.205.637,00	93,95%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	152.573.004,00	120.184.072,00	78,77%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	119.142.206,00	115.921.280,00	97,30%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	179.561.033,00	143.412.117,00	79,87%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	414.841.155,00	380.332.978,00	91,68%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	409.463.396,00	398.365.677,00	97,29%
		Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	5.287.955.452,00	4.397.141.080,00	83,15%
						12.683.431.190,00	10.292.170.555,00	81,15%
4	Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi pada Pelestarian Kearifan Lokal	Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	271.054.305.817,00	223.024.999.409,00	82,28%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan	77.232.390.197,00	46.578.078.025,00	60,31%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	6.965.875.378,00	5.082.948.493,00	72,97%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	281.306.787.888,00	235.353.323.769,00	83,66%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan	17.979.914.700,00	12.687.770.250,00	70,57%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta	5.734.084.772,00	3.604.049.903,00	62,85%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Utara	3.155.300.115,00	2.422.257.170,00	76,77%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kuta Selatan	3.370.493.999,00	2.771.192.217,00	82,22%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Abiansemal	269.005.257,00	95.114.642,00	35,36%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mengwi	6.486.762.059,00	5.625.336.756,00	86,72%
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni dan Budaya	Persentase pertumbuhan seni dan budaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Petang	336.601.991,00	78.792.000,00	23,41%
						673.891.522.173,00	537.323.862.634,00	79,73%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
5	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan, dan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	710.698.024.035,00	375.681.254.958,00	52,86%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	613.115.559,00	377.090.232,00	61,50%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	216.068.021.338,00	127.533.676.244,00	59,02%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.177.269.129,00	1.843.804.732,00	84,68%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	373.807.796	283.583.416,00	75,86%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	359.795.885.228,00	267.708.253.125,00	74,41%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit)	53.025.767.845,00	37.534.941.092,00	70,79%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan (Rumah Sakit)	195.835.653.043,00	141.882.841.402,20	72,45%
						1.538.587.543.973,00	952.845.445.201,20	61,93%
6	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat	Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	16.191.135,00	11.143.283,00	68,82%
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	271.669.495,00	268.044.689,00	98,67%
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	34.788.777,00	24.029.361,00	69,07%
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	543.983.136,00	543.819.130,00	99,97%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	138.667.487,00	137.807.487,00	99,38%
						1.005.300.030,00	984.843.950,00	97,97%
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	506.580.819,00	461.745.903,00	91,15%
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.065.298.479,00	1.755.348.226,00	84,99%
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha	Persentase pertumbuhan jumlah wirausaha	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.906.931.760,00	15.426.418.004,00	77,49%
						22.478.811.058,00	17.643.512.133,00	78,49%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.418.152,00	2.194.274,00	90,74%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	620.522.854,00	583.837.214,00	94,09%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.821.314,00	1.224.709,00	0,49%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	428.596.940,00	383.773.114,00	89,54%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	606.489,00	384.000,00	63,32%
						1.303.965.749,00	971.413.311,00	74,50%
7	Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	371.235.693,00	295.448.214,00	79,59%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.021.302,00	232.048.639,00	92,44%
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.964.852.305,00	1.701.559.498,00	86,60%
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.101.179.188,00	3.059.777.225,00	98,66%
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	156.116.469,00	144.116.110,00	92,31%
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	83.222.916,00	81.832.369,00	98,33%
						5.927.627.873,00	5.514.782.055,00	93,04%
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	2.416.964.064,00	1.901.872.718,00	78,69%
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	3.340.571.169,00	1.809.888.556,00	54,18%
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	390.310.659.568,00	362.238.660.939,00	92,81%
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	231.182.421,00	176.496.260,00	76,35%
						396.299.377.222,00	366.126.918.473,00	92,39%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
8	Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata	136.356.113.260,00	135.123.686.114,40	99,10%
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata	763.931.546,00	756.274.221,00	99,00%
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata	545.781.577,00	421.382.888,00	77,21%
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah (Bagian SDA)	232.352.844	177.727.884,00	76,49%
						137.898.179.227,00	136.479.071.107,40	98,97%
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.756.468.824,00	1.811.532.127,00	65,72%
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	37.621.980,00	37.441.240,00	99,52%
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri yang Berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	Persentase pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	65.369.370.351,00	45.984.887.250,00	70,35%
						68.163.461.155,00	47.833.860.617,00	70,18%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	2.676.294,00	2.646.500,00	98,89%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Pangan	6.796.804.754,00	5.280.694.272,00	77,69%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	146.531.915,00	141.146.485,00	96,32%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Pangan	58.632.054,00	57.150.835,00	97,47%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	19.544.212.992,00	16.504.967.918,00	84,45%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	9.897.146.702,00	7.519.637.144,00	75,98%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Pangan	2.227.892.450,00	2.139.788.937,00	96,05%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	628.922.382,00	608.591.035,00	96,77%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Pangan	1.031.625.589,00	978.573.273,00	94,86%
						40.334.445.132,00	33.233.196.399,00	82,39%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	1.525.072.542,00	1.501.515.248,00	98,46%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	15.827.228.166,00	13.256.930.264,00	83,76%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	45.793.441,00	42.904.895,00	93,69%
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas Produk Pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	594.274.398,00	401.787.270,00	67,61%
						17.992.368.547,00	15.203.137.677,00	84,50%
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata	2.645.335.153,00	1.124.767.425,00	42,52%
						2.645.335.153,00	1.124.767.425,00	42,52%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.499.193.785,00	1.362.225.352,00	90,86%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	255.213.410,00	211.963.294,00	83,05%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	250.389.308,00	227.467.967,00	90,85%
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	85.471.411,00	82.226.392,00	96,20%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	278.596.159.958	169.318.081.489,00	60,78%
						280.686.427.872,00	171.201.964.494,00	60,99%
9	Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.642.279.108,00	4.266.912.595,00	75,62%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah	11.354.644.898,00	8.337.263.189,00	73,43%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.722.694.526,00	125.143.183.225,00	63,94%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.834.994.780,00	18.482.373.031,00	77,54%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.304.946.315,00	5.071.047.992,00	80,43%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	398.479.945.663,00	294.664.835.741,00	73,95%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.587.471.637.721,00	805.149.918.129,00	31,12%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.455.804.416,00	1.117.558.152,00	76,77%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.148.370.219,00	10.118.538.132,00	90,76%

No.	Misi	Sasaran	Indikator	Program	PD	Pagu Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.373.070.659,00	6.412.793.227,00	86,98%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.128.346.776,00	6.389.738.945,00	70,00%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.559.863.662,00	9.256.849.138,00	73,70%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	210.186.716.517,00	190.885.279.390,00	90,82%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	4.264.651.754,00	4.062.095.746,00	95,25%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu	302.221.756,00	281.121.225,00	93,02%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	714.998.940,00	49.570.342,00	6,93%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.850.819,00	14.503.391,00	58,36%
		Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.045.874.106,00	17.462.506.429,00	72,62%
						3.510.015.912.635,00	1.507.166.088.019,00	42,94%
					TOTAL PAGU	17.149.673.804.545,00		

LAMPIRAN II :

**FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR SESUAI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : (Y).= (X1) + (X2) + (X3) Dimana : (Y) : Indeks kerukunan umat beragama (X1) : Pola Pendidikan Keluarga (X2) : Peran Kementerian Agama (X3) : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan Hasil Survei Kerukunan Umat Beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya. Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Capaian Kinerja Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Sekretariat Daerah Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Opini BPK	<p>Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.</p> <p>Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, Opini Tidak Wajar atau <i>adversed opinion</i>, dan Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
3	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE Oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j. <p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.</p>		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya.</p> <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan :</p> <p>IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme k-i IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p>	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100		
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ </div> Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25-100.	Laporan Hasil survei kepuasan masyarakat	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah : $\frac{\sum \text{Penyelesaian Penegakan Perda dan perkada}}{\sum \text{Pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$ Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan Perkada adalah 0 – 100%	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-hak Dasar Manusia oleh	Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:</p> $\bar{x} = \sum x / n$ <p>x : Nilai Rata-rata x : Jumlah capaian seluruh indikator n : Jumlah kriteria</p> <p>Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100</p>	Kementerian Hukum dan HAM RI	
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah :</p> $\frac{\sum \text{Kreativitas Seni yang Sudah Ada}}{\sum \text{Kreativitas Seni}} \times 100 \%$ <p>Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%</p>	Data Pertumbuhan Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut:</p>	Data Capaian Indikator IPM dari BPS	Dinas Kesehatan Kab. Badung. Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ <p>Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p> <p>1. Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>2. Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>3. Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia adalah 0-100.</p>		Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	<p>Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn = Jumlah koperasi sehat P1 = Jumlah koperasi yang dinilai Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100 %.</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha adalah :</p> $\frac{Pn - P1}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn = Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha adalah 0 – 100%.</p>	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung
11	Meningkatnya kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	<p>Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah :</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p>	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB berasal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Pn = Kontribusi sektor perdagangan P1 = Kontribusi seluruh sektor</p> <p>Hasil pengukuran persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah 0 – 100%.</p>	dari BPS	
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	<p>Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang.</p> <p>Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (<i>Life Satisfaction</i>), Dimensi Perasaan (<i>Affect</i>), Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>).</p> <p>Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.</p> <p>Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut :</p> $IKH = \frac{W_1 \times I_{KepuasanHidup} + W_2 \times I_{Perasaan} + W_3 \times I_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$ <p>W₁ = Penimbang dimensi kepuasan hidup W₂ = Penimbang dimensi perasaan W₃ = Penimbang dimensi makna hidup W₁+W₂+W₃=1 I_{Kepuasan Hidup} = Indeks Dimensi Kepuasan Hidup I_{Perasaan} = IndeksDimensi Perasaan (Afeksi) I_{Makna Hidup} = Indeks Dimensi Makna Hidup</p>	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase penduduk miskin sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0 – 100%.</p>	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial Kabupaten Badung
14	Meningkatnya pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	<p>Rumus Formulasi penghitungan Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian sebagai berikut :</p> $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian adalah 0 – 100%.</p>	Data pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
15	Meningkatnya pengembangan agroindustry yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam	<p>Rumusan Formulasi penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut :</p> $\frac{\sum \text{Usaha Agroindustry yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustry}}$ <p>Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustry yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.</p>	Data Pengembangan agroindustry Kabupaten Badung	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	<p>NTUP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan</p>	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	pertanian		<p>barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula <i>Modified Laspeyres Index</i></p> $NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>Keterangan : NTUP=Nilai Tukar Usaha Petani It=Indeks harga yang diterima petani IbBPPBM=Indeks harga yang dibayar petani Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTP \leq 100$.</p>	Badung	Badung
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<p>NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen-Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut : $NTN = (It/Ib) \times 100$ Dimana : It = Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100 Ib = Jumlah total pengeluaran rumah tangga</p>	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan Kab. Badung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB														
			<p>pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100</p> <p>Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq \text{NTN} \leq 100$.</p>																
17	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	<p>PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi penghitungan sebagai berikut:</p> $Y = C + G + GFCF + \Delta \text{Invent} + X - M$ <p>di mana:</p> <table border="0"> <tr> <td>Y (<i>Income</i>)</td> <td>= PDRB</td> </tr> <tr> <td>C (<i>Consumption</i>)</td> <td>= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT</td> </tr> <tr> <td>G (<i>Government</i>)</td> <td>= Konsumsi pemerintah</td> </tr> <tr> <td>GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)</td> <td>= Pembentukan modal tetap bruto</td> </tr> <tr> <td>Δ Invent</td> <td>= Perubahan inventori</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>= Ekspor</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>= Impor</td> </tr> </table> <p>Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%</p>	Y (<i>Income</i>)	= PDRB	C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT	G (<i>Government</i>)	= Konsumsi pemerintah	GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan modal tetap bruto	Δ Invent	= Perubahan inventori	X	= Ekspor	M	= Impor	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata Kab. Badung
Y (<i>Income</i>)	= PDRB																		
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT																		
G (<i>Government</i>)	= Konsumsi pemerintah																		
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan modal tetap bruto																		
Δ Invent	= Perubahan inventori																		
X	= Ekspor																		
M	= Impor																		
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.</p> <p>Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah :</p>	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 0-100		
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Evironment</i> 2. Aspek Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i> 3. Aspek Pasar/ <i>Market</i> 4. Aspek Ekosistem Inovasi Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah : $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 - 5	Hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Kemenristek/ BRIN	Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung